

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



RENJA

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2026

*Sehat Masyarakatnya,
Hebat Daerahnya*



JOHN KENEDY AZIS
Bupati Padang Pariaman

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Terwujudnya
Transformasi Kesehatan
yang Berkualitas,
Berkeadilan dan
Berkelanjutan



Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan



Memperkuat Sistem
Kesehatan yang Terintegrasi
dan Inovatif



Mewujudkan Masyarakat
Padang Pariaman
yang Sehat dan Produktif



dinkes.padangpariamankab.go.id



[dinkes_padangpariaman](https://www.instagram.com/dinkes_padangpariaman)



Dinas Kesehatan
Padang Pariaman



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR : 312/BPP/DinasKesehatan/2025 TENTANG RENCANA KERJA PENYESUAIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi serta arah Kebijakan
- b. Teknis;
- bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

- f. Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7,
- g. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
- h. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
- i. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- j. Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
- k. Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
- l. Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
- m. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
- n. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2016 Tentang
- o. Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
- p. Pembangunan Daerah Tahun 2015;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
- q. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
- r. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
- s. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
- t. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
- u. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
- v. Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- w. (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- x. Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang
- y. Pariaman 2020-2040;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
- z. Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- aa. (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun

- ab. 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ac Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
- ad Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 445/KEP/BPP/DINKES-2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Parik Malintang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Pit. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman



dr. Eriyeni, M.Kes
NIP. 19730408200212 2 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Dinas Kesehatan melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman



J. Emyeni, M.Kes

NIP. 19730408 200212 2 002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		
5		
DAFTAR TABEL		
6		
DAFTAR GAMBAR		
9		
BAB I	PENDAHULUAN	10
	1.1 Latar Belakang	10
	1.2 Landasan Hukum	16
	1.3 Maksud dan Tujuan	18
	1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja	19
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	23
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	23
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	74
	2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	170
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja	183
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	204
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	217
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	217
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	219
	3.3 Program dan Kegiatan	226
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	233
BAB V	PENUTUP	258

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Kalender Perencanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026	12
Tabel 2.1	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025	24
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	54
Tabel 2.3	Pengukuran dengan Skala Ordinal	74
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)	75
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)	77
Tabel 2.6	Permasalahan Pelayanan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	79
Tabel 2.7	Permasalahan Pelayanan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	83
Tabel 2.8	Permasalahan Pelayanan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	85
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Balita Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	87
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Usia Produktif Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	90
Tabel 2.11	Permasalahan Pelayanan Usia Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	93
Tabel 2.12	Permasalahan Pelayanan Hipertensi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	96
Tabel 2.13	Permasalahan Pelayanan Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	98
Tabel 2.14	Permasalahan Pelayanan ODGJ Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	101



2025

Tabel 2.15	Permasalahan Pelayanan Tuberculosis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	103
Tabel 2.16	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	106
Tabel 2.17	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	113
Tabel 2.18	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Jumlah Kecamatan Sehat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	123
Tabel 2.19	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	126
Tabel 2.20	Cakupan IKS kabupaten Padang pariaman Tahun 2025	127
Tabel 2.21	Standar Ketenagaan Puskesmas	129
Tabel 2.22	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Puskesmas dengan Tenaga Sesuai Standar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	129
Tabel 2.23	Data Puskesmas dengan Jumlah Tenaga Sesuai Standar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	130
Tabel 2.24	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator IRT-P yang Diawasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	133
Tabel 2.25	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Rumah Tangga PHBS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	135
Tabel 2.26	Puskesmas Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Tahun 2025	141
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)	145
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)	147



Tabel 2.29	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	151
Tabel 2.30	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	164
Tabel 2.31	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering	164
Tabel 2.32	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	165
Tabel 2.33	Permasalahan dan Hambatan Dinas Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	166
Tabel 2.34	Hasil Identifikasi Isu Strategis	172
Tabel 2.35	Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026	184
Tabel 2.36	Usulan Program/ Kegiatan Dari Masyarakat	205
Tabel 3.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	218
Tabel 3.2	Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	220
Tabel 3.3	Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	224
Tabel 3.4	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2026	225
Tabel 3.5	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026	226
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	234



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja		11
Gambar 1.2	Pendekatan Secara Substansi Penyusunan Renja Tahun 2027		13
Gambar 1.3	Pendekatan Secara Proses Penyusunan Renja Tahun 2027		14
Gambar 1.4	Penggunaan Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan RKPDP Tahun 2027		15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD,

perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah



Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat

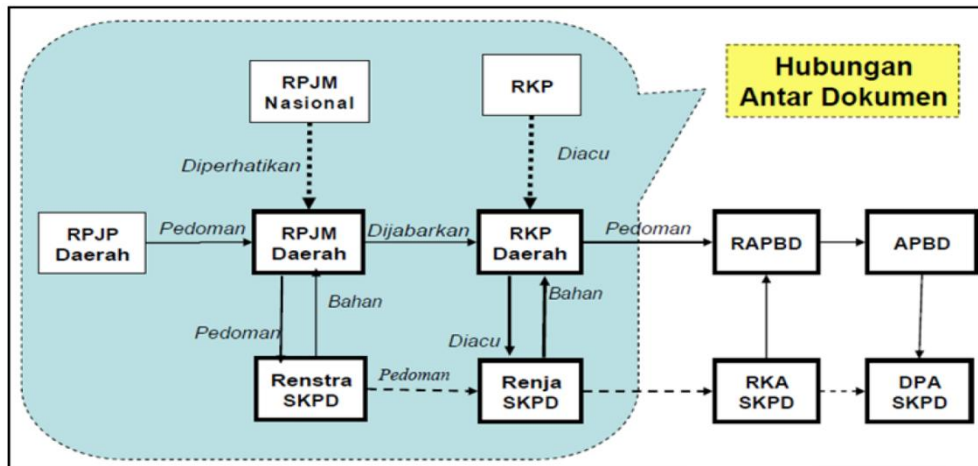


perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas

Kesehatan merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Kesehatan merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Kesehatan dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Kesehatan dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Kesehatan dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Kesehatan akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Dinas Kesehatan untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Kesehatan diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan



spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Kesehatan untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Kesehatan juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Kesehatan didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat



selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariama

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.



1.3. Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Kesehatan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;



- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja Perangkat Daerah harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan

proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja Perangkat Daerah juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perangkat Daerah. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja Perangkat Daerah yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja Perangkat Daerah ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja Perangkat Daerah yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja Perangkat Daerah juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tidak hanya itu, Renja Perangkat Daerah juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja Perangkat

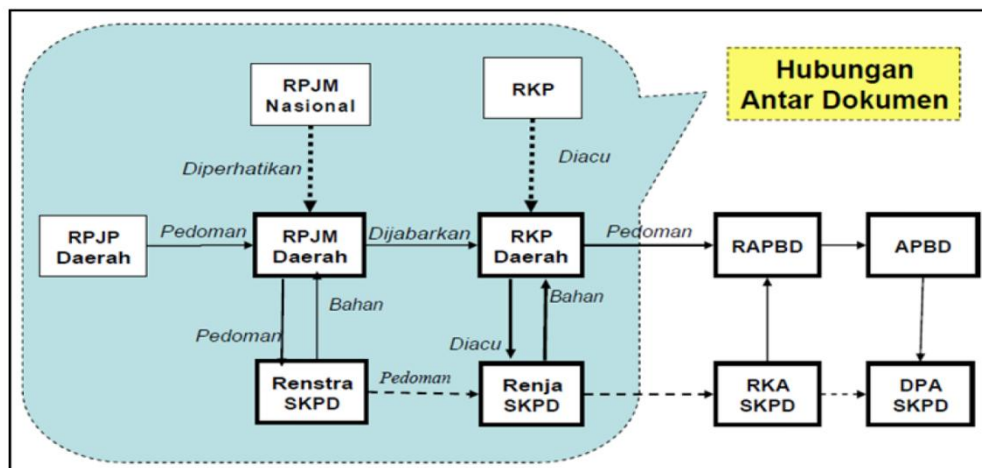


Daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029



Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Bapelitbangda merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Bapelitbangda merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Kesehatan dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Kesehatan dengan RPJMD adalah penyesuaian anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Kesehatan dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Kesehatan akan menyesuaikan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.



Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Bapelitbangda untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Kesehatan diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Kesehatan untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Kesehatan juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Kesehatan didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dengan Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini

berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.1 DASAR PENYUSUNAN

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi



Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun



- 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sasaran pembangunan daerah urusan perencanaan;
3. Pedoman dan arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Bapelitbangda sehingga terstruktur dan sistematis.

1.3 SISTEMATIKA TULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat

Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi:

- I.1. Latar belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- I.2. Landasan hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- I.3. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- I.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu (tahun 2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2027), mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kesehatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan**, berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.** Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
2. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.** Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. **Program dan Kegiatan** Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

1. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.



RENCANA KERJA 2026

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :



2.1. 1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Restra :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi	
		Realisasi	%	Satuan		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75	15	20	Dokumen	5.143.000	4.387.700	85.31
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	75	94	Dokumen	9.166.000	8.550.491	93.28
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kab/Kota							
1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9401	5727	60.92	Orang	48.960.200	33.019.686	67.44
2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9342	8000	85.63	Orang	104.290.000	14.981.953	14.37
3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.691	20.690	67.41	Orang	12.670.000	11.156.000	88.05
4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	83.626	24.808	29.67	Orang	16.150.000	15.707.000	97.26
5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	274.295	176.908	64.5	Orang	16.820.000	16.225.000	96.46
6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.610	58.125	97.51	Orang	18.890.000	17.635.000	93.36
7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74.074	52.612	71.03	Orang	17.670.000	12.483.100	70.65
8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3636	2619	72.03	Orang	382.725.700	281.294.578	73.5
9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9401	981	10.44	Orang	11.000.000	9.045000	82.23
10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2619	2126	81.18	Orang	1.790.450.100	1.756.229.050	98.09
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10001	4040	40.4	Orang	156.565.000	138.068.200	88.19
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	25	15	60	Dokumen	56.990.000	55.984.300	98.24
13 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	4	33.33	Dokumen	102.282.300	64.048.600	62.62
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3538	2600	73.49	Orang	58.900.000	52.456.000	89.06
15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	180	162	90	Orang	58.900.000	52.456.000	89.06



RENCANA KERJA 2026

1 6	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24	8	33.33	Laporan	1.198.749.813	950.850.942	79.32
1 7	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	40	8	20	Paket	31.445.000	20.644.500	65.65
1 8	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7	3	42.86	Laporan	67.040.000	53.3778.300	79.62
1 9	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	2	50	Dokumen	18.860.000	16.155.000	85.66
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	40	14	35	Unit	279.738.000	262.511.166	93.84
2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25	13	52	Dokumen	24.530.000	24.314.800	99.12
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	29	29	Laporan	349.720.000	229.375.400	65.59
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250	158	63.2	Orang	1.370.949.000	853.198.700	62.23



2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renstra :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET	Pencapaian Kinerja			ANGGARAN	REALISASI
			Realisasi	%	Satuan		
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100	Dokumen	32.614.900	1.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100	Dokumen	25.000.000	720.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	15	100	Dokumen	15.050.000	14.482.305
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	3	100	Laporan	78.311.100	77.842.305
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Laporan	9.005.000	8.945.250
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1	100	Dokumen	5.700.000	5.700.000
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15	15	100	Laporan	9.559.800	9.457.475
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	Paket	8.000.000	8.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100	Paket	0	0
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100	Paket	9.200.000	9.200.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	100	Paket	0	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	100	Paket	5.000.000	4.980.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	100	Paket	0	0
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13	13	100	Laporan	5.000.000	4.980.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	13	100	Laporan	62.170.000	61.280.862
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	0	
1	Pengadaan Mebel	1	1	100	Paket	16.000.000	12.800.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100	Paket	8.810.000	5.180.000
Penyediaan Jasa Penunjang							



RENCANA KERJA 2026

Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	Surat	0	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Laporan	222.000.000	191.343.868
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100	Laporan	6.290.100	6.290.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100	Unit	3.816.000	1.153.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	3	100	Unit	306.409.880	205.019.880
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4	4	100	Unit	434.685.460	429.940.400
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	2	100	Unit	1.390.84.243	1.61.7731.620
4	Pengadaan Alkes / alat penunjang medisk fasilitas pelayanan kesehatan	25	25	100	Unit	738.259.490	735.750.000
5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25	25	100	Unit	261.808.500	239.534.130
6	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Ckasin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	1	100	Paket	5.749.862.807	5.658.631.836
7	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	4	100	Paket	88.076.000	68.138.950
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22,058,564,501	2.61		22,058,564,501	576,690,384
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7884	7884	100	Orang	24.860.000	13.007.138
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1122	1122	100	Orang	16.930.000	15.806.400
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12	12	100	Persentase	12.720.000	12.710.400
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24	24	100	Dokumen	14.750.000	11.427.500
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60	60	100	Dokumen	582.950.288	560.182.728
6	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	12	100	Dokumen	517.854.000	479.609.020



RENCANA KERJA 2026

19	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	4	100	Dokumen	16.285.881.400	15.271.257.202
20	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	250	250	100	Dokumen	16.160.000	13.556.000
21	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	4	100	Dokumen	29.500.000	27.516.000
22	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	100	Unit	181.600.000	164.250.000
23	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	25	25	100	Unit	54.800.000	38.2774.500
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25	25	100	Dokumen	251.250.000	250.1776.184
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	1	1	100	Unit	16.470.000	16.446.500
2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	Unit	8.606.800	8.560.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	225	225	100	Dokumen	12.697.300	3.219.500
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	225	225	100	Dokumen	3.986.000.00	6.198.300
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	2	100	Dokumen	17.433.900	8.665.900
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7	7	100	Orang	1.010.778.100	973.248.100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	2	100	Dokumen	107.411.800	77.7759.407



RENCANA KERJA 2026

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3	3	100	Dokumen	185.149.600	62.581.100
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	3	100	Dokumen	17.000.000	8.700.000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	12	12	100	Dokumen	234.769.600	137.933.100

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Terdapatnya perubahan regulasi yang secara tidak langsung mengubah sistematis pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah;
- b. Ketersediaan SDM pengelola dan tenaga ahli yang kurang pada setiap lini teknis dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- c. Struktur penganggaran yang kurang support.

Namun demikian masih terdapat juga faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Terdapatnya perubahan regulasi yang secara tidak langsung mengubah sistematis penyusunan perencanaan pada Perangkat Daerah;
- b. Lambatnya penyesuaian Pemerintah Daerah dalam beradaptasi dengan perubahan sistematis dan alur pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah;
- c. Penyediaan struktur anggaran yang kurang memadai.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Kesehatan sangat signifikan ketika Renja disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Badan dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bapelitbangda Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Badan dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. Implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Bapelitbangda tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas Kesehatan mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target

yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus Program Strategis Nasional harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas Kesehatan bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan Monitoring dan Evaluasi yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil



tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu

diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program



RENCANA KERJA 2026

Tabel 2.1 (TC 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/Kegiatan (output)).	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	K	K	K	K	K	K	Rp
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	A	A	A	90	100	A	100
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100



RENCANA KERJA 2026

1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	26 Dokumen	26 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	26 Dokumen	26 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	26 Dokumen	26 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	26 Dokumen	26 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

		Perubahan DPA-SKPD								
1.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100.00	15 Laporan	15 Laporan	100%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	955 Orang/Bulan	970 Orang/Bulan	960 Orang/Bulan	960 Orang/Bulan	95	955 Orang/Bulan	955 Orang/Bulan	100%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	15 Dokumen	1 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	15 Dokumen	15 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

		Akuntansi SKPD								
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100	15 Laporan	15 Laporan	100%
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100.00	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	123 Orang	162 Orang	170 Orang	170 Orang	100.00	123 Orang	123 Orang	100%
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	931 Orang	910 Orang	911 Orang	911 Orang	100	931 Orang	931 Orang	100%
		Jumlah SKP ASN	946 Orang	946 Orang	946 Orang	946 Orang	100	946 Orang	946 Orang	100%



RENCANA KERJA 2026

		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TP	946 Orang	946 Orang	946 Orang	946 Orang	100	946 Orang	946 Orang	100%
1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0	10 Unit	10 Unit	100%
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	80 Paket	85 Paket	85 Paket	0	95 Paket	95 Paket	100%
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	0	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	0	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	0	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.02.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0	5 Orang	5 Orang	100%
1.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.02.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0	20 Orang	20 Orang	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.01.2.05.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%
1.02.01.2.05.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	65 Orang	70 Orang	70 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100%
1.02.01.2.05.0010	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	65 Orang	70 Orang	70 Orang	95.00	80 Orang	80 Orang	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	2461 Surat	2431 Surat	2441 Surat	2441 Surat	100.00	2461 Surat	2461 Surat	100%
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	100	7 Pelayanan	7 Pelayanan	100%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	0	13 Laporan	13 Laporan	100%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100	13 Laporan	13 Laporan	100%
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	0	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	12 unit	Rp 60.000.000	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	100.00	12 unit	12 unit	100%
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Roda 4/1 Roda 2	1 Roda 4/1 Roda 2	1 Roda 4/1 Roda 2	1 Roda 4/1 Roda 2	0	1 Roda 4/1 Roda 2	1 Roda 4/1 Roda 2	100%
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.07.0003	Pengadaan ALat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0	2 Paket	2 Paket	100%
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	12 bulan	100%
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100.00	13 Laporan	13 Laporan	100%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00	12 Laporan	12 Laporan	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.01.2.09.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00	2 Paket	2 Paket	100%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	12 Bulan	0.00	0.00	-	0	0%	100%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0.00	0	0.00	0.00	-	0	0%	100%
1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	0	0	0	0	0	0%	100%
1.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	0	0	0	0	0	0%	100%
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	0	12 Unit	12 Unit	100%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	0	12 Unit	12 Unit	100%
1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	0	12 Unit	12 Unit	100%
1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	0	12 Unit	12 Unit	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung/Tahun	1 Gedung/Tahun	1 Gedung/Tahun	1 Gedung/Tahun	0	1 Gedung/Tahun	1 Gedung/Tahun	100%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	-	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	100%
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	-	1 Sarana/Tahun	1 Sarana/Tahun	100%
1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1000m2	1000m2	1000m2	1000m2	0	1000m2	1000m2	100%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan BLUD	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	100.00	25 Puskesmas	25 Puskesmas	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100.00	25 Orang	25 Orang	100%



RENCANA KERJA 2026

		Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit Indeks Kepuasan masyarakat Persentase Sampel Air yang diperiksa Persentase sediaan farmasi yang dikelola Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial Jumlah ketersediaan data dalam profil kesehatan Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisik kurang dari sama dengan	130 Tempat Tidur	145 Tempat Tidur	135 Tempat Tidur	135 Tempat Tidur	100.00	130 Tempat Tidur	130 Tempat Tidur	10000%
			B	A	A	A	100.00	B	B	100%
			100	100	100.00	100.00	100.00	100	100%	100%
			100	100	100.00	100.00	100.00	100	100%	100%
			60	60	60.00	60.00	60.00	100	60%	100%
			100	100	100.00	100.00	100.00	100	100%	100%
			169 Data	169 Data	169 Data	169 Data	100	169 Data	169 Data	100%
			1	100	1.00	1.00	100	100	100%	100%
			1	100	1.00	1.00	100	100	100%	100%



RENCANA KERJA 2026

		2%								
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	1	100	1.00	1.00	100	100	100%	100%
		Angka Kematian Bayi	47 Orang	44 Orang	46 Orang	46 Orang	100	47 Orang	47 Orang	100%
		Prevalensi Stunting	0.184	14	0.16	0.16	100	0	18%	100%
		Persentase kecamatan sehat	0.7647	94,12	0.82	0.82	100	1	76%	100%
		Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas	1	100	1.00	1.00	100	1	100%	100%
		Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus	884 Orang	1202 Orang	983 Orang	983 Orang	100	884 Orang	884 Orang	100%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkesmas, FKTP, dan RS) yang melaporkan hasil surveilans	1	100	1.00	1.00	100	1	100%	100%



RENCANA KERJA 2026

		Persentase penduduk sesuai kelompok umur yang mendapatkan pelayanan imunisasi	1	100	1.00	1.00	100	1	100%	100%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang diawasi	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	100.00	1 RS	1 RS	100%
		Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	3 Sarana	3 Sarana	3 Sarana	3 Sarana	100.00	3 Sarana	3 Sarana	100%
		Jumlah Pengadaan Obat dan BMHP	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100.00	3 paket	3 paket	100%
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	10 paket	10 paket	56 paket	56 paket	100.00	10 paket	10 paket	100%
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.01.0005	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100%
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100%
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	9 Unit	9 Unit	30	5 Unit	5 Unit	100%
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100%
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%
1.02.02.2.01.0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%
1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	75	25 Unit	25 Unit	100%
1.02.02.2.01.0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.02.2.01.0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.02.2.01.0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%
1.02.02.2.01.0019	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	0	25 Unit	25 Unit	100%
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket	100%



RENCANA KERJA 2026

		Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen administrasi Labkesda	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen administrasi IFK	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan	25 Pelayanan	25 Pelayanan	25 Pelayanan	25 Pelayanan	100.00	25 Pelayanan	25 Pelayanan	100%



RENCANA KERJA 2026

		Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
		Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90%	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	100.00	1 RS	1 RS	100%
		Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	25 fasyankes	25 fasyankes	25 fasyankes	25 fasyankes	100.00	25 fasyankes	25 fasyankes	100%
		Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
		Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratan dengan PSC 119 (100%)	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	100.00	1 RS	1 RS	100%
		Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		Prevalensi balita wasting	70	0.075	0.07	0.07	100.00	70.00	7000%	100%



RENCANA KERJA 2026

		Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana	58 Orang	50 Orang	53 Orang	53 Orang	100.00	58 Orang	58 Orang	100%
		Jumlah peserta KB Aktif	68.152 Orang	28.152 Orang	38.152 Orang	38.152 Orang	100.00	68.152 Orang	68.152 Orang	100%
		Jumlah Lansia yang dilakukan skrining kesehatan	58.130 Orang	58.115 Orang	58.120 Orang	58.120 Orang	100.00	58.130 Orang	58.130 Orang	100%
		Jumlah nagari dengan stob buang air besar sembarangan (SBS)	68 Nagari	31 Nagari	41Nagari	41Nagari	100.00	68 Nagari	68 Nagari	100%
		Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
		Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	85 TFU	65 TFU	75 TFU	75 TFU	100.00	85 TFU	85 TFU	100%
		Jumlah media KIE yang dibuat	3156 KIE	3156 KIE	3156 KIE	3156 KIE	100.00	3156 KIE	3156 KIE	100%
		Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	84.098 Orang	66.671 Orang	67.208 Orang	67.208 Orang	100.00	84.098 Orang	84.098 Orang	100%
		Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus Tuberkulosis	1113 kasus	894 Kasus	994 kasus	994 kasus	100.00	1113 kasus	1113 kasus	100%



RENCANA KERJA 2026

		Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV)	95 Kasus	72 kasus	79 Kasus	79 Kasus	100.00	95 Kasus	95 Kasus	100%
		Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar	25 Tatalaksa na	25 Tatalaksa na	25 Tatalaksa na	25 Tatalaksa na	100.00	25 Tatalaksa na	25 Tatalaksa na	100%
		Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	33895 Orang	33895 Orang	33895 Orang	33895 Orang	100.00	33895 Orang	33895 Orang	100%
		Jumlah kegiatan surveilan epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100.00	7 kegiatan	7 kegiatan	100%
		Jumlah kejadian ikutan pasca iminusi (KIPI)	7 Kejadian	7 Kejadian	7 Kejadian	7 Kejadian	100.00	7 Kejadian	7 Kejadian	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumen	169 Dokumen	169 Dokumen	169 Dokumen	100.00	169 Dokumen	169 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9780 Orang	8220 Orang	9321 Orang	9321 Orang	80.00	9780 Orang	9780 Orang	100%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.262 Orang	7847 Orang	9.262 Orang	9.262 Orang	80.00	9.262 Orang	9.262 Orang	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.402 Orang	7473 Orang	8.827 Orang	8.827 Orang	83.00	9.402 Orang	9.402 Orang	100%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37.766Orang	36.722 Orang	37.766Orang	37.766Orang	87.00	37.766Orang	37.766Orang	100%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.827 Orang	37.227 Orang	84.304 Orang	84.304 Orang	100.00	31.827 Orang	31.827 Orang	100%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279.738 Orang	245.753 Orang	283.077 Orang	283.077 Orang	87.00	279.738 Orang	279.738 Orang	100%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59.976 Orang	57.026 Orang	56.338 Orang	56.338 Orang	94.00	59.976 Orang	59.976 Orang	100%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84.098 Orang	66.671 Orang	67.208 Orang	67.208 Orang	85.00	84.098 Orang	84.098 Orang	100%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2710 orang	2410 orang	2510 orang	2510 orang	100.00	2710 orang	2710 orang	100%



RENCANA KERJA 2026

		Standar								
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	907 Orang	877 Orang	887 Orang	887 Orang	96.00	907 Orang	907 Orang	100%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.719 Orang	2.219 Orang	2.319 Orang	2.319 Orang	78.00	2.719 Orang	2.719 Orang	100%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0.17/1000 penduduk	8.004 Orang	9.001 orang	9.001 orang	71.00	0.17/1000 penduduk	0.17/1000 penduduk	100%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

		Berpotensi Bencana Sesuai Standar								
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4000 Dokumen	4000 Dokumen	4000 Dokumen	4000 Dokumen	100.00	4000 Dokumen	4000 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100.00	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3638 Orang	3508 Orang	3518 Orang	3518 Orang	100.00	3638 Orang	3638 Orang	100%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	172 Orang	152 Orang	157 Orang	157 Orang	100.00	172 Orang	172 Orang	100%
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan	260 Orang	230 Orang	240 Orang	240 Orang	100.00	260 Orang	260 Orang	100%



RENCANA KERJA 2026

		Sekolah								
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	100.00	40 Paket	40 Paket	100%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	104 dokumen	103 dokumen	103 dokumen	103 dokumen	100.00	104 dokumen	104 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	15 Puskesmas	-	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100.00	15 Puskesmas	15 Puskesmas	100%
1.02.02.2.02.0031	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100.00	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	100.00	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	100%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100.00	7 Laporan	7 Laporan	100%
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumen	169 Dokumen	169 Dokumen	169 Dokumen	100.00	169 Dokumen	169 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.03.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumen	169 Dokumen	169 Dokumen	169 Dokumen	100	169 Dokumen	169 Dokumen	100%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
1.02.02.2.03.0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25 Alat	25 Alat	25 Alat	25 Alat	100	25 Alat	25 Alat	100%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang terakreditasi Paripurna	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%
		Jumlah klinik pratama terakreditasi Paripurna	9 Klinik	9 Klinik	9 Klinik	9 Klinik	100.00	9 Klinik	9 Klinik	100%
		Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan	38 Sarana	38 Sarana	38 Sarana	38 Sarana	100.00	38 Sarana	38 Sarana	100%
		Jumlah FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dan sama dengan 2%	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	100.00	25 puskesmas	25 puskesmas	100%



RENCANA KERJA 2026

		Jumlah FKTP dengan penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit	25 puskesmas dan 1 RS	25 puskesmas dan 1 RS	25 puskesmas dan 1 RS	25 puskesmas dan 1 RS	100.00	25 puskesmas dan 1 RS	25 puskesmas dan 1 RS	100%
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasilitas Kesehatan melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas	10 Puskesmas	10 Puskesmas	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100.00	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100%
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	100	1 RS	1 RS	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	100	1 RS	1 RS	100%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	100	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	100%
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis	70	40 Paket	150 Orang	150 Orang	100.00	70.00	7000%	100%
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin praktek medis dan nakes yang diberikan	900 rekomendasi	850 rekomendasi	900 Rekomendasi	900 Rekomendasi	100.00	900 rekomendasi	900 rekomendasi	100%
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2190 Dokumen	850Dokumen	850 Dokumen	850 Dokumen	100	2190 Dokumen	2190 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2190 Dokumen	850Dokumen	850 Dokumen	850 Dokumen	100	2190 Dokumen	2190 Dokumen	100%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	83 Nakes	59 Nakes	71 Nakes	71 Nakes	100.00	83 Nakes	83 Nakes	100%
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	102 orang	70 Orang	90 Orang	90 Orang	100	102 orang	102 orang	100%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	120 Dokumen	70 Dokumen	90 DOkumen	90 DOkumen	100	120 Dokumen	120 Dokumen	100%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	235 Orang	240 Orang	240 Orang	100.00	50 Orang	50 Orang	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	100 Orang	150 Orang	150 Orang	100	250 Orang	250 Orang	100%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	20	20	20.00	20.00	100.00	20.00	2000%	100%
		Persentase IRTP yang memiliki SPPIRT	75	60	65.00	65.00	100.00	75.00	7500%	100%
		Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi	85	55	65.00	65.00	100.00	85.00	8500%	100%
1.02.04.02.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT yang memiliki izin	75 Sarana	75 Sarana	75 Sarana	75 Sarana	100.00	75 Sarana	75 Sarana	100%
1.02.04.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.04.02.002		Tradisional (UMOT)								
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35 Sarana	31 Sarana	31 Sarana	31 Sarana	100	35 Sarana	35 Sarana	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko ALat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	35 Sarana	31 Sarana	31 Sarana	31 Sarana	100	35 Sarana	35 Sarana	100%
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produkis ALat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan	Jumlah SPPIRT yang diterbitkan	70 SPPIRT	70 SPPIRT	70 SPPIRT	70 SPPIRT	100	70 SPPIRT	70 SPPIRT	100%



RENCANA KERJA 2026

	Rumah Tangga									
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh	3 Sarana	2 Sarana	3 Sarana	3 Sarana	100.00	3 Sarana	3 Sarana	100%



RENCANA KERJA 2026

	Tangga	Industri Rumah Tangga yang diterbitkan								
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Prduk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syaat sesuai standar	75 sarana	75 sarana	75 sarana	75 sarana	100.00	75 sarana	75 sarana	100%
		Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	75 Sarana Air Minum	75 Sarana Air Minum	75 Sarana Air Minum	75 Sarana Air Minum	100.00	75 Sarana Air Minum	75 Sarana Air Minum	100%
		Jumlah makanan siap saji yang di awasi	100 Makanan Siap Saji	100 Makanan Siap Saji	100 Makanan Siap Saji	100 Makanan Siap Saji	100.00	100 Makanan Siap Saji	100 Makanan Siap Saji	100%
		Jumlah Sarana Distribusi Pangan	100 Sarana	100 Sarana	100 Sarana	100 Sarana	100.00	100 Sarana	100 Sarana	100%



RENCANA KERJA 2026

		yang diawasi								
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Jumlah Stiker yang diterbitkan pada Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 STiker	10 STiker	10 STiker	10 STiker	100	10 STiker	10 STiker	100%
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Pengendalian dan Pengawasan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memenuhi standar	30 Pemeriks aan	60 IRTP	65 IRTP	65 IRTP	100.00	30 Pemeriks aan	30 Pemeriks aan	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Sarana	50 Sarana	60 Sarana	60 Sarana	100	80 Sarana	80 Sarana	100%
1.02.04.2.06.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Data	15 Data	20 Data	20 Data	100.00	30 Data	30 Data	100%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	80	74	0.76	0.76	100.00	80.00	8000%	100%
		Persentase puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok asuham mandiri kesehatan tradisional	100.00	100	100	100	100	100.00	10000%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan GERMAS	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	100	2 kebijakan	2 kebijakan	100%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	15 Dokumen	15 Dokumen	100%



RENCANA KERJA 2026

1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS	103 Nagari	103 Nagari	103 Nagari	103 Nagari	100	103 Nagari	103 Nagari	100%
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
		Jumlah keluarga PHBS dengan penerapan yankestrad								100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan	789 Posyandu	394 Posyandu	473 Posyandu	473 Posyandu	100.00	789 Posyandu	789 Posyandu	100%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	789 Dokumen	789 Dokumen	789 Dokumen	789 Dokumen	100%	789 Dokumen	789 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2021 tentang SOTK, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas dalam Pasal 2 menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Daerah.

Pada dasarnya, untuk melaksanakan tugas pokok Dinas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 Bidang Teknis Program Kesehatan yaitu Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 - e. Perumusan kebijakan umum bidang kesehatan;
 - f. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
 - g. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan;
 - h. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - i. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - j. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan;



- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada Dinas diluar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, informasi dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
- h. Pengelolaan urusan ASN;
- i. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
- j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/atau
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibagi atas 3 Subbagian :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat
- 2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
- 3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

- 1) Subbagian Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;



- b) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas;
- d) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi program, informasi dan hubungan masyarakat kesehatan dan pelaporan;
- e) Pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan/atau
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset

Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dan asset Dinas.
- b) Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dan asset Dinas;
- c) Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d) Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset Dinas;
- e) Pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Luar Negeri); dan/ atau
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Hukum, kepegawaian dan Umum

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan



dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Hukum Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan (Perda, Perbup);
- d) Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e) Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f) Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- g) Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) pada Dinas;
- h) Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
- i) Penyiapan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- j) Pelaksanaan administrasi, kearsipan dan perpustakaan; dan/ atau
- k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.



RENCANA KERJA 2026

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. Penyelenggaraan koordinasi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat dibagi atas 3 Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
-
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- d) Pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS);
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait;
- f) Pembinaan kelompok lanjut usia;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- h) Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;



- b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d) Pelaksanaan koordinasi promosi dan pemberdayaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g) Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- b) Perumusan kebijakan teknis Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi 5 pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- f) Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau



- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Penyelenggaraan koordinasi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan/atau
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian dibagi atas 3 Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular



1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi
- b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB);
- d) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi;
- f) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB); dan/atau
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan



kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan/atau
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;

- d) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- f) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA; dan/atau
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Penyelenggaraan koordinasi bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
- f. Pelayanan kesehatan tradisional; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Pencegahan dan Pengendalian dibagi atas 3 Kelompok Jabatan Fungsional:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
- d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi registrasi puskesmas baru;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
- h) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer; dan/atau Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta



pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - f) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan/atau
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- b) Perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha kecil obat

tradisional (UKOT);

- e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- g) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan/atau
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan PBF, PAK dan PKRT;
- f. Penyelenggaraan pengawasan industri rumah tangga (PIRT); dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan dibagi atas 3 Kelompok Jabatan Fungsional:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Kefarmasian. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sub-substansi kefarmasian;
- b) Perumusan kebijakan teknis sub-substansi kefarmasian;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sub-substansi kefarmasian;
- d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin rumah obat, apotik;
- e) Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub-substansi kefarmasian;
- h) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sub-substansi kefarmasian; dan/atau
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
- j) Diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan PKRT. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sub-substansi alat kesehatan dan pkrt;
- b) Perumusan kebijakan teknis sub-substansi alat kesehatan dan pkrt;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sub-



substansi alat kesehatan dan pkrt;

- d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin penyalur alat kesehatan;
 - e) Pelaksanaan pengelolaan data alat kesehatan dan pkrt;
 - f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub-substansi alat kesehatan dan pkrt;
 - h) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sub-substansi alat kesehatan dan pkrt; dan/atau
 - i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sub-substansi sumber daya kesehatan;
- b) Perumusan kebijakan teknis sub-substansi sumber daya kesehatan;
- c) Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sub-substansi sumber daya kesehatan;
- d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi rumah sakit pendidikan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan data sumber daya kesehatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub-substansi sumber daya kesehatan;
- h) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sub-substansi sumber daya kesehatan; dan/atau



- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

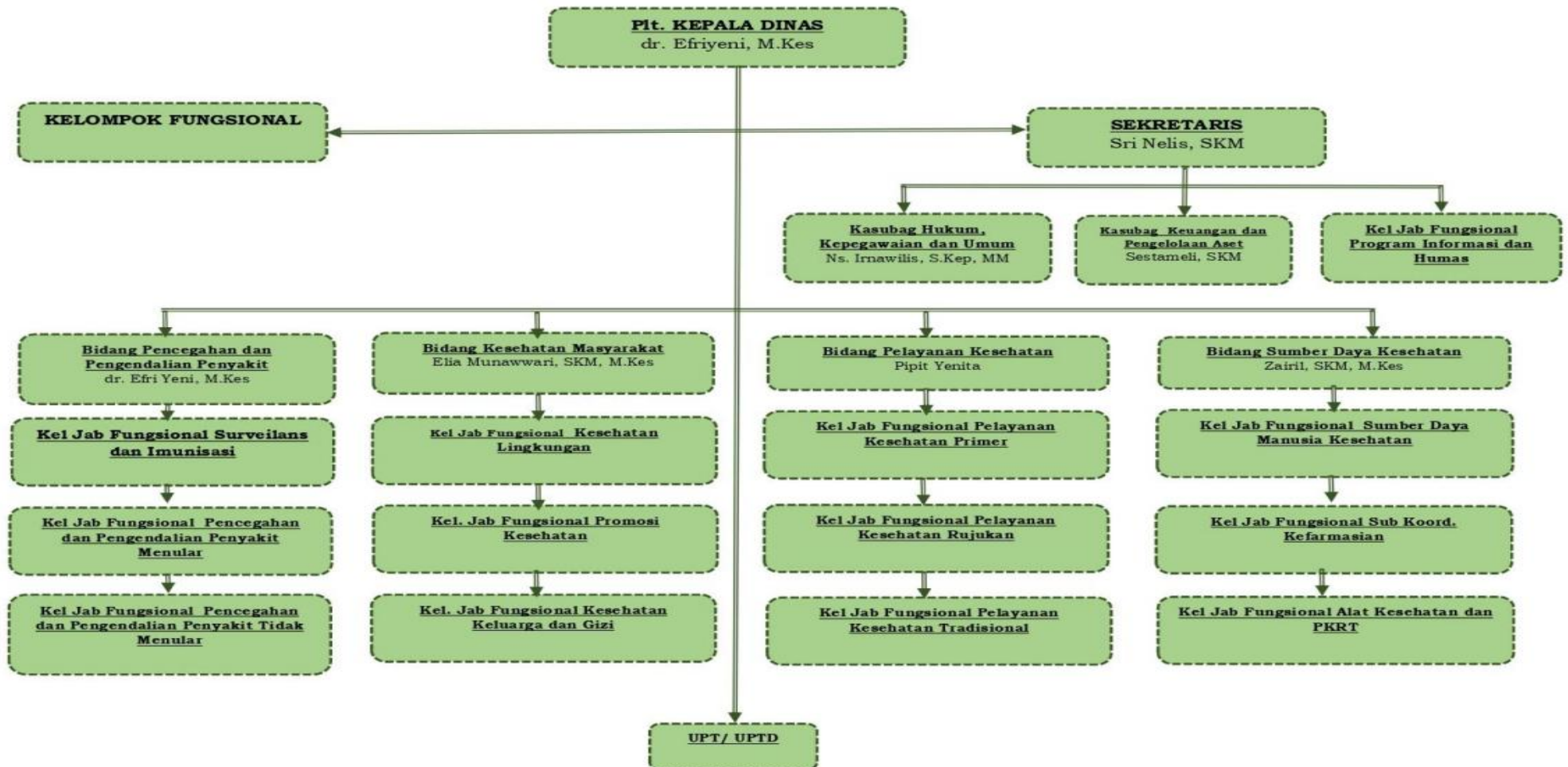


RENCANA KERJA 2026

Gambar 2.1

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN





RENCANA KERJA 2026

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Dinas Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan :
 - 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
 - 2. Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - 3. Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
 - 2. Indeks Keluarga Sehat
 - 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Paripurna
 - 4. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) terakreditasi Paripurna
 - 5. Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan
 - 6. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
 - 7. Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga Medis terhadap populasi
 - 8. Cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



Tabel 2.2 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Indikator Kinerja Tahun 2024	Indikator Kinerja Tahun 2025	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan dari Inspektorat	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A	Sangat Baik
2.	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Visit Rate	100 %	2.6	2.6	2.6	100 %	1,23	1.78	1.78	Sangat Baik
3.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Bersalin sesuai standar di fasyankes	Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit	100 %	85%	85%	85%	100 %	92%	85%	85%	Sangat Baik
4.	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Baru Lahir sesuai standar	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	71%	71%	71%	100 %	71%	71%	71%	Sangat Baik
5.	Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Angka Kematian Ibu	100 %	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	5 Orang	5 Orang	5 Orang	Sangat Baik
6.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Indeks Keluarga Sehat	100 %	0,12	0,12	0,12	100 %	0,17	0,12	0,12	Sangat Baik
7.	Persentase	Universal	100	100%	100%	100%	100	85.14 %	100%	100%	Sangat



RENCANA KERJA 2026

	pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrinning kesehatan	health coverage (UHC)	%				%				Baik
8.	Persentase pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	Cakupan Desa Siaga Aktif	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	Sangat Baik
9.	Persentase Penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	Sangat Baik
10 .	Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	Sangat Baik
11 .	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (psikotik) di wilayah kerja kab yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif	Pelayanan Kesehatan orang dengan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	Sangat Baik
12 .	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	Sangat Baik
13	Persentase Orang	Pelayanan Kesehatan	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	Sangat Baik



RENCANA KERJA 2026

	dengan Risiko HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes	Orang dengan Risiko HIV									
14	Prevalensi Stunting	Prevalensi balita wasting	19.4 %	7%	7%	7%	16%	4.55%	4%	4%	Sangat Baik
15	Jumlah Kecamatan Sehat	Jumlah Kecamatan Sehat	14 Kec	16 Kec	16 Kec	17 Kec	11 Kec	11 Kec	16 Kec	17 Kec	Sangat Baik
16	Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0.11	0.12	0.13	0.14	0.11	0.15	0.17	0.18	Sangat Baik

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas Kesehatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tabel 2.3.
Rencana dan Realisasi Capaian Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan	1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari Inspektorat	Nilai	85	80.05	94.18	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Visit Rate		100	80.44	80.44	Cukup Berhasil
		3	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan	%	100	83.99	83.99	Cukup Berhasil



RENCANA KERJA 2026

			Sesuai Standar					
		4	Angka Kematian Ibu	Oa	100	87.54	87.54	Cukup Berhasil
		5	Indeks Keluarga sehat	%	100	100.00	100.00	Berhasil
		6	Universal Health Coverage (UHC)	%	100	87.66	87.66	Cukup Berhasil
3	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	7	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	94.80	94.80	Cukup Berhasil

a. Capaian kinerja yang sudah mencapai target ditunjukkan pada indikator:

- 1) Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan realisasi 100,00% dari target 100% (kategori Berhasil).

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator:

- 1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari Inspektorat dengan realisasi 80,05 dari target 85 (94,18% dari target).
- 2) Visit Rate dengan realisasi 80,44% dari target 100%.
- 3) Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar dengan realisasi 83,99% dari target 100%.
- 4) Angka Kematian Ibu dengan realisasi 87,54% dari target 100%.
- 5) Universal Health Coverage (UHC) dengan realisasi 87,66% dari target 100%.
- 6) Cakupan Desa Siaga Aktif dengan realisasi 94,80% dari target 100%



I. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan	1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari Inspektorat	Nilai	85	80.05	94.18	Sangat Tinggi

Dari Tabel di atas dapat dilihat, Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 mendapatkan nilai 80.05 sedangkan target yang ditetapkan adalah 85 kategori “Berhasil”.

Dalam upaya pencapaian Nilai SAKIP tahun 2025. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam penilaian SAKIP :

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 pada tanggal 17 Mei 2024. Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

a) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 25,50 dari bobot nilai 30,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Perencanaan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja

Kualitas perencanaan kinerja sudah disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 8,10 dari bobot nilai 9,00

c) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran kinerja belum dilaksanakan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 10,50 dari bobot nilai 15,00.

d) Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 11,55 dari bobot nilai 15,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Pelaporan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan.

e) Evaluasi Kinerja



RENCANA KERJA 2026

Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar 20.50 dari bobot nilai 25.00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Evaluasi kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan.

II. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Visit Rate		100	80.44	80.44	Cukup Berhasil
		2 Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	100	83.99	83.99	Cukup Berhasil
		3 Angka Kematian Ibu	Oa	100	87.54	87.54	Cukup Berhasil
		4 Indeks Keluarga sehat	%	100	100.00	100.00	Berhasil
		5 Universal Health Coverage (UHC)	%	100	87.66	87.66	Cukup Berhasil

1. Visite Rate

Visite Rate adalah kunjungan rata- rata penduduk ke puskesmas dan wilayahnya dalam kurun waktu 1 tahun. Cara menghitung visite rate dengan rumus jumlah kunjungan sehat maupun sakit, dalam dan luar gedung dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk dalam 1 tahun. Pencapaian Visite Rate tahun 2025 adalah 1,23 dari target 2,6.



a. Perbandingan Target dengan Realisasi IKU “Visite Rate” Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Visite Rate Tahun 2025 :

Tabel 3.10
Perbandingan Target dengan Realisasi Visite Rate Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja	Interpretasi
Visite Rate	Angka	2.6	1.23	47.31	Tidak Berhasil

Dari Tabel di atas dapat di lihat, capaian Visite Rate Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 47.31% Artinya hanya 47.31% penduduk wilayah kerja puskesmas telah memanfaatkan puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Visite Rate Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Visite Rate pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Visite Rate Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Visite Rate	Angka	2.6	1.38	53.08	2.6	1.23	47.31	Tidak Berhasil

Pada tabel didapatkan, bahwa Angka Visite Rate di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 selalu terjadi peningkatan walaupun tidak mencapai target, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Capaian Visite Rate Tahun 2024-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Visite Rate pada tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2026 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Visite Rate	Tahun	2.6	2.6	2.6	2.6	1.36	-	1.38	1.23

Realisasi Indikator Kinerja “Visite Rate” pada tahun 2024 capaian 1.36 mengalami peningkatan di tahun 2025 dan penurunan di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2024

Untuk Indikator Visite Rate tidak dapat dilakukan perbandingan secara nasional maupun provinsi karena bukan merupakan indikator kinerja nasional.

Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan angka Visite Rate di Kabupaten Padang Pariaman adalah:

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, masih ada nakes yang memegang banyak program sehingga tidak efektif
- b) Masih banyaknya peralatan medis yang belum di kalibrasi karena keterbatasan anggaran
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pelayanan kesehatan

Namun demikian, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Visite Rate tahun 2025, Dinas Kesehatan melakukan pengadaan, peningkatan sarana prasarana serta perbaikan sarana prasarana Puskesmas yaitu, diantaranya :

e. Analisis Faktor Pendukung Capaian IKU

Capaian Visite Rate Kabupaten Padang Pariaman belum mencapai target yang ditetapkan, namun demikian ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian visite rate :

1) Pembangunan Pustu dan Rehabilitasi Pustu

Pada tahun 2025 ada pembangunan pustu yang dilakukan diantaranya, pembangunan Pustu Toboh Gadang Selatan Sintoga, Pembangunan Pustu Padang Toboh Ulakan, Pembangunan Pustu Guguak, Pembangunan Pustu Limpato, Rehabilitasi Pustu

Batu Kalang, Rehabilitasi Pustu Kudu Gantiang, Rehabilitasi Pustu Gunung Padang Alai, Rehabilitasi Pustu Pilubang.

Gambar : Pembangunan Pustu Toboh Gadang Selatan



Gambar : Pembangunan Pustu Ulakan Tapakis



Gambar : Pembangunan Pustu Guguak



Gambar : Pembangunan Limpato



Gambar : Rehabilitasi Pustu Batu Kalang

Water Treatment Plant (WTP) adalah mengubah air baku (seperti air sungai atau danau) yang terkontaminasi menjadi air bersih yang aman digunakan melalui serangkaian tahapan: penyaringan, penggumpalan, pengendapan, penyaringan akhir, dan disinfeksi.





RENCANA KERJA 2026





e. Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Visite Rate Tahun 2025

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah sebanyak 1 program adapun pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Kegiatan sebesar Rp 8.990.100.664 ,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 8.716.951.816,- atau sekitar 96.96% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 3.04 % yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan/ sub kegiatan :



- a. Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

f. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis sumber daya untuk kinerja Usia harapan Hidup :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Visite Rate	47.31%	96.96%	-49.65%%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan belum melakukan efisiensi sumber daya. Karena persentase rata-rata capaian kinerja kurang dari 100% dan penyerapan anggaran kurang dari 100%, tetapi melebihi persentase capaian kinerja.

g. Langkah Kedepan

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan - permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan dalam mencapai target Visite rate adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan
- 2) Meningkatkan aksesibilitas puskesmas bagi masyarakat
- 3) Meningkatkan promosi kesehatan
- 4) Mengajukan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan pustu

2. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Puskesmas mempunyai 9 Jenis Tenaga Kesehatan adalah Puskesmas



yang minimal telah memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), apoteker, kesehatan masyarakat dan tenaga gizi.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi IKU “Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar” Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar Tahun 2025 :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja	Interpretasi
Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	71%	92%	129.58 %	Sangat Berhasil

Dari Tabel di atas dapat di lihat, capaian persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2025 sebesar 129.58% dengan target 71%. Dengan interpretasi “**Sangat Berhasil**” .

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	59%	16%	27.12%	71%	92%	129.58%	Sangat Berhasil



Pada tabel didapatkan, bahwa persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 terjadi peningkatan.

c. Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2024
dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	35	47	59	71	-	80	16	92

Realisasi Indikator Kinerja persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 tidak merupakan indikator kinerja. Pada tahun 2023 mengalami penurunan karena hal ini dikarenakan banyaknya tenaga swakelola yang lulus PPPK diluar Kabupaten Padang Pariaman, dan pada bulan Juli dan Agustus adanya Purna dari Nusantara Sehat. Pada tahun 2024, mengalami peningkatan signifikan karena adanya penerimaan PPPK dan Nusantara Sehat.

e. Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2024

Untuk Indikator persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar tidak dapat di lakukan perbandingan secara nasional maupun provinsi karena bukan merupakan indikator kinerja nasional.

f. Analisis Faktor Pendukung Capaian IKU

Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 92 %, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 25 Puskesmas di wilayah kerjanya, dari 25 Puskesmas tersebut terdapat 23 Puskesmas yang sudah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan 2 Puskesmas yang belum sesuai standar pada tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:



Tabel 3.16
Kondisi Tenaga Kesehatan Di Puskesmas

No.	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
1	Pasar Usang	2	1	9	29	2	1	1	2	4
2	Ketaping	1	2	10	18	2	3	1	1	2
3	Lubuk Alung	6	1	22	36	2	3	2	1	1
4	Sikabu	2	1	3	12	2	1	2	2	2
5	Sintuk	2	1	11	27	3	1	2	2	2
6	Ulakan	2	2	6	30	1	1	2	1	2
7	Pauh Kambar	3	1	12	47	3	2	2	4	2
8	Sicincin	2	2	9	19	3	1	2	1	1
9	Kampung Guci	1	1	3	18	1	1	2	2	1
10	Enam Lingkung	3	1	4	16	4	1	2	1	2
11	Kayu Tanam	2	1	10	15	3	1	2	1	1
12	Sungai Sariak	2	1	10	39	2	1	2	2	2
13	Ampalu	2	2	7	23	2	2	2	1	1
14	Patamuan	1	1	8	24	2	1	2	1	2
15	Padang Sago	1	1	9	22	2	1	1	1	1
16	Kampung Dalam	3	2	10	19	3	2	2	2	2
17	Sikucur	1	1	7	11	2	1	1	1	2
18	Limau Purut	1	1	10	17	1	1	1	1	2
19	Padang Alai	1	1	8	14	1	1	1	1	1
20	Sungai Geringging	2	1	10	20	3	1	3	1	2
21	Koto Bangko	2	1	8	10	3	1	1	1	2
22	Batu Basa	1	1	7	21	2	2	2	3	1
23	Anduring	1	0	5	16	1	2	1	2	1



RENCANA KERJA 2026

No.	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
24	Sungai Limau	4	1	13	35	2	0	1	1	1
25	Gasam Gadang	2	0	15	34	1	0	3	1	2

Yang mendorong tercapainya kinerja diatas yaitu :

- Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar formasi penerimaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman pada rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2024. BKPSDM telah melibatkan Dinas Kesehatan dalam penentuan formasi bagi CPNS dan PPPK tahun 2024 data perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan oleh Dinas Kesehatan telah digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan tingkat kabupaten.
- Mengusulkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan individual di Puskesmas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/ MENKES/ 1324/ 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dari Penugasan Khusus Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Individual Di Puskesmas Periode IV Tahun 2024 ada penambahan 11 tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman. Dan sebelumnya pada periode V ada penambahan 7 tenaga kesehatan dan tenaga medis pada penugasan khusus di Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan faktor yang menghambat yaitu :

- Kurangnya ketersediaan tempat tinggal bagi penugasan khusus, namun Dinas Kesehatan sudah berupaya dalam menyediakan rumah dinas namun terbatas
- Pembinaan, pengawasan dan dukungan sumberdaya bagi pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan masih terbatas.
- Kemampuan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan masih terbatas.
- Kurang sinkronisasi antara pengadaan, kebutuhan dan distribusi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- e) Ketersediaan data SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan validitas dan juga keterkinian dari data eksisting. Perlu kesadaran tinggi dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan update data SDM kesehatan secara berkala.
- f) Ketersediaan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan belum sesuai standar minimal kebutuhan yang ditetapkan Kemenkes RI.
- g) Terbatasnya jumlah SDM kesehatan yang ada membuat tenaga fungsional di sarana pelayanan kesehatan melaksanakan tugas program kesehatan lebih dari satu, sehingga capaian kegiatan program kurang maksimal.
- h) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak menyebabkan penghitungan analisa jabatan dan analisa beban kerja menjadi berkurang banyak untuk kebutuhan SDM kesehatannya, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Berikut ini dokumentasi penerimaan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada penugasan khusus di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 :



Gambar :
Penerimaan
Tenaga Medis
dan Tenaga
Kesehatan
Penugasan

Khusus



g. Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah sebanyak 1 program adapun pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Kegiatan sebesar Rp 2.776495.600 ,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.073.905.900,- atau sekitar 74.70% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 25.30% yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan/ sub kegiatan :

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota
- b. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/ Kota
- c. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis sumber daya untuk kinerja :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	92%	74.70	17.30%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan efisiensi sumber daya. Karena persentase rata-rata capaian kinerja melebihi dari 100% dan penyerapan anggaran kurang dari 100%.

i. Langkah Kedepan

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman kedepan. Meskipun indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan - permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan

kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan dalam mencapai target persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan pembangunan baru rumah dinas tenaga kesehatan
- 2) Melakukan secara rutin pembinaan, pengawasan dan dukungan sumberdaya bagi pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan masih terbatas.
- 3) Melakukan update data terkait kebutuhan dan distribusi SDM
- 4) Meningkatkan validasi dan juga keterkinian dari data eksisting secara berkala.
- 5) Melakukan perhitungan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

3. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Maternal berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Indikator AKI dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi IKU “Angka Kematian Ibu” Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja angka kematian ibu Tahun 2024:

Tabel 3.17
Perbandingan Target dengan Realisasi Angka Kematian Ibu
Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja	Interpretasi
Angka Kematian Ibu	Orang	5	5	100 %	Sangat Berhasil

Dari Tabel di atas dapat di lihat, capaian angka kematian ibu tahun 2025 sebesar 5 orang dengan target 5 orang. Dengan interpretasi **“Sangat Berhasil”** .



b. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi angka kematian ibu pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu
Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Angka Kematian Ibu	Orang	6	0	100%	5	5	100%	Sangat Berhasil

Pada tabel didapatkan, bahwa persentase angka kematian ibu di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 mengalami peningkatan angka kematian ibu di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi angka kematian ibu pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2024
dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	Orang	8	7	6	5	10	3	0	5

Realisasi Indikator Kinerja angka kematian ibu pada tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan angka kematian ibu. Namun pada tahun 2024, mengalami peningkatan signifikan tetapi masih dalam batas target yang ditetapkan.

e. Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2024

Untuk Indikator angka kematian ibu tidak dapat dilakukan perbandingan secara nasional maupun provinsi karena bukan merupakan indikator kinerja nasional.

e. Analisis Faktor Pendukung Capaian IKU

Jumlah kematian terbanyak pada tahun 2021, yaitu sebanyak 10 kasus kemudian kasus kematian menurun tahun 2022 menjadi 3 kasus dan 0 kasus di tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024 sebanyak 5 kasus kematian Ibu.

Capaian kinerja kasus kematian ibu pada tahun 2024 sudah sesuai target karena target pada tahun 2024 sebanyak 5 kematian ibu. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah jika realisasinya sama atau di bawah target.

Beberapa faktor penyebab kematian ibu tahun 2024 antara lain: pendarahan (2 kasus), Hipertensi (1 kasus), penyebab lain-lain (2 kasus).

Faktor pendorong tercapainya target ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu, antara lain:

- a) Adanya monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman setiap triwulan.
- b) Seluruh Puskesmas sudah tersedia USG Seluruh dokter di Puskesmas sudah terlatih USG
- c) Sebagian Puskesmas sudah memiliki tenaga pemberi layanan ANC sesuai standar
- d) Monitoring dan Evaluasi dari Kabupaten Sinkronisasi data setiap bulannya.
- e) Sarana dan Prasarana di Puskesmas sudah mulai dilengkapi seperti USG dan alat kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta penunjang lainnya.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam penurunan angka kematian ibu sebagai berikut :



Gambar : Pemeriksaan USG di Puskesmas



Rapat pembahasan permasalahan Stunting

g. Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2025

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah sebanyak 1 program adapun pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Kegiatan sebesar Rp 153.250.200,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 48.001.639,- atau sekitar 31.32% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 68.68% yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan/ sub kegiatan :

- a. Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil
- b. Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis sumber daya untuk kinerja :



Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Angka Kematian Ibu	100%	31.32%	68.68%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan efisiensi sumber daya. Karena persentase rata-rata capaian kinerja sudah 100% dan penyerapan anggaran kurang dari 100%.

i. Langkah Kedepan

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman kedepan. Meskipun indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan - permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan dalam menurunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil. Diantaranya imunisasi tetanus dan pemberian tablet tambah darah
- 2) Peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk mengurangi risiko komplikasi dan kematian ibu karena masih ada di beberapa daerah yang melakukan persalinan dengan dukun beranak.
- 3) Melakukan peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga terhadap pelayanan kehamilan yang berkualitas.
- 4) Melakukan pemerataan bidan desa karena belum semua nagari ada bidan desa yang menetap
- 5) Menciptakan inovasi dalam peningkatan kunjungan rumah

4. Indeks Keluarga Sehat

IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$; 2) Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500 - 0,800$; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$.

Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga, Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target



keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a) Mengintegrasikan seluruh program di Puskesmas
- b) Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
- c) Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota
- d) Mendukung pelaksanaan JKN
- e) Mendukung tercapainya program indonesia sehat

Adapun indikator keluarga sehat saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut:

- a) Keluarga Mengikuti Program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- b) Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Swasta).
- c) Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan) dan bayi tersebut mendapat imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, Campak.
- d) Bayi Mendapat ASI Eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0 - 6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI Eksklusif).
- e) Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badanya di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ Buku KIA.
- f) Penderita Tuberculosis Paru Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis (TB) Paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk Dokter/ Petugas Kesehatan.
- g) Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.



RENCANA KERJA 2026

- h) Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
 - i) Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
 - j) Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.
 - k) Keluarga Mempunyai Akses Sarana Air Bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
 - l) Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.
- a. **Perbandingan Target dengan Realisasi IKU “Indeks Keluarga Sehat” Tahun 2025**

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja indeks keluarga sehat Tahun 2025 :

Tabel 3.20
Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks Keluarga Sehat
Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja	Interpretasi
Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.12	0.17	141.67 %	Sangat Berhasil

Dari Tabel di atas dapat di lihat, capaian indeks keluarga sehat tahun 2025 sebesar 0.17 orang dengan target 0.12. Dengan interpretasi “**Sangat Berhasil**” .

- b. **Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Keluarga Sehat Tahun 2023 dan Tahun 2024**



Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indeks keluarga sehat pada tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Keluarga Sehat
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.11	0.15	136.36%	0.12	0.17	141.67%	Sangat Berhasil

Pada tabel didapatkan, bahwa persentase indeks keluarga sehat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 mengalami peningkatan di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2022-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indeks keluarga sehat pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2022-2025
dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.133	0.15	0.17

Realisasi Indikator Kinerja indeks keluarga sehat pada tahun 2022 sampai tahun 2025 terus mengalami peningkatan, walaupun demikian indeks keluarga sehat di Kabupaten Padang Pariaman masih jauh dari indikator keluarga sehat.

d. Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2025

Untuk Indikator indeks keluarga sehat tidak dapat dilakukan perbandingan secara nasional maupun provinsi karena bukan merupakan indikator kinerja nasional.

e. Analisis Faktor Pendukung Capaian IKU

Indeks Keluarga Sehat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan tetapi masih masuk kategori Keluarga Tidak Sehat (< 0.5).

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan IKS, Antara lain :



RENCANA KERJA 2026

- a) Meningkatkan Manajemen Pendekatan keluarga terintegrasi dengan manajemen Puskesmas yang dilakukan mulai dari proses perencanaan (P1), pergerakan pelaksanaan (P2) sampai proses pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3). Langkah pertama adalah Persiapan yang didalamnya adalah sosialisasi, pelatihan, dan pengorganisasian.
- b) Meningkatnya jumlah kunjungan Pembina Keluarga melakukan kunjungan rumah (Intervensi PIS-PK) keluarga menggunakan formulir Prokesga (tercetak/manual) dan elektronik (aplikasi keluarga sehat) serta promosi kesehatan.
- c) Telah dilakukan workshop bagi pengelola program PIS PK di Puskesmas untuk menghitung Indeks Keluarga Sehat (IKS). Kemudian Pembina Keluarga melakukan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah dalam upaya intervensi masalah kesehatan dari hasil analisis sesuai kemampuan dan kewenangannya dan juga melaksanakan pengorganisasian masyarakat dan pembinaan UKBM.
- d) Peningkatan Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, Sebesar 85.14 %.
- e) Deklarasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mendukung untuk peningkatan IKS pada indikator PIS PK
- f) Terdapat program inovasi yang mendukung untuk peningkatan IKS pada indikator PIS PK yaitu PAPA SEHAT.

Namun ada beberapa faktor penghambat dalam peningkatan IKS diantaranya :

- a) Perbedaan Data KK yang berbeda antara BPS, Disdukcapil dan real di lapangan
- b) Mobilisasi keluarga yang tinggi, saat melaksanakan kunjungan rumah dan intervensi rumah yang dikunjungi tidak ada di rumah, karena pada umumnya masyarakat pada pagi atau siang sedang bekerja di sawah dan kebun atau di pasar.
- c) Tingginya jumlah anggota keluarga yang merokok sehingga pada indikator keluarga sehat nomor 9 masih rendah capaiannya.
- d) Integrasi program UKM dan PISPK belum berjalan maksimal.

Berikut ini dokumentasi kegiatan IKS:



Gambar : Monitoring PISPK

5. Universal Health Coverage

Universal Health Coverage (UHC) adalah konsep yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi IKU “*Universal Health Coverage* (UHC)” Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja UHC Tahun 2025 :

Tabel 3.23
Perbandingan Target dengan Realisasi UHC Tahun 2025



RENCANA KERJA 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja	Interpretasi
<i>Universal Health Coverage</i>	%	100	85.14	85.14 %	Berhasil

Dari Tabel di atas dapat dilihat, capaian UHC tahun 2025 sebesar 85.14% orang dengan target 100%. Dengan interpretasi “**Berhasil**” .

c. Perbandingan Target dan Realisasi UHC Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHC pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:



Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi UHC
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
<i>Universal Health Coverage</i>	%	90	83.21	92.46%	100	84.14	85.14%	Berhasil

Pada tabel didapatkan, bahwa capaian UHC di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 mengalami peningkatan di tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Capaian UHC Tahun 2022-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHC pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025:

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2024
dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<i>Universal Health Coverage</i>	%	80	85	90	100	73.6	81.46	83.21	85.14

Realisasi Indikator Kinerja UHC pada tahun 2021 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan, walaupun demikian UHC di Kabupaten Padang Pariaman belum mencapai target nasional 95% rakyat Indonesia sudah memiliki .

e. Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2024

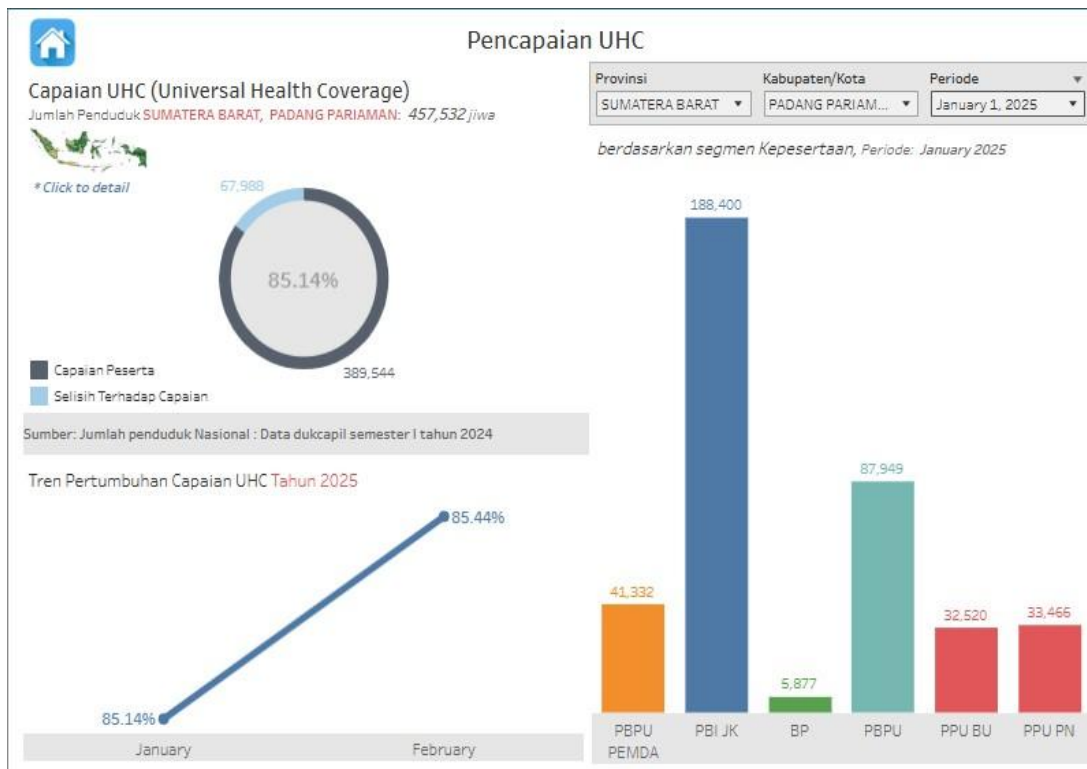
Berikutini perbandingan standar UHC nasional dengan capaian Kabupaten Padang Pariaman:

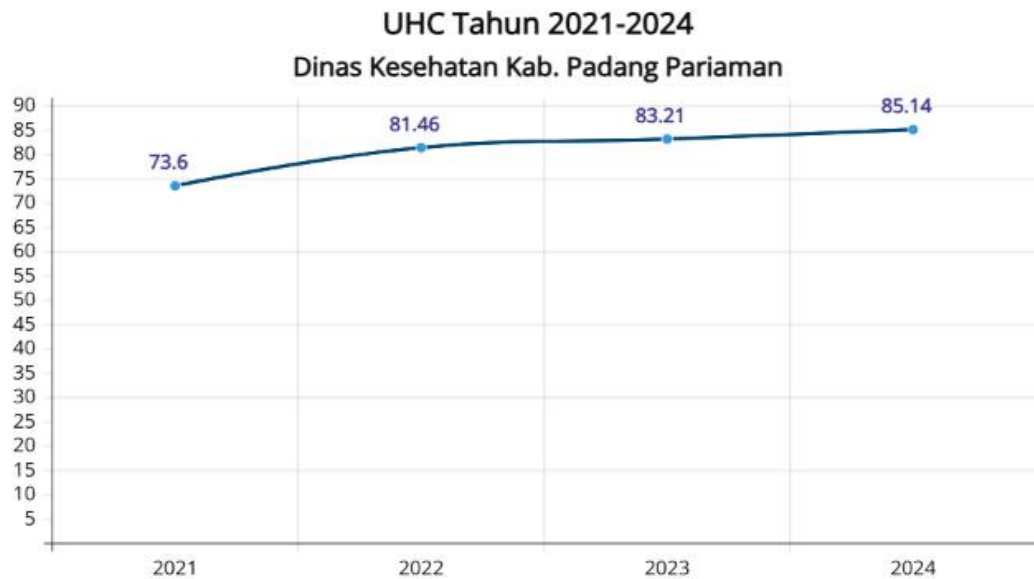
Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi IKU dengan Standar Nasional
atau Provinsi Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Standar Nasional/ Provinsi Tahun 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian	Interpretasi
Universal Health Coverage	%	95%	85.14	89.62 %	Berhasil

f. Analisis Faktor Pendukung Capaian IKU

Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2024 belum mencapai target yaitu realisasinya sebesar 85.14% dengan target 100%. Dalam pelaksanaannya banyak peserta BPJS yang masih dibebankan ke Pemda dan Provinsi sehingga dana dikhawatirkan kurang. Karena Persentase pembagian anggaran tersebut 80% Pemda dan 20% Provinsi.





Pada gambar diatas dapat dilihat, bahwa capaian UHC terus meningkat tiap tahunnya tetapi masih jauh dari target yang di tetapkan. Berikut ini adalah cakupan jaminan kesehatan penduduk berdasarkan kepesertaan tahun 2024:

Tabel 3.14
Cakupan Kepesertaan JKN Kab Padang Pariaman Tahun 2025

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	188,400	48.36
2	PBI APBD	41,332	10.61
SUB JUMLAH PBI		229,732	58.97
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	65,986	16.94
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	87,949	22.58
3	Bukan Pekerja (BP)	5,877	1.51
SUB JUMLAH NON PBI		159,812	41.03
JUMLAH (KAB/KOTA)		389,544	85.14

Salah satu hambatan dalam pencapaian indikator program Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan adalah tidak updatenya data penduduk miskin/DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) *by name by address* yang sesuai

dengan SK Kemensos. DTKS tersebut diterima oleh Pemerintah selalu terlambat setiap bulannya. Untuk meminimalkan kendala yang dimiliki, Dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selalu melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pendataan penduduk, sehingga setiap penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian juga adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah.

Selain itu, salah satu upaya yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja program ini adalah dengan sosialisasi melalui penyebaran leaflet, media sosial, infografis, website Dinas Kesehatan, televisi dan siaran radio kepada masyarakat tentang jaminan kesehatan yang harus dimiliki oleh masyarakat.

Kemudian, Dinas Kesehatan juga berharap adanya Komitmen Pemerintah Daerah untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) yaitu minimal 95% penduduk menjadi peserta JKN juga mendukung upaya mencapai target. Masyarakat yang didaftarkan sebagai peserta PBI daerah langsung bisa memanfaatkan layanan kesehatan tanpa adanya menunggu kuota yang kosong, sehingga Seluruh upaya tersebut mampu meningkatkan kepesertaan JKN masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar : Pertemuan Monev BPJS

f. Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU UHC Tahun 2025

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan



pencapaian adalah sebanyak 1 program adapun pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Kegiatan sebesar Rp 16.285.881.400,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 15.271.257.202,- atau sekitar 93.77% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 6.23% yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan/ sub kegiatan :

1. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis sumber daya untuk kinerja :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Universal Health Coverage	85.14%	93.77%	-8.63%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan belum melakukan efisiensi sumber daya. Karena persentase rata-rata capaian kinerja belum 100% dan penyerapan anggaran melebihi capaian kinerja.

h. Langkah Kedepan

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman kedepan. Meskipun indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan - permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan dalam meningkatkan UHC adalah sebagai berikut :



- 1) Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil terkait update data miskin
- 2) Pengusulan penambahan anggaran dari PBI provinsi

III. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	Cakupan Desa Siaga aktif	Persentase	100	100	100	Sangat Berhasil

Desa/ Nagari siaga aktif adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya

a. Perbandingan Target dengan Realisasi IKU “Desa Siaga Aktif” Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja desa siaga aktif Tahun 2025 :

Tabel 3.27
Perbandingan Target dengan Realisasi Desa Siaga Aktif Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja	Interpretasi
Desa Siaga Aktif	%	100	100	100 %	Sangat Berhasil

Dari Tabel di atas dapat dilihat, capaian Desa Siaga Aktif tahun 2025 sebesar 100% orang dengan target 100%. Dengan interpretasi “**Sangat Berhasil**” .

b. Perbandingan Target dan Realisasi Desa Siaga Aktif Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Desa Siaga Aktif pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:



Tabel 3.28
Perbandingan Target dan Realisasi Desa Siaga Aktif
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Desa Siaga Aktif	%	100	100	100%	100	100	100%	Sangat Berhasil

Pada tabel didapatkan, bahwa capaian desa siaga aktif di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Capaian UHC Tahun 2022-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi desa siaga aktif pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 :

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2022-2025
dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	58	100	100	100

Realisasi Indikator Kinerja desa siaga aktif pada tahun 2022 sampai tahun 2025 terus mengalami peningkatan, sudah mencapai target yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2025

Untuk Indikator desa siaga aktif tidak dapat di lakukan perbandingan secara nasional maupun provinsi karena bukan merupakan indikator kinerja nasional.

e. Analisis Faktor Pendukung Capaian IKU

Berikut adalah cakupan desa/ nagari siaga aktif pada tahun 2025 :



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian Desa Siaga aktif sudah mencapai 100 %. Dari 103 Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, 103 Nagari sudah sudah mencapai desa/nagari siaga aktif. Kegiatan pendukung cakupan desa/ nagari siaga aktif adalah:

- a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan output kegiatan tersedianya media promosi kesehatan bagi masyarakat melalui pembuatan dan penyebaran leaflet ke puskesmas.
 - 2) Sosialisasi dan pembinaan terhadap pembentukan korong PHBS/ UKBM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) berdasarkan 10 Indikator PHBS ini yaitu :
 - a. Melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga nakes.
 - b. Bayi mendapatkan ASI eksklusif
 - c. Melakukan penimbangan di posyandu selama 6 bulan.
 - d. Melakukan aktifitas fisik setiap hari.
 - e. Makan sayur dan buah-buahan setiap hari.
 - f. Tidak merokok dalam ruangan
 - g. Melakukan cuci tangan dibawah air mengalir dan pakai sabun
 - h. Rumah bebas jentik dan melakukan pemberantasan (3M Plus)
 - i. Ketersediaan air bersih di rumah tangga
 - j. Ketersediaan jamban sehat di rumah tangga

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan siaga aktif:



Gambar : Pembinaan Kader

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 :



Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	
1.	Persentase Orang terduga TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai dengan Standar	100	100	100	100	78.45	79.01	100	100	
2.	Persentase Orang usia 15-59 Tahun Mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	87.66	98.71	100	100	
3.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	94.80	100	100	100	
4.	Persentase Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100	100	100	100	71.11	83.54	100	100	
5.	Persentase Penderita Hypertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100	85.07	90.23	100	100	
6.	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100.4	105.02	100	100	
7.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	96.64	100	100	100	
8.	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	100	100	100	83.99	67.10	100	100	
9.	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	100	100	100	100	80.53	68.23	100	100	
10.	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100	100	100	100	87.54	72.57	100	100	
11.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	85.08	100	100	



RENCANA KERJA 2026

12.	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	80.44	64.74	100	100
13.	Angka Usia Harapan Hidup	69.29	69.5	69.75	70	69.70	70.10	100	100
14.	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.19	0.18	0.17	0.16	0.05	0.19	100	100
15.	Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	90	95	100	100	83.21	85.14	100	100
16.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	46	45	44	43	0	5	100	100
17.	Angka kelangsungan hidup bayi (Jumlah Kelahiran Hidup)	95.6	98.6	100	100	85.42	83.64	100	100
18.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3	2	1	0	1	16	100	100
19.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	14	13	12	11	53	6	100	100
20.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	6	5	4	3	0	5	100	100
21.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59	71	83	83	80	92	100	100
22.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
23.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87.9	91.6	95	95	36.70	29.3	100	100
24.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	99.20	100	100	100
25.	Prevalensi Balita Stunting	16	14	14	14	19.4	100	100	100
26.	Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	100	100	100	100	100	100	100	100
27.	Persentase Balita Kurus yang Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	100	100	100	100	100	100	100	100
28.	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	86	89	92	95	68.4	53.2	100	100
29.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	4	4	4	4	8		100	100
30.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
31.	Cakupan penemuan dan pengobatan TB	90	90	90	90	54	85	100	100
32.	Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk	324/100.00 0 pddk	316/100.00 0 pddk	324/100.00 0 pddk	324/100.00 0 pddk	216/100.00 0 pddk	100	100	100



RENCANA KERJA 2026

33	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	8	7	6	5	6	7	100	100
34	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)	90	90	90	90	85	86.8	100	100
35	Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate)	<43 per 100.000 pddk	<42 per 100.000 pddk	<41 per 100.000 pddk	<40 per 100.000 pddk	14.1 per 100.000 pddk	30.1 per 100.000 pddk	100	100
36	Penemuan kasus malaria	57	60	60	60	100	100	100	100
37	Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	0	0	100	100
38	Cakupan Pelayanan Kunjungan Nifas Lengkap (KF3)	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	79.12	63.92	100	100
40	Cakupan Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ter akreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	100	100
44	Persentase Korong dengan Stop Buang Air Besar	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	40	50	60	70	14.77	30.09	100	100
46	Persentase Alkes yang sesuai standar permenkes	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	100	100
47	Jumlah Kecamatan Sehat	70	73	75	80	67.17	67	100	100
48	Indeks Keluarga Sehat	14	16	16	17	11	11	100	100
49	Persentase Rumah Tangga PHBS	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17	100	100
50	Jumlah IRTP yang diawasi	76	78	80	82	77.5	78	100	100

Dari tabel 2.7 dapat dilihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yaitu 69,34 tahun sedangkan target yang ditetapkan adalah 68.99 tahun dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, Artinya angka harapan hidup ini adalah

seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 mempunyai harapan hidup selama 69.34 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai umur 69.34 tahun pada tahun kedepan.

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian Indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi. Serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Angka usia harapan hidup dapat meningkat karena salah satunya adanya upaya pengendalian masalah kesehatan, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai usia harapan hidup yang tinggi adalah melakukan peningkatan cakupan dan kualitas pencegahan serta pengendalian penyakit menular, diantaranya :

10. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja. Perhitungan Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk menentukan Tingkatan Keluarga menurut Status Kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi 3 tingkatan :

Keluarga Sehat : $> 0,80$

- a. Keluarga Pra-Sehat : $0,50-0,80$
- b. Keluarga Tidak Sehat : $< 0,50$

Adapun indikator keluarga sehat saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut:

- a. Keluarga Mengikuti Program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- b. Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Swasta).
- c. Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan) dan bayi tersebut mendapat imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, Campak.
- d. Bayi Mendapat ASI Eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0 - 6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI Eksklusif).



RENCANA KERJA 2026

- e. Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badanya di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ Buku KIA.
- f. Penderita Tuberculosis Paru Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis (TB) Paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk Dokter/ Petugas Kesehatan.
- g. Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- h. Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- i. Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
- j. Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya
- k. Keluarga Mempunyai Akses Sarana Air Bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
- l. Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Cara perhitungannya adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja x 100%.

Berdasarkan data Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan, IKS Kabupaten Padang Pariaman berada pada nilai 0.1 dengan kategori tidak sehat. Walaupun melebihi target tapi Kabupaten Padang Pariaman masih masuk kategori Keluarga tidak sehat. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 93.074 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di entri ke aplikasi sebanyak 81.896 KK. Dengan rincian 10.537 KK kategori sehat, 51.215 KK kategori Pra-Sehat, dan 20.144 KK tidak sehat.

Faktor penghambat tidak tercapainya target ini adalah :

- a. Sosialisasi tentang PIS-PK sudah dilaksanakan, meski demikian masih ada penolakan dari masyarakat terkait kunjungan yang dilakukan Puskesmas sehingga belum semua keluarga terdata.



RENCANA KERJA 2026

- b. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain: Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 40.87%, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 32.12%, Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 31.97%, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 49.25%, Anggota keluarga tidak ada yang merokok 39.42%, dan Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 42.40%)
- c. Masih ditemukan kondisi hasil pendataan keluarga yang belum masuk ke dalam aplikasi dikarenakan permasalahan teknis yang dihadapi Puskesmas, seperti data tidak bisa tersimpan ataupun data yang sudah disimpan tidak muncul. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah.
- d. Standar penilaian suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat sangat ketat karena melibatkan penilaian terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada satu orang anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka penilaian seluruh anggota keluarga menjadi tidak memenuhi dan IKS keluarga menjadi tidak sehat.

Adapun Solusi dan Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di tahun-tahun mendatang dapat sesuai dengan target yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan cakupan *total coverage* pendataan keluarga sehat melalui pendataan ulang;
- b. Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga;
- c. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d. Mengusulkan realokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana, akomodasi serta alat perlindungan diri selama masa pandemi bagi petugas yang melakukan kunjungan keluarga;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- f. Melaksanakan penguatan dan pembinaan PIS-PK bagi Puskesmas; serta
- g. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas

Adapun data Cakupan IKS Perwilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Cakupan IKS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	IKS	Tingkatan Keluarga Sehat
1	Ampalu	0,06	Keluarga Tidak Sehat
2	Sungai Sarik	0,10	Keluarga Tidak Sehat
3	Anduring	0,25	Keluarga Tidak Sehat
4	Kayu Tanam	0,12	Keluarga Tidak Sehat
5	Batu Basa	0,08	Keluarga Tidak Sehat



RENCANA KERJA 2026

No	Nama Puskesmas	IKS	Tingkatan Keluarga Sehat
6	Enam Lingkung	0,11	Keluarga Tidak Sehat
7	Gasam Gadang	0,45	Keluarga Tidak Sehat
8	Kampung Dalam	0,10	Keluarga Tidak Sehat
9	Sikucur	0,06	Keluarga Tidak Sehat
10	Ketaping	0,13	Keluarga Tidak Sehat
11	Pasar Usang	0,23	Keluarga Tidak Sehat
12	Koto Bangko	0,08	Keluarga Tidak Sehat
13	Sungai Geringging	0,09	Keluarga Tidak Sehat
14	Limau Purut	0,14	Keluarga Tidak Sehat
15	Padang Alai	0,09	Keluarga Tidak Sehat
16	Lubuk Alung	0,06	Keluarga Tidak Sehat
17	Sikabu	0,13	Keluarga Tidak Sehat
18	Padang Sago	0,08	Keluarga Tidak Sehat
19	Patamuan	0,08	Keluarga Tidak Sehat
20	Pauh Kamar	0,11	Keluarga Tidak Sehat
21	Sicincin	0,15	Keluarga Tidak Sehat
22	Kampung Guci	0,22	Keluarga Tidak Sehat
23	Sungai Limau	0,12	Keluarga Tidak Sehat
24	Sintuk	0,08	Keluarga Tidak Sehat
25	Ulakan	0,10	Keluarga Tidak Sehat

Tabel 2.8
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator SPM	Target SPM Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	80.53	68.23	80.53	85.53	Cukup Berhasil	
2.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar di fasyankes	100	100	100	100	80.44	64.74	80.44	83.44	Cukup Berhasil	
3.	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir sesuai standar	100	100	100	100	83.99	67.10	83.99	87.99	Cukup Berhasil	
4.	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	87.54	72.57	87.54	91.54	Cukup Berhasil	
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100.00	85.08	100.00	100.00	Berhasil	
6	Persentase pengunjug usia 15- 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	100	100	100	100	87.66	98.71	87.66	88.76	Cukup Berhasil	



RENCANA KERJA 2026

7	Persentase pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	94.80	100.00	94.80	100	Cukup Berhasil
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	85.07	90.23	85.07	90.23	Cukup Berhasil
9	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100.40	105.02	100.40	107.40	Berhasil
10	Persentase ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100	100	96.64	100.00	96.64	97.64	Cukup Berhasil
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100	100	78.45	79.01	78.45	84.75	Cukup Berhasil
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes	100	100	100	100	71.11	83.54	71.11	80.52	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

Pelayanan dasar SPM bidang kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan siklus hidup (life cycle) dan pendekatan faktor risiko penyakit. Pendekatan ini memastikan bahwa pelayanan diberikan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga usia lanjut, serta pada kelompok masyarakat dengan risiko penyakit tertentu,

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

- Standar kuantitas.
- Standar kualitas.

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS ataudata riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



2. Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 1. Satu kali pada trimester pertama.
 2. Satu kali pada trimester kedua.
 3. Dua kali pada trimester ketiga
3. Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 1. Pengukuran berat badan.
 2. Pengukuran tekanan darah.
 3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 5. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin(DJJ).
 6. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
 8. Tes Laboratorium.
 9. Tatalaksana/penanganan kasus.
 10. Temu wicara (konseling).

d. Capaian Kinerja

a. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

b. Rumus Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dari hasil capaian SPM dapat dilihat bahwa capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil masih dibawah target SPM yaitu sebesar 68.23 % dari target 100%. Berdasarkan data tahun 2024 dari sasaran 9.401 ibu hamil sebanyak 6.414 ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.

Penyebab tidak tercapai nya target capaian Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K4) tahun 2024, berdasarkan hasil wawancara, evaluasi dengan pengelola program ibu di Puskesmas se- Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan :



RENCANA KERJA 2026

- a. Masih adanya tenaga dukun beranak di beberapa wilayah
- b. Masih terdapatnya masyarakat yang percaya dengan tenaga dukun dalam mendapatkan pelayanan pada ibu hamil
- c. Adanya budaya malu dan kepercayaan yang beredar dimasyarakat untuk segera periksa kehamilan, ketika seorang wanita yang sudah menikah telat haid.
- d. Kurang pengetahuan ibu dan keluarga terhadap pelayanan kehamilan yang berkualitas
- e. Belum semua nagari terdapat bidan desa dan masih ada bidan desa yang tidak tinggal di wilayah kerjanya
- f. Kunjungan rumah tidak terlaksana secara optimal
- g. Sasaran PUSDATIN yang lebih besar dari sasaran riil
- h. Tidak adanya dukungan anggaran untuk kegiatan kelas Ibu hamil dan kelas Ibu Balita

Walaupun belum mencapai target yang telah di tetapkan, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan capaian ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan dalam meningkatkan mutu layanan khususnya di bidang KIA, diantaranya :

- a. Adanya pertemuan pengkajian dan pembelajaran AMP (Audit Maternal Perinatal)
- b. Adanya Kegiatan promosi/kampanye terkait penurunan AKI AKB
- c. Adanya Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan GP2SP di Tingkat Kab/Kota
- d. Adanya kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : telekonsultasi USG, Pembinaan Pelayanan ANC, INC, PNC dan bayi oleh SpOG dan Sp.A di Puskesmas, dan Pelaksanaan Penyeliaan fasilitatif KIA bagi Puskesmas, TPMB, dan Klinik.
- e. Adanya Pertemuan koordinasi, sosialisasi dlm rangka meningkatkan dukungan mitra penggerakan masyarakat dan pelaksanaan posyandu
- f. Adanya Pertemuan Koordinasi Lintas Program/ Lintas Sektor dalam Penguatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
- g. Dan adanya kegiatan Orientasi Kelas Ibu Hamil (Ibu hamil dan Ibu Balita bagi tenaga kesehatan di Puskesmas)
- h. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam

mengimplementasikan pelayanan 10T pada Ibu Hamil.

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.

Gambar 3.1

Garakan Bumil Sehat di Puskesmas



Gambar 3.2

Kegiatan AMP



2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi:

1. Persalinan normal.
2. Persalinan komplikasi.

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil



survey/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

2. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

a) Persalinan dilakukan di fasyankes.

b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari:

(1) Dokter, bidan dan perawat; atau

(2) Dokter, dan 2 Bidan

c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.

d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:

(1) Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan

(2) Tidak ada Tenaga Medis.

3. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2. Rumus Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



RENCANA KERJA 2026

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

Adapun kendala yang dihadapi oleh dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, antara lain:

- Tidak semua Puskesmas menggunakan sarana rumah tunggu kelahiran dan transportasi rujukan kegawatdaruratan pada ibu bersalin
- Alat kegawatdaruratan belum digunakan secara maksimal
- Belum semua puskesmas yang mempunyai sarana persalinan sesuai standar
- Sasaran ibu bersalin tidak terdata karena domisilinya tidak di wilayah Puskesmas (*Underreporting*)
- Data sasaran Pusdatin terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan data riil di lapangan.

Dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, antara lain:

- Penyediaan rumah tunggu kelahiran
- Penyediaan sarana transportasi rujukan
- Adanya kegiatan yang terjadi pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan ke Puskesmas (Optimalisasi PWS KIA dan e-Kohort)
- Melakukan pendampingan tim ahli (dokter spesialis obgyn dan anak) yang dilakukan ke setiap puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Dan Adanya *On The Job Training* kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi tenaga kesehatan di puskesmas tujuannya untuk meningkatkan SDM Nakes dalam melakukan pelayanan kegawatdaruratan pada ibu dan bayi agar dapat menurunkan angka

kematian ibu dan bayi

- g. Melaksanakan sosialisasi Permenkes Nomor 21 tahun 2021

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan Persentase Ibu bersalun mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin:

Gambar 3.3

Kegiatan USG



3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup:

1. Standar Kuantitas.
2. Standar Kualitas.

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data dari PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



2. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan.

- Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
- Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
- Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari

3. Standar Kualitas:

a. Pelayanan Neonatal Essensial saat lahir meliputi:

1. Pemotongan dan perawatan tali pusat
2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
3. Injeksi Vitamin K1
4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic
5. Pemberian imunisasi (Injeksi vaksin Hepatitis B0)

b. Pelayanan Neonatal Essensial setelah lahir (6 jam-28 hari)

Perawatan neonatal essensial setelah lahir meliputi :

1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif
2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
3. Pemberian Vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1
4. Imunisasi Hepatitis B Injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan
5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase bayi baru lahir} \\
 \text{mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} \\
 \text{sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari} \\
 \text{yang mendapatkan pelayanan} \\
 \text{kesehatan bayi baru lahir sesuai} \\
 \text{dengan standar dalam kurun waktu} \\
 \text{satu tahun}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di} \\
 \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\
 \text{tersebut dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun yang sama}
 \end{array}
 }
 \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah :

- Melakukan kunjungan rumah pada neonatus
- Koordinasi dengan fasyankes terkait yang memberikan pelayanan pada bayi baru lahir
- Menyediakan sarana dan prasarana penunjuang kelengkapan kualitas pelayanan neonatus
- Peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan layanan pada bayi baru lahir.
- Adapun kendala yang di hadapi adalah:
- Banyak bidan desa yg tidak ada di tempat sehingga kunjungan rumah tidak terlaksana
- Kurangnya dukungan dari keluarga yang dikunjungi
- Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pelayanan pada bayi baru lahir.

Berikut ini dokumentasi kegiatan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah:

Gambar 3.4

Kegiatan Kunjungan Rumah pada Neonatus





4. Pelayanan Kesehatan Balita

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi:

1. Pelayanan kesehatan balita sehat.
2. Pelayanan kesehatan balita sakit.

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan:

- (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
- (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
- (4) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
- (5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
- (6) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:

- (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.



RENCANA KERJA 2026

- (3) Pengukuran lingkaran kepala minimal 2 kali/tahun.
- (4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
- (5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- (6) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta.

c) Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan:

- (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- (2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- (3) Pengukuran lingkaran kepala minimal 1 kali/tahun.
- (4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
- (5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

3. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

a. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Cakupan} \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{kesehatan} \\
 \text{balita sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang} \\
 \text{mendapat pelayanan kesehatan sesuai} \\
 \text{standar 1 + jumlah balita usia 24-35} \\
 \text{bulan mendapatkan pelayanan} \\
 \text{kesehatan sesuai standar 2 + balita usia} \\
 \text{36-59 bulan mendapatkan pelayanan} \\
 \text{sesuai standar 3}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di} \\
 \text{wilayah kerja kabupaten/kota tersebut} \\
 \text{pada kurun waktu satu tahun yang} \\
 \text{sama}
 \end{array}
 } \times 100\%$$

Berdasarkan data tahun 2024 dari 39.157 sasaran balita sebanyak 29.580 balita melakukan kunjungan/ pemeriksaan kesehatan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun,

pemberian Kapsul Vitamin A 2 kali setahun dan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap.

- a. kunjungan rumah
- b. Pemantauan Perkembangan minimal 2 kali setahun di Posyandu/kunjungan rumah
- c. Melakukan kelas balita
- d. Imunisasi dasar lengkap
- e. Melakukan MTBS di Fasyankes dan SDIDTK di kunjungan rumah dan kelas Ibu Balita
- f. Melakukan peningkatan pelatihan kader

Adapun kendala yang di hadapi adalah:

- a. Sasaran yang tinggi karena menggunakan sasaran Pusdatin, sedangkan sasaran riil balita yang ditemukan di lapangan tidak sebanyak sasaran tersebut
- b. Masih kurangnya SDM yang melakukan kunjungan rumah seperti bidan desa
- c. Masih ada Puskesmas yang belum menggunakan Antropometri Kit Dokumentasi kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian pelayanan balita sesuai standar:

Gambar 3.5

Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Serentak Bagi Petugas Gizi Pengelola Anak, PJ Promkes dan Bidan Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Ulakan



Gambar 3.6

Kegiatan Mendampingi Pelatihan Pemberian Makanan Bergizi Pada Bayi dan balita di Wilayah Kerja Puskesmas Ulakan



5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024).

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan:

- 1) Skrining kesehatan.
- 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

- 3) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.

c. Mekanisme Pelayanan



1. Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA, Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Skrining kesehatan
Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - a) Penilaian status gizi.
 - b) Penilaian tanda vital.
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d) Penilaian ketajaman indera.
 - e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7.
3. Tindakan lanjut hasil skrining Kesehatan meliputi:
 - a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan.
 - b) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - c) Memberikan penyuluhan kesehatan.
4. Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi:
 - a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara.
 - b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara.
 - c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara

d. **Capaian Kinerja**

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja



Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024).

Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- a) pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- b) pencapaian penerima layanan dasar.

2. Rumusan Perhitungan Kinerja

Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$\begin{array}{lcl} \text{Indeks} & & \\ \text{Pencapaian} & & \\ \text{SPM (IPSPM)} & = & \begin{array}{l} \% \text{ IP Mutu Minimal} \\ \text{Layanan Dasar X Bobot} \\ \text{Mutu Minimal Layanan} \\ \text{Dasar (20)} \end{array} + \begin{array}{l} \% \text{ IP Penerima} \\ \text{Layanan Dasar x} \\ \text{Bobot Penerima} \\ \text{layanan Dasar (80)} \end{array} \end{array}$$

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.



b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:

- 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;
- 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan
- 4) pelayanan KB

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama/rumah ibadah.
3. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut.
 - b) Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun.
 - c) Pengukuran tekanan darah.
 - d) Pemeriksaan gula darah untuk:
 - Usia 40 tahun ke atas;
 - Usia 15 tahun sampai < 40 tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM



RENCANA KERJA 2026

- Calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
 - e) Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin)
 - f) Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin).
 - g) Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - h) Anamnesa perilaku berisiko.
 - i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran.
 - j) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan).
 - k) Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa.
 - l) Status imunisasi TT bagi calon pengantin.
 - m) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya.
 - n) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T.
 - o) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - (1) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - (2) Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan.
- Keterangan:
- Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.
 - PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15-49



tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun).

d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Penghitungan pencapaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu pencapaian mutu layanan dasar (barang dan/atau jasa) dan sumber daya manusia (SDM).

a) Pencapaian penerima layanan dasar.

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan dengan persentase indeks layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus penghitungan pencapaian indeks pencapaian SPM persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar.

$$\begin{array}{lcl} \text{Indeks} & & \\ \text{Pencapaian} & & \\ \text{SPM (IP}_{\text{SPM}}) & = & \begin{array}{l} \% \text{IP Mutu Minimal} \\ \text{Layanan Dasar} \times \text{Bobot} \\ \text{Mutu Minimal Layanan} \\ \text{Dasar (20)} \end{array} + \begin{array}{l} \% \text{IP Penerima} \\ \text{Layanan Dasar} \times \\ \text{Bobot Penerima} \\ \text{layanan Dasar (80)} \end{array} \end{array}$$

Numerator: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

b) Tata cara perhitungan Indeks Pencapaian (IP) SPM

- Persentase IP Penerima Layanan Dasar

$$\% \text{ IP Penerima Layanan Dasar} = \frac{\sum \text{ Sasaran yang dilayani}}{\sum \text{ Sasaran}} \times 100\%$$

- Indeks Pelayanan Mutu Minimal Layanan Dasar

$$\% \text{ IP Mutu Minimal Layanan Dasar} = \frac{\sum N (\text{Mutu barang, Mutu jasa, Mutu SDM})}{N \text{ Indeks Pencapaian}}$$

Berikut dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan produktif adalah:

Gambar 3.7

Pemeriksaan Kesehatan ASN dan Non ASN di Lingkungan PEMDA Padang Pariaman



7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar kepada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.



b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:

1. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Skrinning faktor resiko pada usia lanjut

c. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah
3. Pelayanan skrinning faktor resiko pada usia lanjut adalah skrinning yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi :
 - a. Pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan Lingkar Lengan Atas
 - b. Pengukuran tekanan darah
 - c. Pemeriksaan gula darah
 - d. Pemeriksaan kolesterol
 - e. Pemeriksaan skrining lansia sederhana
 - f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g. Anamnesa perilaku beresiko
4. Tindak lanjut hasil skreening factor resiko pada usia lanjut meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia.
 - b. Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - c. Memberikan penyuluhan kesehatan.

d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara berusia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining



kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumusan Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan} = \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100 \%$$

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi:

1. Pengukuran tekanan darah
2. Pelayanan edukasi non farmakologi
3. Pelayanan farmakologi
4. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.

c. Mekanisme Pelayanan

2. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



3. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi :

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan farmakologi.

d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2. Rumusan Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penderita} \\ \text{hipertensi yang} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penderita hipertensi usia} \\ \text{\(\geq 15\)} \text{ tahun di dalam wilayah} \\ \text{kerjanya yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan sesuai} \\ \text{standar dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah estimasi penderita} \\ \text{hipertensi usia \(\geq 15\)} \text{ tahun yang} \\ \text{berada di dalam wilayah kerjanya} \\ \text{berdasarkan angka prevalensi} \\ \text{kabupaten/kota dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun yang sama.} \end{array}} \times 100\%$$

Hipertensi masih dianggap sepele oleh sebagian masyarakat sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin. Karena kurangnya promosi dan sosialisasi tentang hipertensi menyebabkan sasaran yang telah ditetapkan tidak datang ke Puskesmas. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi:

1. Pemeriksaan klinis
2. Pemeriksaan penunjang
3. Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)
4. Terapi farmakologi

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
4. Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
 - b. Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes.
 - c. Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).
 - d. Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien.



e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

f. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Perhitungan pencapaian SPM pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

a. Pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)

b. Pencapaian penerima layanan dasar

Indeks pencapaian SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

2. Rumusan Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Indeks} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{SPM (IP}_{\text{SPM}}) \end{array} = \begin{array}{l} \% \text{IP Mutu Minimal} \\ \text{Layanan Dasar x Bobot} \\ \text{Mutu Minimal Layanan} \\ \text{Dasar (20)} \end{array} + \begin{array}{l} \% \text{IP Penerima Layanan} \\ \text{Dasar x Bobot} \\ \text{Penerima layanan} \\ \text{Dasar (80)} \end{array}$$

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak skunder akibat gangguan jiwanya di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia yang meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa.
2. Edukasi.



3. Tata laksana

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jika pada 2 (dua) tahun berturut-turut telah dilakukan upaya maksimal dan tidak ditemukan ODGJ berat sejumlah sasaran berdasarkan data RISKESDAS 2018 maka dengan justifikasi yang kuat dan didukung dengan data epidemiologis yang sah kepala daerah dapat menetapkan target capaian melalui surat ketetapan.
2. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - a. Pemeriksaan status mental
 - b. Wawancara
3. Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluargacaregiver.
4. Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi.
5. Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.

d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumusan Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:

1. Pemeriksaan klinis.
2. Pemeriksaan penunjang
3. Edukasi.

c. Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus.
3. Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda.
4. Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku.
5. Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM.



6. Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
7. Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis.
8. Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif.
9. Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah.
10. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
11. Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumusan Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - HIV) di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. **Pengertian**

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

1. Edukasi perilaku beresiko.
2. Skinning.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

1. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil
2. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
3. Pasien Infeksi Manular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
4. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
5. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
6. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
7. Pengguna NAPZA suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

c. **Mekanisme Pelayanan**



1. Penetapan sasaran HIV menggunakan data orang yang beresiko terinfeksi HIV (Penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
 2. Edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan
 3. Skrinning dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
 4. Melakukan rujukan jika diperlukan.
- d. Capaian Kinerja

1. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2. Rumusan Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase orang} \\ \text{dengan risiko} \\ \text{terinfeksi HIV} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{deteksi dini HIV} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan



RENCANA KERJA 2026

dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Perubahan yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



RENCANA KERJA 2026

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100% B 100%	104.623.126.884	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100% B 100%	105.623.126.800	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 dokumen	106.121.522	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 dokumen	106.121.522	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	32.614.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	32.614.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	15 Laporan	2.582.109.116	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	15 Laporan	2.582.109.116	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	965 Orang/Bln	103.169.981.267	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	965 Orang/Bln	103.169.981.267	
	Penyediaan Administrasi	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	771.080.000	Penyediaan Administrasi	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	771.080.000	



RENCANA KERJA 2026

	Pelaksanaan Tugas ASN	an	Pelaksanaan Tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN	n	Pelaksanaan Tugas ASN		0	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Dokumen	19.999.900	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Dokumen	19.999.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.100	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 Dokumen	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	901 Orang	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Pariaman		901 Orang	30.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Dokumen	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang Pariaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	25.000.000				45 Orang	25.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	75 Orang	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	75 Orang	10.000.000	



RENCANA KERJA 2026

		an	Peraturan Perundang-Undangan			Kelengkapannya	n	Peraturan Perundang-Undangan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang		15.000.000			75 Orang		15.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	2451 Surat		348.115.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	2451 Surat	348.115.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		18.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.200.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Pariaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		15.000.000			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 Laporan		13.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 Laporan	13.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan		100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan		1.760.644.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	1.760.644.400
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan					Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan		0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		222.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	222.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Laporan		0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Laporan	0



RENCANA KERJA 2026

			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.290.100		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.290.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Paket	155.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Paket	155.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung/Tahun	11.5000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Gedung/Tahun	11.5000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Padang Pariaman	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	25 Orang			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Padang Pariaman	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	25 Orang	
		Padang Pariaman	Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit	140 tempat tidur					Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit	140 tempat tidur	
		Padang Pariaman	Indeks Kepuasan masyarakat	A					Indeks Kepuasan masyarakat	A	
		Padang Pariaman	Persentase Sampel Air yang diperiksa	100%					Persentase Sampel Air yang diperiksa	100%	
		Padang Pariaman	Persentase sediaan farmasi yang dikelola	100%					Persentase sediaan farmasi yang dikelola	100%	
		Padang Pariaman	Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda	60%					Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda	60%	
		Padang Pariaman	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial	100%					Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial	100%	
		Padang Pariaman	Jumlah ketersediaan data dalam profil kesehatan	169 Data					Jumlah ketersediaan data dalam profil kesehatan	169 Data	
		Padang Pariaman	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100%	100%					Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100%	100%	



RENCANA KERJA 2026

			intervensi keluarga					intervensi keluarga			
		Padang Pariaman	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dari sama dengan 2%	100%				Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dari sama dengan 2%	100%		
		Padang Pariaman	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	100%				Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	100%		
		Padang Pariaman	Angka Kematian Bayi	45 Orang				Angka Kematian Bayi	45 Orang		
		Padang Pariaman	Prevalensi Stunting	14%				Prevalensi Stunting	14%		
		Padang Pariaman	Persentase kecamatan sehat	88.24%				Persentase kecamatan sehat	88.24%		
		Padang Pariaman	Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas	100%				Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas	100%		
		Padang Pariaman	Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus	1093 Orang				Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus	1093 Orang		
		Padang Pariaman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkesmas, FKTP, dan RS) yang melaporkan hasil surveilans	100%				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkesmas, FKTP, dan RS) yang melaporkan hasil surveilans	100%		
		Padang Pariaman	Persentase penduduk sesuai kelompok umur yang mendapatkan pelayanan imunisasi	100%				Persentase penduduk sesuai kelompok umur yang mendapatkan pelayanan imunisasi	100%		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah RS yang diawasi	1 RS	508.505.026	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah RS yang diawasi	1 RS	508.505.026	
		Padang Pariaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	3 Sarana				Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	3 Sarana		
		Padang	Jumlah Pengadaan	2 Paket				Jumlah Pengadaan	2 Paket		



RENCANA KERJA 2026

		Pariaman	Obat dan BMHP					Obat dan BMHP			
		Padang Pariaman	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	3 Paket				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	3 Paket		
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	360.931.660	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	360.931.660	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Padang Pariaman	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Padang Pariaman	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	978.084.243	Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	978.084.243	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	738.259.490	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	738.259.490	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Padang Pariaman	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	13 Unit	20.914.284	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Padang Pariaman	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	13 Unit	20.914.284	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Padang Pariaman	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	5.749.862.807	Pengadaan Obat, Vaksin	Padang Pariaman	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	5.749.862.807	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Padang Pariaman	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Padang Pariaman	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket		
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit		
	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan	Padang Pariaman	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	2 Unit	147.573.366	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan	Padang Pariaman	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	2 Unit	147.573.366	



RENCANA KERJA 2026

	Kesehatan		Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Kesehatan		Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	261.808.500	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	261.808.500	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Paket	88.076.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Paket	88.076.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen		
		Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas	12 Dokumen			Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas	12 Dokumen		
		Padang Pariaman	Jumlah dokumen administrasi Labkesda	12 Dokumen			Padang Pariaman	Jumlah dokumen administrasi Labkesda	12 Dokumen		
		Padang Pariaman	Jumlah dokumen administrasi IFK	12 Dokumen			Padang Pariaman	Jumlah dokumen administrasi IFK	12 Dokumen		
		Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional	25 Puskesmas			Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional	25 Puskesmas		
		Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan	25 Puskesmas			Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan	25 Puskesmas		
		Padang Pariaman	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan	25 Pelayanan			Padang Pariaman	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan	25 Pelayanan		
		Padang Pariaman	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	25 Puskesmas			Padang Pariaman	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	25 Puskesmas		
		Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer	25 Puskesmas			Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer	25 Puskesmas		



RENCANA KERJA 2026

		Padang Pariaman	Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90%	1 RS			Padang Pariaman	Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90%	1 RS		
		Padang Pariaman	Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	25 Fasyankes			Padang Pariaman	Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	25 Fasyankes		
		Padang Pariaman	Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119	25 Puskesmas			Padang Pariaman	Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119	25 Puskesmas		
		Padang Pariaman	Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratnya dengan PSC 119 (100%)	1 RS			Padang Pariaman	Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratnya dengan PSC 119 (100%)	1 RS		
		Padang Pariaman	Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal	4 Kegiatan			Padang Pariaman	Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal	4 Kegiatan		
		Padang Pariaman	Prevalensi balita wasting	7.0%			Padang Pariaman	Prevalensi balita wasting	7.0%		
		Padang Pariaman	Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana	56 Orang			Padang Pariaman	Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana	56 Orang		
		Padang Pariaman	Jumlah peserta KB Aktif	41.876 Orang			Padang Pariaman	Jumlah peserta KB Aktif	41.876 Orang		
		Padang Pariaman	Jumlah Lansia yang dilakukan skrining kesehatan	58.125 Orang			Padang Pariaman	Jumlah Lansia yang dilakukan skrining kesehatan	58.125 Orang		
		Padang Pariaman	Jumlah nagari dengan stob buang air besar sembarangan (SBS)	67 Nagari			Padang Pariaman	Jumlah nagari dengan stob buang air besar sembarangan (SBS)	67 Nagari		
		Padang Pariaman	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	25 Puskesmas			Padang Pariaman	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	25 Puskesmas		
		Padang Pariaman	Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	75 TFU			Padang Pariaman	Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	75 TFU		
		Padang Pariaman	Jumlah media KIE yang dibuat	3156 KIE			Padang Pariaman	Jumlah media KIE yang dibuat	3156 KIE		
		Padang Pariaman	Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	74.074 Orang			Padang Pariaman	Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	74.074 Orang		
		Padang Pariaman	Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus	1093			Padang Pariaman	Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus	1093		



RENCANA KERJA 2026

		an	Tuberkulosis	Kasus			n	Tuberkulosis	Kasus		
		Padang Pariaman	Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV)	87 Kasus			Padang Pariaman	Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV)	87 Kasus		
		Padang Pariaman	Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar	25 Tatalaksana			Padang Pariaman	Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar	25 Tatalaksana		
		Padang Pariaman	Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	33.895 Orang			Padang Pariaman	Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	33.895 Orang		
		Padang Pariaman	Jumlah kegiatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB	7 Kegiatan			Padang Pariaman	Jumlah kegiatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB	7 Kegiatan		
		Padang Pariaman	Jumlah kejadian ikutan pasca iminisasi (KIPI)	7 Kegiatan			Padang Pariaman	Jumlah kejadian ikutan pasca iminisasi (KIPI)	7 Kegiatan		
		Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumen			Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumen		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Padang Pariaman	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.401 Orang	54.440.020	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Padang Pariaman	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.401 Orang	54.440.020	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Padang Pariaman	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.342 Orang	104.290.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Padang Pariaman	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.342 Orang	104.290.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Padang Pariaman	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.903 Orang	27.540.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Padang Pariaman	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.903 Orang	27.540.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Padang Pariaman	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.691 Orang	16.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Padang Pariaman	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.691 Orang	16.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Padang Pariaman	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83.626 Orang	22.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Padang Pariaman	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83.626 Orang	22.100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Padang Pariaman	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274.295 Orang	20.890.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Padang Pariaman	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274.295 Orang	20.890.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Padang Pariaman	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	58.125 Orang	24.420.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Padang Pariaman	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	58.125 Orang	24.420.000	



RENCANA KERJA 2026

			Kesehatan Sesuai Standar					Kesehatan Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Padang Pariaman	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.074 Orang	20.730.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Padang Pariaman	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.074 Orang	20.730.100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Padang Pariaman	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.619 Orang	388.185.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Padang Pariaman	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.619 Orang	388.185.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	897 Orang	11.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	897 Orang	11.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Padang Pariaman	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.619 Orang	1.795.910.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Padang Pariaman	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.619 Orang	1.795.910.100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Padang Pariaman	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.001 Orang	161.075.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Padang Pariaman	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.001 Orang	161.075.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	19.340.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	19.340.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	15.240.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	15.240.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.000 Dokumen	197.710.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.000 Dokumen	197.710.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	16.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	16.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	574.975.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	574.975.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	426.074.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	426.074.000	



RENCANA KERJA 2026

	Kesehatan	an	Promosi Kesehatan			Kesehatan	n	Promosi Kesehatan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	58.740.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	58.740.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	54.782.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	54.782.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Padang Pariaman	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3.538 Orang	21.520.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Padang Pariaman	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3.538 Orang	21.520.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Padang Pariaman	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	162 Orang	60.640.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Padang Pariaman	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	162 Orang	60.640.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	0	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	0	
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	0	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	0	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	1.196.642.913	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	1.196.642.913	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	15.814.243.800	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	15.814.243.800	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 Orang	16.160.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 Orang	16.160.000	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Padang Pariaman	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40 Paket	31.445.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Padang Pariaman	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40 Paket	31.445.000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	104 Dokumen	29.500.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	104 Dokumen	29.500.000	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang	10 Puskesmas	0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang	10 Puskesmas	0	



RENCANA KERJA 2026

	Kesehatan		Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	s		Kesehatan		Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	s		
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	12 Dokumen	0	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	12 Dokumen	0	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	0	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	0	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	0	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	181.600.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	181.600.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	61.900.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	61.900.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7 Laporan	70.970.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7 Laporan	70.970.000	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	22.880.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	22.880.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Padang Pariaman	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	0	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Padang Pariaman	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	0	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumens		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumens		
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumen	251.250.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	169 Dokumen	251.250.000	



RENCANA KERJA 2026

	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25 Dokumen	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25 Dokumen	0	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Padang Pariaman	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25 Alat	0	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Padang Pariaman	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25 Alat	0	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang terakreditasi Paripurna	25 Puskesmas		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah puskesmas yang terakreditasi Paripurna	25 Puskesmas		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D da Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Padang Pariaman	Jumlah klinik pratama terakreditasi Paripurna	9 Klinik	19.310.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D da Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Padang Pariaman	Jumlah klinik pratama terakreditasi Paripurna	9 Klinik	19.310.000	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan	38 Sarana	0	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan	38 Sarana	0	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dan sama dengan 2%	25 puskesmas dan 1 RS dan 14 Klinik	233.124.100	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dan sama dengan 2%	25 puskesmas dan 1 RS dan 14 Klinik	233.124.100	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Padang Pariaman	Jumlah FKTP dengan penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit	25 Dokumen	28.300.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Padang Pariaman	Jumlah FKTP dengan penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit	25 Dokumen	28.300.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Padang Pariaman	Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis	60%		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasilitas Kesehatan melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	60%		
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	Padang Pariaman	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	1947 Rekomendasi		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	Padang Pariaman	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1947 Rekomendasi		



RENCANA KERJA 2026

	Kabupaten/Kota		Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			Kabupaten/Kota		yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1947 Dokumen	17.447.300	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1947 Dokumen	17.447.300	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1947 Dokumen	17.447.300	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1947 Dokumen	17.447.300	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	100 Nakes		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100 Nakes		
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	17.433.900	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Padang Pariaman	Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis	2 Dokumen	17.433.900	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Padang Pariaman	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	1.012.1778.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Padang Pariaman	Jumlah Rekomendasi izin praktek medis dan nakes yang diberikan	100 Orang	1.012.1778.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	278.400.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	278.400.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan	250 orang		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	250 orang		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 orang	1.404.649.400	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	200 orang	1.404.649.400	



RENCANA KERJA 2026

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Padang Pariaman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	20%		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Padang Pariaman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	20%		
	Padang Pariaman	Persentase IRTP yang memiliki SPPIRT	70%			Padang Pariaman	Persentase IRTP yang memiliki SPPIRT	70%		
	Padang Pariaman	Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi	75%			Padang Pariaman	Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi	75%		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT yang memiliki izin	75 Sarana		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT yang memiliki izin	75 Sarana		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	109.210.800	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	109.210.800	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34 sarana	10.566.800	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34 sarana	10.566.800	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	34 sarana		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Padang Pariaman	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	34 sarana		
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produs ALAT Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah	Padang Pariaman	Jumlah SPPIRT yang diterbitkan	70 SPPIRT		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produs ALAT Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah	Padang Pariaman	Jumlah SPPIRT yang diterbitkan	70 SPPIRT		



RENCANA KERJA 2026

	Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3 Dokumen	185.149.600	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3 Dokumen	185.149.600	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12 Dokumen		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12 Dokumen		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	75 Sarana		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	75 Sarana		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Pduksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Prduk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Pduksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Prduk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	12 Dokumen		
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	Padang Pariaman	Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syaat sesuai standar	12 Dokumen	17.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	Padang Pariaman	Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syaat sesuai standar	12 Dokumen	17.000.000	



RENCANA KERJA 2026

	(DAM)					(DAM)					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Padang Pariaman	Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	25 Dokumen		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Padang Pariaman	Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	25 Dokumen		
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Padang Pariaman	Jumlah Stiker yang diterbitkan pada Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Stiker		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Padang Pariaman	Jumlah makanan siap saji yang di awasi	10 Stiker		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	7.500.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Padang Pariaman	Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang diawasi	12 Dokumen	7.500.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah IRTP yang memenuhi standar	70 IRTP		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	umlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	70 IRTP		
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Padang Pariaman	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70 Sarana		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Padang Pariaman	Jumlah Stiker yang diterbitkan pada Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	70 Sarana		
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25 Data	234.768.600	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Padang Pariaman	Jumlah Stiker yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Pengendalian dan Pengawasan	25 Data	234.768.600	



RENCANA KERJA 2026

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Padang Pariaman	Persentase Rumah Tangga PHBS	78%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Padang Pariaman	Persentase Rumah Tangga PHBS	78%		
	Padang Pariaman	Persentase puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok asuh mandiri kesehatan tradisional	100%			Padang Pariaman	Persentase puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok asuh mandiri kesehatan tradisional	100%		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah pedoman/regulasi/reko mendasi kebijakan penerapan GERMAS	2 Kebijakan		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah pedoman/regulasi/reko mendasi kebijakan penerapan GERMAS	2 Kebijakan		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	15 Dokumen	79.480.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	15 Dokumen	79.480.000	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS	103 Nagari		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS	103 Nagari		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	15 Dokumen	29.740.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	15 Dokumen	29.740.000	
	Padang Pariaman	Jumlah keluarga PHBS dengan penerapan yankestrad	1 180 Keluarga			Padang Pariaman	Jumlah keluarga PHBS dengan penerapan yankestrad	1 180 Keluarga		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan	789 Posyandu	71.473.770	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan	789 Posyandu	71.473.770	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	789 Posyandu		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	789 Posyandu		



2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Namun dalam proses ini Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.10

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun	0,8
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	70.00
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,4
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	94
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	100
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	100
		Persentase Faskes dengan Nilai Indeks Nasional Mutu (INM) 100 %	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	100
		Persentase Lanjut usia Yang Mandiri	87,5



RENCANA KERJA 2026

		Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun	12,4
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	99
		Angka Kematian Balita	15
		Angka Kematian Bayi	12,62
		Angka Kematian Neonatal	9,2
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga Medis terhadap populasi	100
		Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	100
		Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya Efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	10
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	100
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	10



RENCANA KERJA 2026

		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	70,00
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	10

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.



RENCANA KERJA 2026

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

**RENCANA KERJA 2026**

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026



Tabel 3.2

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial



RENCANA KERJA 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun



RENCANA KERJA 2026

2026 adalah " **Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien**" dengan Indikator Tujuan " **Angka Usia Harapan Hidup**"

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :



RENCANA KERJA 2026

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	84
2	Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.224
		Angka Kematian Ibu		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Paripurna	%	52
		Prevalensi Stunting		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) terakreditasi Paripurna	%	100
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	85
			Meningkatnya Pemerataan pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100
		Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga Medis terhadap populasi		Per 1000 Penduduk	5.3	
		Cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		%	94	



3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti



pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

untuk tahun 2026 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :



Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 (TC 33)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					150,812,803,697				168,441,022,067
1.02 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Dinas Kesehata n	100 %	104,623,126,884			100 %	104,774,061,267
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Kesehata n	A				A	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Dinas Kesehata n	100 %				100 %	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dinas Kesehata n	6 dokumen	50,000,000	DAU		5 dokumen	50,000,000
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Dinas Kesehata n	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	6 dokumen	25.000.000	DAU		2 dokumen	25.000.000
1.02.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	26 dokumen	-	DAU		26 dokumen	-
1.02.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	26 dokumen	-	DAU		26 dokumen	-
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	26 dokumen	-	DAU		26 dokumen	-
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	26 dokumen	-	DAU		26 dokumen	-
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	12 laporan	25.000.000	DAU		12 laporan	25.000.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	4 laporan	-	DAU		4 laporan	--
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Dinas Kesehatan	15 Laporan	104,092,217,884	DAU		15 Laporan	104,056,061,267
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	7899 Orang/Bulan	103.221.137.884	DAU		7899 Orang/Bulan	103,169,981,267
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	771.080.000	DAU		12 Dokumen	771.080.000
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	15 Dokumen	20.000.000	DAU		15 Dokumen	20.000.000
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	15 Dokumen	20.000.000	DAU		15 Dokumen	20.000.000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Dinas Kesehatan	1 laporan	20.000.000	DAU		1 laporan	25.000.000



		Keuangan Akhir Tahun SKPD							
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	20.000.000	DAU		2 Dokumen	25.000.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	15 laporan	-	DAU		15 laporan	-
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan	15 Dokumen	20.000.000	DAU		15 Dokumen	25.000.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Dinas Kesehatan	102 Orang	49,997,000	DAU		123 Orang	45,000,000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala		921 Orang				931 Orang	
		Jumlah SKP ASN		946 Orang				946 Orang	
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TP		946 Orang				946 Orang	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	10 Unit	-	DAU		10 Unit	-
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	90 Paket	-			95 Paket	-
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	10 Dokumen	-			10 Dokumen	-
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	10 Dokumen	-			10 Dokumen	-
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	10 Dokumen	-			10 Dokumen	-
1.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Dinas Kesehatan	5 Orang	-			5 Orang	-
1.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawaiin Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas Kesehatan	1 Laporan	-			1 Laporan	-
1.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Dinas Kesehatan	20 Orang	-			20 Orang	-
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan	45 Orang	25.000.000	DAU		50 Orang	25.000.000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	75 Orang	10.000.000	DAU		80 Orang	-
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	75 Orang	14.997.000	DAU		80 Orang	20.000.000
1.02 . 1.02.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Dinas Kesehatan	2451 Surat	177,000,000	DAU		2461 Surat	228,000,000
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		7 Pelayanan				7 Pelayanan	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	15.000.000	DAU		1 Paket	20,000,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	15.000.000	DAU		1 Paket	23,000,000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	18.200.000	DAU		1 Paket	20,000,000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Bahaqn Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logitik Kantor Yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	-	DAU		1 Paket	10.000.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	15.000.000	DAU		1 Paket	25,000,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	5 Dokumen	-	DAU		5 Dokumen	-
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	-	DAU		1 Paket	-
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	13 Laporan	13.800.000	DAU		13 Laporan	20,000,000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	13 Laporan	100.000.000	DAU		13 Laporan	110,000,000
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Dinas	25 Dokumen	-	DAU		25 Dokumen	-



		SKPD	Kesehatan					
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	4 Dokuemn	-	DAU	4 Dokuemn	-
1.02 . 1.02.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Dinas Kesehatan	Rp. 80.000.000	0	DAU	12 Unit	65.000.000,00
1.02.1.02.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Roda 4/1 Roda 2	-	DAU	1 Roda 4/1 Roda 2	-
1.02.1.02.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-
1.02.1.02.01.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-
1.02.1.02.01.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-
1.02.1.02.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	-	DAU	1 Paket	20.000.000,00
1.02.1.02.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-
1.02.1.02.01.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-
1.02.1.02.01.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Dinas Kesehatan	2 Paket	-	DAU	2 Paket	-
1.02.1.02.01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-
1.02.1.02.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	25.000.000,00
1.02.1.02.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-
1.02.1.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Dinas Kesehatan	12 Bulan	228,912,000	DAU	12 Bulan	255,000,000
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		12 Bulan			12 Bulan	
1.02.1.02.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	13 laporan	-	DAU	13 laporan	10,000,000
1.02.1.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 laporan	222.000.000	DAU	1 laporan	235,000,000
1.02.1.02.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 laporan	-	DAU	1 laporan	-
1.02.1.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12 laporan	6.912.000	DAU	12 laporan	10.000.000
1.02.1.02.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	1 Paket	25,000,000	DAU	2 Paket	75,000,000
1.02.1.02.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan	0	-	DAU	12 Bulan	-
1.02.1.02.01.09.02	Penyediaan Jasa emeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan	0	-	DAU	0	-
1.02.1.02.01.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Dinas Kesehatan	0	-	DAU	0	-
1.02.1.02.01.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Dinas Kesehatan	0	-	DAU	0	-
1.02.1.02.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Kesehatan	12 Unit	-	DAU	12 Unit	-
1.02.1.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Kesehatan	12 Unit	-	DAU	12 Unit	-
1.02.1.02.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan	12 Unit	-	DAU	12 Unit	-
1.02.1.02.01.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dinas Kesehatan	12 Unit	-	DAU	12 Unit	-



1.02.1.02.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	1 Gedung/Tahun	25.000.000	DAU		1 Gedung/Tahun	25.000.000
1.02.1.02.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	1 Sarana/Tahun	-	DAU		1 Sarana/Tahun	-
1.02.1.02.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	1 Sarana /Tahun	-	DAU		1 Sarana /Tahun	25,000,000
1.02.1.02.01.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Dinas Kesehatan	1000 M2	-	DAU		1000 M2	
1.02.1.02.01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	25 Puskesmas	-	DAU		25 Puskesmas	-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan	25 Puskesmas			25 Puskesmas		
1.02 .02 1.02.02.2.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	25 orang	42,683,896,513	DAU		25 orang	52,627,960,800
		Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit		145 Tempat Tidur				145 Tempat Tidur	
		Indeks Kepuasan masyarakat		A				A	
		Persentase Sampel Air yang diperiksa		100 %				100 %	
		Persentase sediaan farmasi yang dikelola		100 %t				100 %t	
		Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda		60%				60%	
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial		100%				100%	
		Jumlah ketersediaan data dalam profil kesehatan		100%				100%	
		Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga		100%				100%	
		Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2%		100%				100%	
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional		100%			100%		
		Angka Kematian Ibu	8 Orang			8 Orang			
		Angka Kematian Bayi	45 Orang			44 Orang			
		Prevalensi Stunting	14%			14%			
		Persentase kecamatan sehat	88.24%			94.12%			
		Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas	100%			100%			
		Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus	1093 Orang			1202 Orang			
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkesmas, FKTP, dan RS) yang melaporkan hasil surveilans	100%			100%			
		Persentase penduduk sesuai kelompok umur yang mendapatkan pelayanan imunisasi	100%			100%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah RS yang diawasi		1 RS			1 RS
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan				3 Sarana			3 Sarana		
Persentase Depot Air Minum yang diperiksa				100%			100%		
Jumlah Pengadaan Obat dan BMHP				2 paket			2 paket		
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan				3 paket			10 paket		
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU		1 Unit	15.000.000.000
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Dinas Kesehatan	1 Unit	2.097.284.184	DAU		1 Unit	3.000.000.000
1.02.02.2.01.03	Pembanguna Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Dinas Kesehatan	1 Unit	2.900.000.000	DAU		1 Unit	1.500.000.000
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang	Dinas	1 Unit	-	DAU		1 Unit	250.000.000

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



		dibangun	Kesehatan						
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	3 Unit	799.987.968	DAK		3 Unit	2.000.000.000
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	3 Unit	106.409.880	DAU		3 Unit	150,000,060
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU		1 Unit	1.000.000.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Dinas Kesehatan	3 Unit	434.000.000	DAU		5 Unit	1,000,000,000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	2 Unit	2.525.701.500	DAU		2 Unit	1.500,000,000
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Kesehatan	5 Unit	-	DAU		5 Unit	1.000.000.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Dinas Kesehatan	2 Unit	-	DAU		2 Unit	-
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Dinas Kesehatan	5 Unit	-	DAU		5 Unit	-
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	3 unit	2.084.836.620	DAU		3 unit	1,200,000,000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Dinas Kesehatan	13 Unit	1.399.533.500	DAU		25 Unit	215,000,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	5.921.756.257	DAU		1 Paket	5.549.862.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	-	DAK		1 Paket	-
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Dinas Kesehatan	2 Unit	-	DAU		2 Unit	-
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Dinas Kesehatan	2 Unit	-	DAU		2 Unit	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	25 Unit	65.436.000	DAU/DAK		25 Unit	360,000,000
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	4 Paket	100.000,000	DAU/DAK		4 Paket	90,000,000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		12 Dokumen			12 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas		12 Dokumen			12 Dokumen		
		Jumlah dokumen administrasi Labkesda		12 Dokumen			12 Dokumen		
		Jumlah dokumen administrasi IFK		12 Dokumen			12 Dokumen		
		Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional		25 puskesmas			25 puskesmas		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan		25 puskesmas			25 puskesmas		
		Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal		25 puskesmas			25 puskesmas		
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan		25			25		



		kedokteran keluarga layanan primer		puskesmas			puskesmas		
		Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90%		1 RS			1 RS		
		Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine		25 fasyankes			25 fasyankes		
		Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119		25 puskesmas			25 puskesmas		
		Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratannya dengan PSC 119 (100%)		1 RS			1 RS		
		Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal		4 Kegiatan			4 Kegiatan		
		Prevalensi balita wasting		7.0%			7.0%		
		Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana		58 Orang			58 Orang		
		Jumlah peserta KB Aktif		41.876 Orang			68.152 Orang		
		Jumlah Lansia yang dilakukan skrining kesehatan		58.125 Orang			58.130 Orang		
		Jumlah nagari dengan stob buang air besar sembarangan (SBS)		67 Nagari			68 Nagari		
		Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis		25 puskesmas			25 puskesmas		
		Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar		75 TFU			85 TFU		
		Jumlah media KIE yang dibuat		3156 KIE			3156 KIE		
		Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular		74.074 Orang			84.098 Orang		
		Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus Tuberkulosis		1093 kasus			1113 Kasus		
		Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV)		87 Kasus			95 kasus		
		Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar		25 Tatalaksana			25 Tatalaksana		
		Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular		33895 Orang			33895 Orang		
		Jumlah kegiatan surveilan epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB		7 kegiatan			7 kegiatan		
		Jumlah kejadian ikutan pasca iminisasi (KIPI)		7 Kejadian			7 Kejadian		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehaan sesuai standr	Dinas Kesehatan	8.094 Orang	91.179.000	DAU/DAK	9780 Orang		150,000,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	7.726 Orang	123.028.000	DAU	9.402 Orang		40,000,000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	7.358 Orang	37.500.000	DAU	8960 Orang		35,000,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	35.892 Orang	21.800.000	DAU	31.827 Orang		22,500,000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	8.777 Orang	35.750.000	DAU	82.852 Orang		31,500,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Pada Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	39.721 Orang	31.400.000	DAU	279.738 Orang		36,500,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	59.601 Orang	40.000.000	DAU	59.976 Orang		31,400,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	100 Orang	34.500.000	DAU	84.098 Orang		35,600,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	25 orang	37.500.100	DAU	2710 orang		457,500,000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Keehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	897 Orang	13.500.000	DAU	907 orang		15,000,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	2.619 Orang	38.250.000	DAU/DAK	2.719 Orang		2.745,000,000



1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	10.001 Orang	41.500.000	DAU/DAK	0.17/1000 penduduk	250,000,000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	30.000.000	DAU	12 Dokumen	31,575,000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	31,900,000	DAU	12 Dokumen	25,000,000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	1.422.810.900	DAU/DAK	4000 Dokumen	565,700,000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	24 Dokumen	22.500.000	DAU	24 Dokumen	105,000,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	60 Dokumen	2.115.637.500	DAU/DAK	12 Dokumen	575,000,000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	441.820.000	DAU	12 Dokumen	176,580,000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	25 Dokumen	80.000.000	DAU	25 Dokumen	77,000,000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	54.778.000	DAU	12 Dokumen	278,000,000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	3538 Orang	27.600.000	DAU	3638 Orang	155,000,000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	162 Orang	27.600.000	DAU	172 Orang	155,000,000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	4 Dokumen	-	DAU	4 Dokumen	-
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen	15.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	24 Dokumen	2.198.717.002	DAU/DAK	24 Dokumen	525,000,000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	4 Dokumen	16,007,096,000	DAU	4 Dokumen	16,061,270,500
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Dinas Kesehatan	250 Orang	20.000.300	DAU	260 Orang	25,000,000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	40 Paket	37.853.000	DAU	40 Paket	35,000,000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	104 Dokumen	35.700.000	DAU/DAK	104 Dokumen	675,000,000
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dinas Kesehatan	10 Puskesmas	-	DAU	15 Puskesmas	-
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen	-
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Dokumen	1.921.356.500	DAU	25 Dokumen	2.241.356.500
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000	DAU	1 Dokumen	700.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	69.999.800	DAU/DAK	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	85.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Dinas Kesehatan	7 laporan	86.200.020	DAU	7 laporan	95,000,000



	Obat Massal)	Pemberian Obat Massal)							
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	4 Dokumen	25.000.000	DAU	4 Dokumen		37,500,000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	1 Unit	-	DAU	1 Unit		10.000.000
1.02.02.2.02.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000	DAU	1 Dokumen		30.000.000
1.02.02.02.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehata n	172 Dokumen	116,462,500	DAU	169 Dokumen		246,400,000
1.02.02.02.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	169 Dokumen	-	DAU	169 Dokumen		246,400,000
1.02.02.02.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	25 dokumen	300,000,000	DAU	25 dokumen		325,000,000
1.02.02.02.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistim Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	Dinas Kesehatan	25 alat	-	DAU	25 alat		-
1.02.02.2.04	Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	25 Puskesmas	304,991,000	DAU	25 Puskesmas	360.000.000	
		Jumlah klinik pratama terakreditasi		9 Klinik			9 Klinik		
		Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan		38 Sarana			38 Sarana		
		Jumlah FKTP dengan rasio rujukan non spesialisik kurang dan sama dengan 2%		25 puskesmas		DAU	25 puskesmas		
		Jumlah FKTP dengan penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit		25 puskesmas dan 1 RS		DAU	25 puskesmas dan 1 RS		
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasilitas Kesehatan melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		10 Puskesmas		DAU	10 Puskesmas		
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan	1 RS	26.000.000	DAU	1 RS		20.000.000
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	1 RS	15.980.000	DAU	1 RS		12.500.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	228.011.000	DAU	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik		313.000.000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	25 Dokumen	35.000.000	DAU	25 Dokumen		14,500,000
1.02 .03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis		60%	2,953,561,000		70%		2,945.500.000
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin praktek medis dan nakes yang diberikan	Dinas Kesehata n	1947 Rekomenda si	67,000,000	DAU	900 Rekomenda si		36,000,000
1.02.03.2.01. 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	1947 Dokumen	42.000.000	DAU	2190 Dokumen		19,000,000
1.02.03.2.01. 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	1947 Dokumen	25.000.000	DAU	2190 Dokumen		17,000,000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas	100 Nakes	1,112,420,000	DAU	85 Nakes		1,409,500,000



	Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota		Kesehat n						
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	25.670.000	DAU	2 Dokumen		19,000,000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan	100 Orang	1.016.950.000	DAU	120 Orang		1,100,000,000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 Dokumen	69.800.000	DAU	120 Dokumen		290,500,000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan	Dinas Kesehatan	565 orang	1.774,141,000	DAU	450 orang		1.500.000,000
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan	565 orang	1.774,141,000	DAU	450 orang		1.500.000,000
1.02..04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Dinas Kesehatan	20%	316,439,600	DAU	20%		341,000,000
		Persentase IRT yang memiliki SPPIRT	Dinas Kesehatan	70%			75%		
		Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang di awasi	Dinas Kesehatan	75%			85%		
1.02.04.2.01	Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT yang memiliki izin	Dinas Kesehatan	75 Sarana	45,300,000	DAU	75 Sarana		120,000,000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	45.300.000	DAU	12 Dokumen		120,000,000
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	34 Sarana	-	DAU	35 Sarana		-
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Dinas Kesehatan	35 Sarana	-	DAU	36 Sarana		-
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah SPPIRT yang diterbitkan	Dinas Kesehatan	70 SPPIRT	-	DAU	70 SPPIRT		186.000.000-
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu an PKRT 1 Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	3 Dokumen	-	DAU	3 Dokumen		186.000.000
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen		-
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pengawasan sarana produksi PKRT	Dinas Kesehatan	70 Sarana	-	DAU	70 Sarana		19,250,000
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	Dinas Kesehatan	3 Dokumen	-	DAU	3 Dokumen		19,250,000



	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	75 sarana	15,000,000	DAU	75 sarana		15,000,000
		Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar		75 Sarana Air Minum			75 Sarana Air Minum		
		Jumlah makanan siap saji yang di awasi		100 Makanan Siap Saji			100 Makanan Siap Saji		
		Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang diawasi		100 Sarana			100 Sarana		
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	15.000.000		12 Dokumen		15,000,000
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan yang diterbitkan		10 Sticker	-	DAU	10 Sticker		10,000,000
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen		10,000,000
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	70 IRTP	256,139,600	DAU	30 Pemeriksaan		10,000,000
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	70 Sarana	256.139.600	DAU	80 Sarana		10,000,000
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	25 data	-	DAU	30 data		-
1.02 .05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	Dinas Kesehatan	78%	235,139,600	DAU	80%		10,000,000
		Persentase puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional		100%		DAU	100%		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan GERMAS	Dinas Kesehatan	2 Kebijakan	124,779,900	DAU	2 Kebijakan		110,000,000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	15 Dokumen	124.779.900	DAU	15 Dokumen		,728,000
1.02.05.2.01.02	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam penanganan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	-		1 Dokumen		10.000.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS	Dinas Kesehatan	103 Nagari	27,500,000	DAU	103 Nagari		10,000,000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	15 Dokumen	27.500.000	DAU	15 Dokumen		10,000,000
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesedaran Keluarga dalam Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesedaran Keluarga dalam Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Seha	Dinas Kesehatan	565 Keluarga	-	DAU	565 Keluarga		7.500.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan	Dinas Kesehatan	789 Posyandu	25,000,000	DAU	789 Posyandu		27,500,000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	789 Dokumen	83.499.800	DAU	789 Dokumen		625,000,000



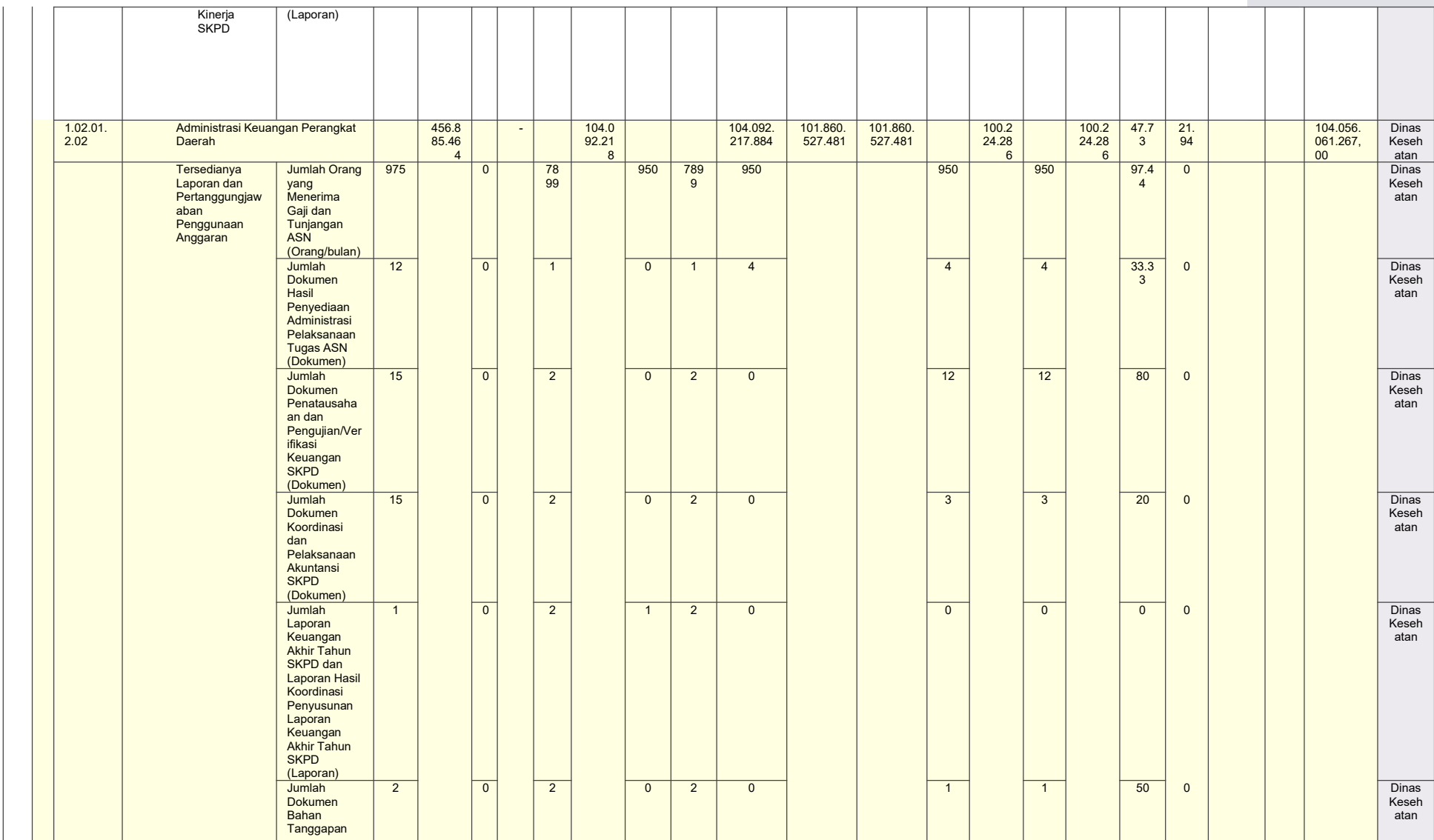
BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

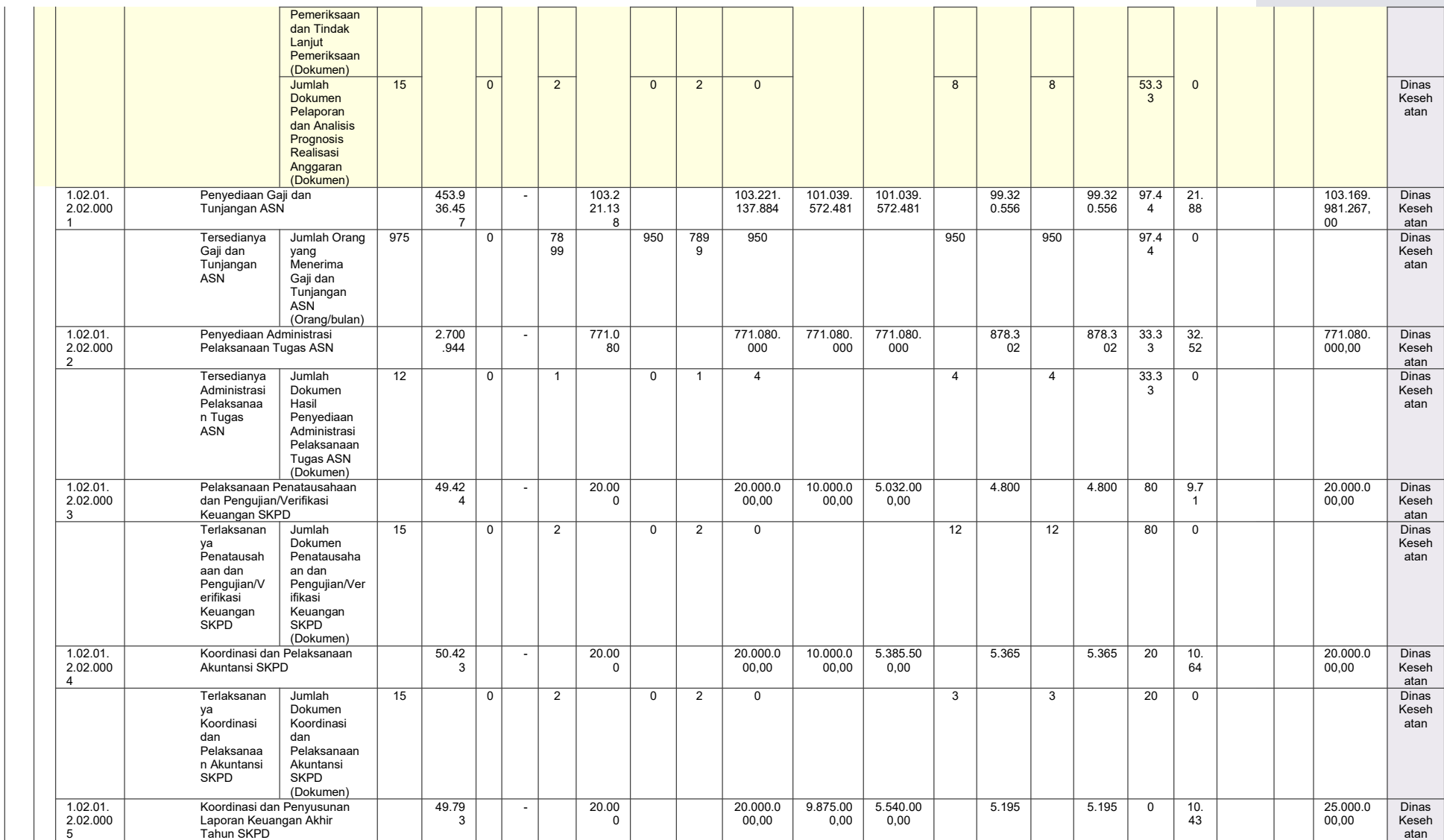
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA- SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perencanaan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Peningkatan Penggunaan Jawab	
										Target 2026		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
				K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			930.8 29.56 1		-		151.0 68.94 3				36.321.0 47			148.9 97.57 6		148.9 97.57 6	232. 92	16. 01		174.857. 066.600, 00	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			459.3 95.81 9		-		104.6 23.12 7				28.189.2 37			100.4 76.23 5		100.4 76.23 5	26.2	21. 87	DINAS KESEHATAN	108.195. 431.267, 00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (Persen)	100		0		100		25	100	104.623. 126.884	104.623. 126.884	105.615. 317.051	25		25		25	0			Dinas Kesehatan
			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	85		0		100		0	100				0		0		0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100		0		100		100	100				100		100		100	0			Dinas Kesehatan



			(Persen)																				
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			216.843		-		50.000		50.000.000	18.850.000	18.850.000		2.865		2.865	18.33	1.32			50.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		2		1	2	2		1		1		20	0				Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		0		3		2	3	4				2			2				
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.111		-		25.000		25.000.000	9.875.000	4.926.375		2.865		2.865	20	2.6			25.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		2		1	2	25.000.000	9.875.000	4.926.375	1		1	20	0				Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			106.732		-		25.000		25.000.000	8.975.000	4.727.600		-		-	16.67	0			25.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		0		3		2	3	4		2		2		16.67	0				Dinas Kesehatan



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		2		1	2	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			48.000		-		20.000			20.000.000,00	10.000.000,00	5.061.000,00		4.940		4.940	50	10.29			25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2		0		2		0	2	0			1		1		50	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50.423		-		20.000			20.000.000,00	10.000.000,00	5.323.500,00		5.128		5.128	53.33	10.17			25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	15		0		2		0	2	0			8		8		53.33	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			232.450		-		49.997			49.997.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		12.508		12.508	10	5.38			45.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	90		0		50		8	50	9			9		9		10	0				Dinas Kesehatan
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60		0		567		0	567	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan



			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	85		0		57		16	57	16			17		17		20	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			137.577		-		25.000			25.000.000,00	16.000.000,00	8.225.000,00		6.088		6.088	10	4.43			25.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	90		0		50		8	50	9			9		9		10	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			45.423		-		10.000			10.000.000,00	5.000.000,00	2.808.620,00		-		-	0	0			0	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60		0		567		0	567	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			49.450		-		14.997			14.997.000,00	7.000.000,00	3.650.000,00		6.420		6.420	20	12.98			20.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	85		0		57		16	57	16			17		17		20	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			501.272		-		177.000			177.000.000,00	75.769.279,00	75.769.279,00		49.168		49.168	12.82	9.81			228.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0	1	1			0		0		0	0				Dinas Kesehatan



			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0	1	0			0		0		0					Dinas Keseh atan	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0	1	1			0		0								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0	1	5			0		0								
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	13		0		1		0	1	4			5		5							38,46	0
			Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		0		1		0	1	4			5		5							38,46	0
			1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				78.241			-				15.000									15.000.000,00	7.500.000,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0	1	1			0		0		0	0			Dinas Keseh atan			
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		-		15.000		15.000.000,00	0,00	0,00		-		-	0	0			23.000.000,00	Dinas Keseh atan				
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0	1	0			0		0	0	0				Dinas Keseh atan			
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		49.257		-		18.200		18.200.000,00	9.800.000,00	7.838.100,00		7.647		7.647	0	15.52			20.000.000,00	Dinas Keseh atan				



	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0	1	1			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			64.616		-		15.000			15.000.000,00	8.900.000,00	4.442.500,00		4.443		4.443	0	6.88			10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0	1	5			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			67.676		-		13.800			13.800.000,00	9.569.279,00	4.769.279,00		7.366		7.366	38.46	10.88			25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	13		0		1		0	1	4			5		5		38.46	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			241.483		-		100.000			100.000.000,00	40.000.000,00	26.582.600,00		26.023		26.023	38.46	10.78			110.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		0		1		0	1	4			5		5		38.46	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.891		-		-			0,00	8.025.721,00	8.025.721,00		-		-	0	0			20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		5		0	5	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.891		-		-			0,00	8.025.721,00	4.000.000,00		-		-	0	0				Dinas Kesehatan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		0		5		0	5	0			0		0		0	0			20.000.000,00	Dinas Kesehatan



			(Unit)																					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.288.735		-		228.912				50.571			179.158		179.158	12.5	13.9			235.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		1	1	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0				Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.204.030		-		222.000			222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00		172.867		172.867	0	14.36			235.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		1	1	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84.705		-		6.912			6.912.000,00	6.290.496,00	6.290.496,00		6.290		6.290	25	7.43				Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0				Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			190.164		-		25.000			25.000.000,00	36.055.500,00	36.055.500,00		8.250		8.250	50	4.34			75.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	1		0		15		0	15	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan



		Pemerintahan Daerah	ehabilitasi (Unit)																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1		0		1		0	1	0			1		1		100	0		
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			86.942		-		25.000		25.000.000,00	19.530.000,00	9.750.000,00		-		-	0	0		25.000.000,00	Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1		0		15		0	15	0		0		0		0	0			Dinas Keseh atan
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			103.222		-		-		0,00	16.525.500,00	8.250.000,00		8.250		8.250	100	7.99		25.000.000,00	Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1		0		1		0	1	0		1		1		100	0			Dinas Keseh atan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			460.064.988		-		42.683.897		42.683.896.513,00	44.730.769.949,00	51.096.969.597,59		46.604.076		46.604.076	369.75	10.13	DINAS KESEHATAN	62.591.645.333,00	Dinas Keseh atan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)			0		100		32,06	100	90,13			278,48		278,48		0	0		Dinas Keseh atan
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,05		0											0		0	0		Dinas Keseh atan



			Prevalensi Stunting (Persen)		0	14		14				0	0	0			Dinas Keseh atan
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	0			43,8 8		97,6		99, 97	99, 97	99,9 7	0		Dinas Keseh atan
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	0			97,6 6		99,69		100	100	100	0		Dinas Keseh atan
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,9 6	0								0	0	0		Dinas Keseh atan
			Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	70, 05	0								0	0	0		Dinas Keseh atan
			Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun (%)	7,4	0								0	0	0		Dinas Keseh atan
			Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas (Persen)		0	10 0			100				0	0	0		Dinas Keseh atan
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	0			100		100		100	100	100	0		Dinas Keseh atan
			Jumlah ketersediaan data dalam profil kesehatan (Data)		0	16 9		87	169	0		87	87	0	0		Dinas Keseh atan

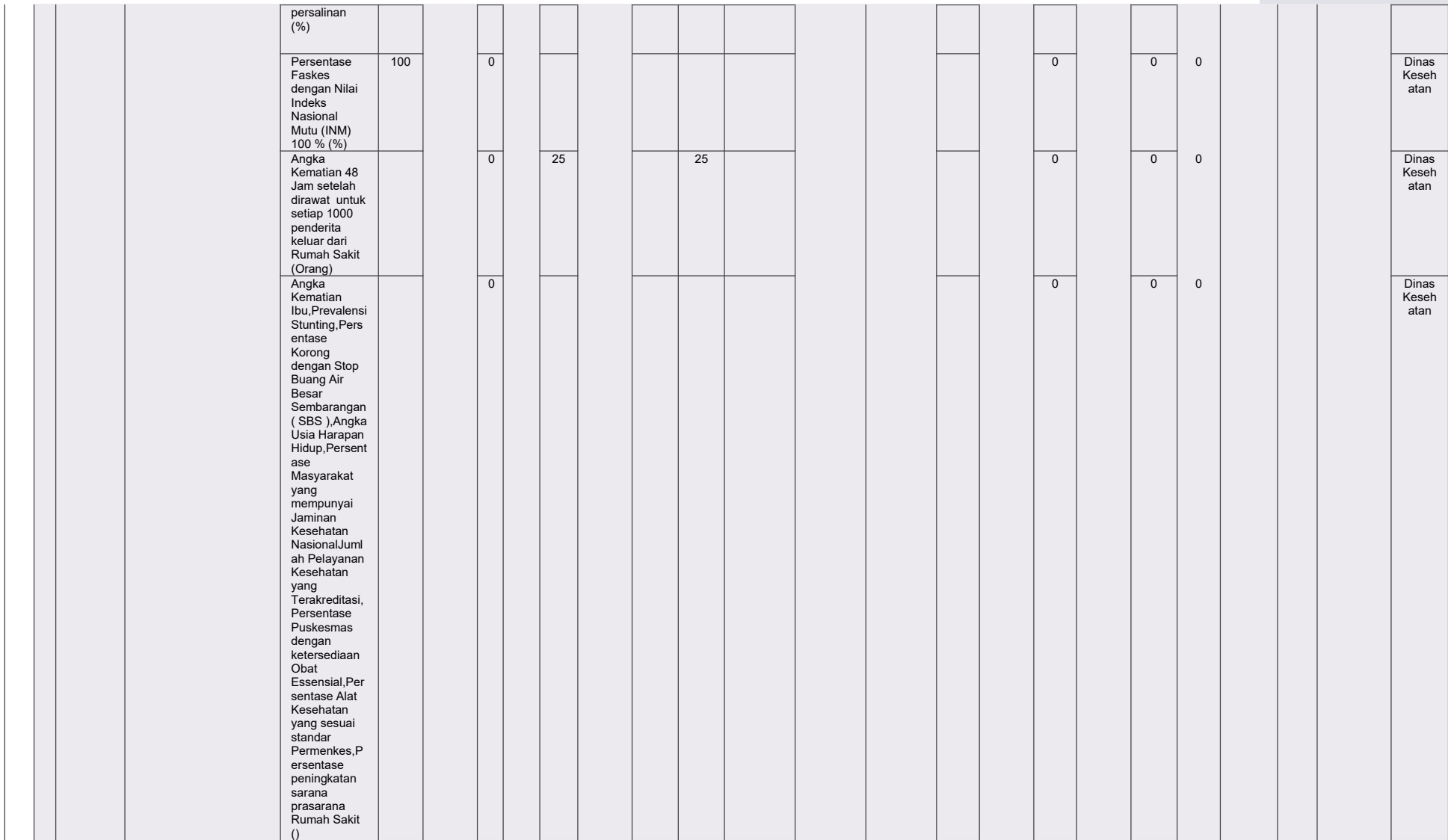


			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial (Persen)		0	100	100	100		400	400	0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	0		18,5	75,07		99,98	99,98	99,98	0			Dinas Kesehatan
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	0		44,72	119,05		140,15	140,15	140,15	0			Dinas Kesehatan
			Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda (Persen)		0	60		60			0	0	0			Dinas Kesehatan
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	0						0	0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	0		11,7	76,1		98,43	98,43	98,43	0			Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	7,2	0						0	0	0			Dinas Kesehatan



			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	0			29,41		83,37			100		100		100	0			Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga (Persen)		0		100		100						0		0	0			Dinas Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus (Orang)		0		1202		1202						0		0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase kecamatan sehat (Persen)		0		94,12		94,12						0		0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	0			20,04		78,72			99,97		99,97		99,97	0			Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Balita (Orang)	11,9	0		44		44						0		0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase Sampel Air yang diperiksa (Persen)		0		100		100						0		0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	0			33,54		107,35			128,93		128,93		128,93	0			Dinas Kesehatan
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4	0										0		0	0			Dinas Kesehatan
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100	0			20,01		79,18			99,97		99,97		99,97	0			Dinas Kesehatan

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

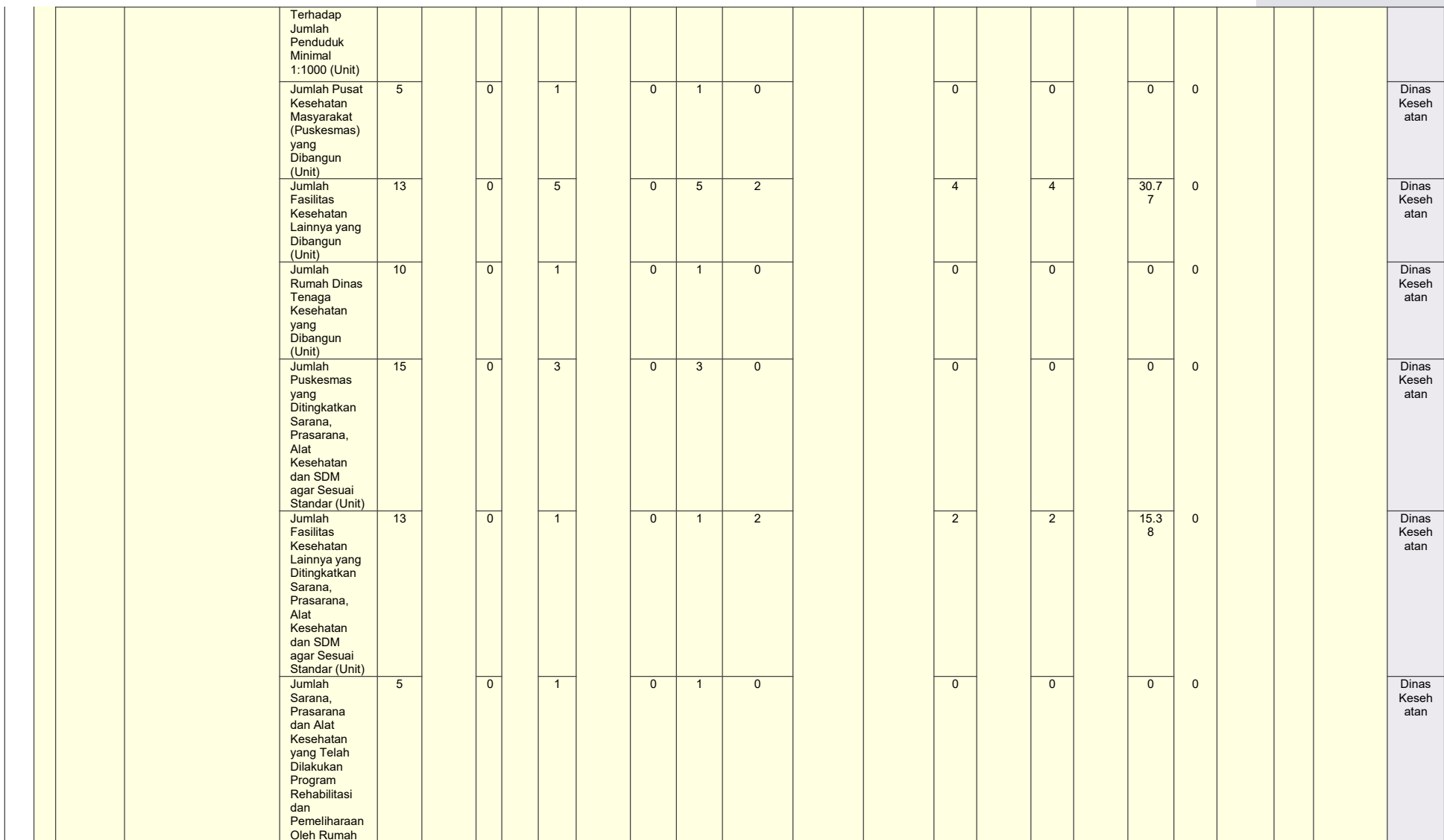


© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116

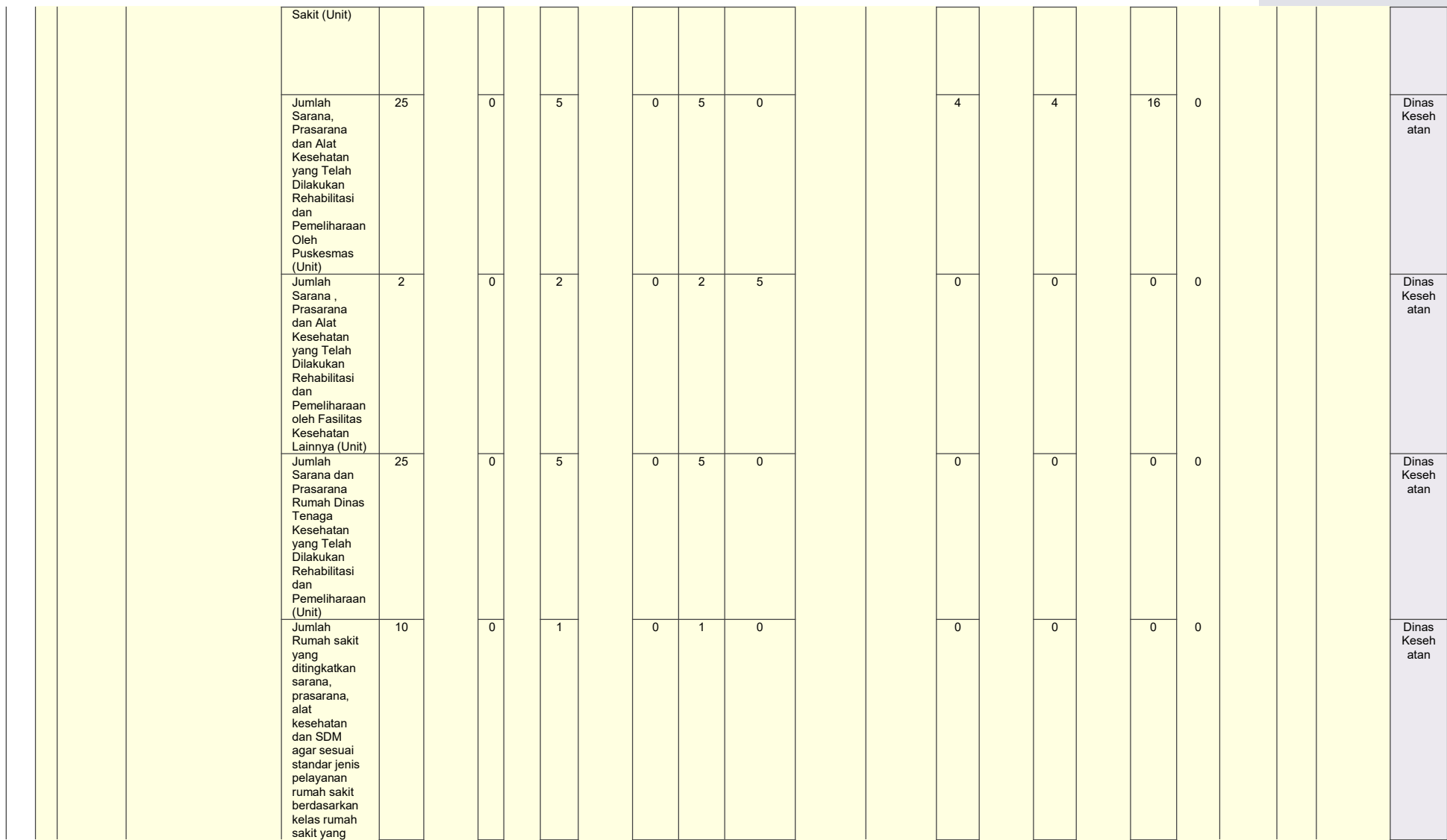


			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100		0									0		0	0					Dinas Keseh atan				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100		0											19,5 2	79,05					99, 97	99, 97	99.9 7	0	Dinas Keseh atan
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,8		0																	0	0	0	Dinas Keseh atan	
			Indeks Kepuasan masyarakat (Nilai)			0									10 0			100					0	0	0	Dinas Keseh atan	
			Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit (Tempat Tidur)			0									14 5			145					0	0	0	Dinas Keseh atan	
			Persentase Lanjut usia Yang Mandiri (%)	89, 5		0																	0	0	0	Dinas Keseh atan	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100		0											23,0 8	83,27					99, 93	99, 93	99.9 3	0	Dinas Keseh atan
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		0											24,1	82,17					99, 98	99, 98	99.9 8	0	Dinas Keseh atan
	1.02.02. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		275.5 41.09 6		-		18.43 4.946	18.434.9 45.909	20.636.0 55.832	20.636.0 55.832		22.63 8.277	22.63 8.277	19.2	8.2 2		33.814.8 62.000,0 0	Dinas Keseh atan								
		Tertersedianya pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	5		0		1	0	1	0		1	1	20	0			Dinas Keseh atan								

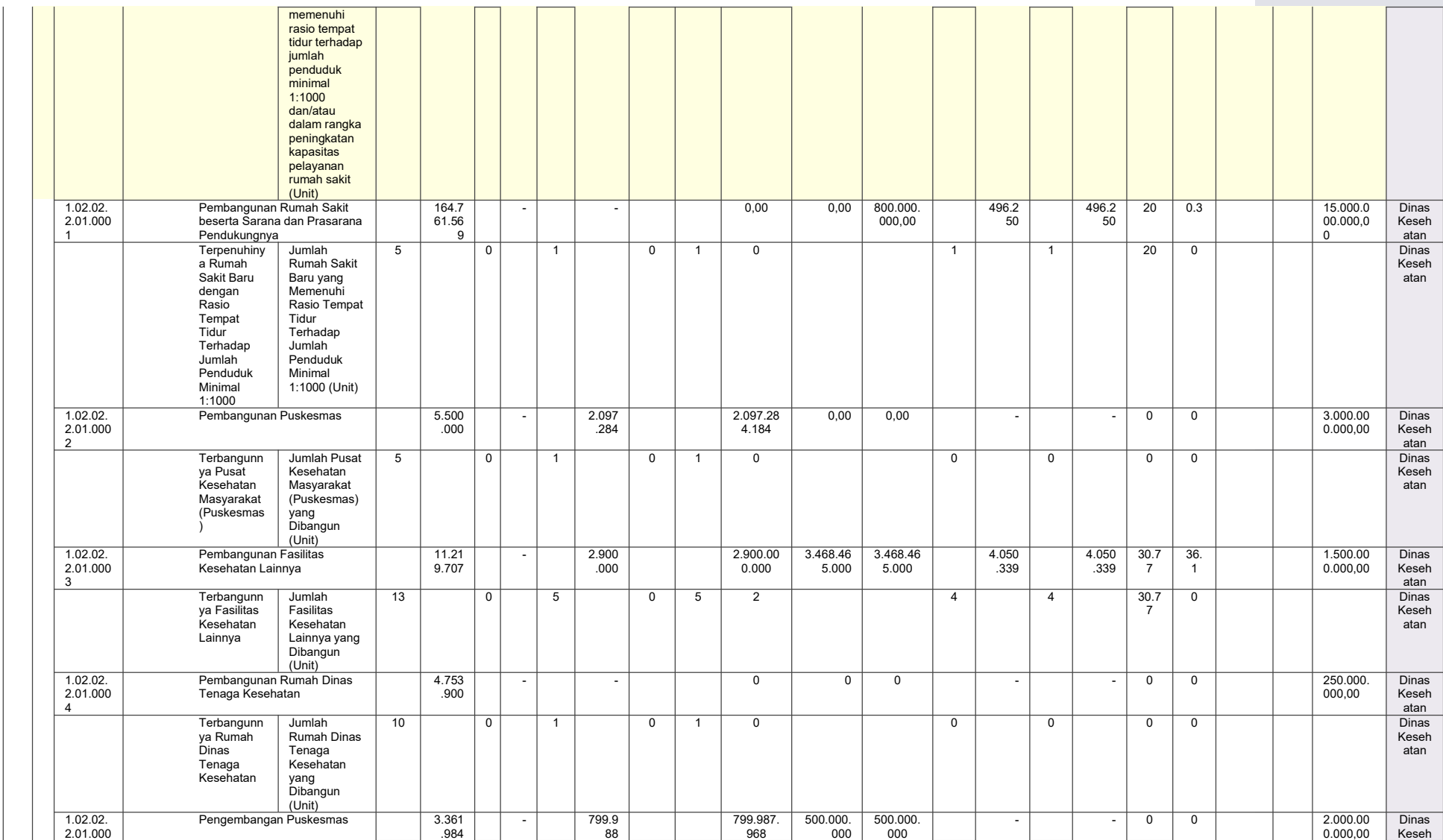
**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings, 101 Philip Drive, Assinippi Park, New York, NY 10986-1997. Printed in the United States of America. 0-321-85021-3



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



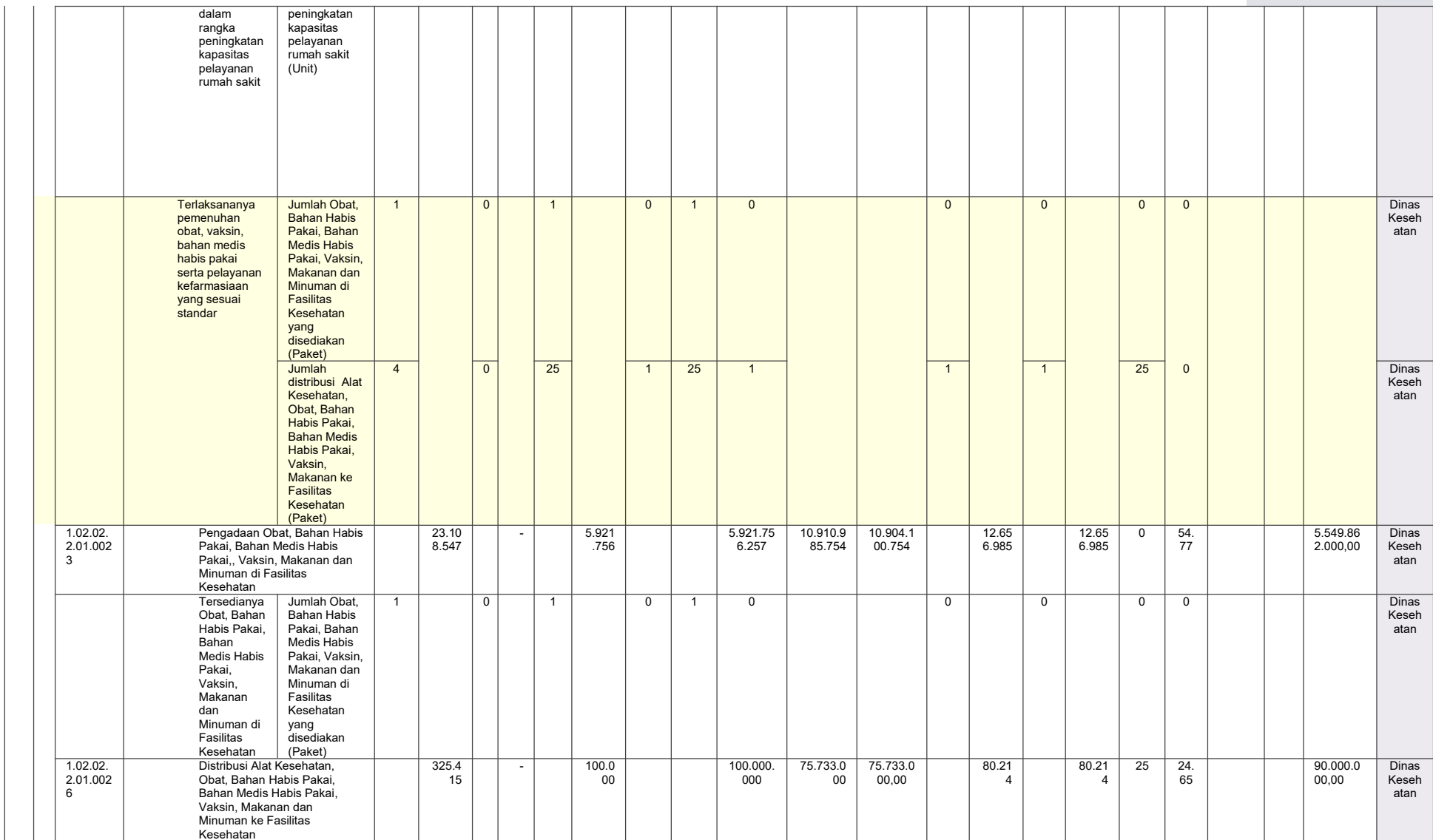
**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



6																							atan
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	15		0		3		0	3	0			0		0		0	0				Dinas Keseh atan
1.02.02. 2.01.000 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.473 .336		-		106.4 10		106.409. 880,00	0,00	0,00		106.4 10		106.4 10	15.3 8	1.1 2			150.000. 000,00	Dinas Keseh atan	
	Terlaksanan ya Pengemban gan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	13		0		1		0	1	2			2		2		15.3 8	0			Dinas Keseh atan	
1.02.02. 2.01.000 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			3.160 .876		-		-			-			-		-	0	0			1.000.00 0.000,00	Dinas Keseh atan	
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	5		0		1		0	1	0			0		0		0	0			Dinas Keseh atan	
1.02.02. 2.01.000 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			6.094 .904		-		434.0 00			-			1.490 .255		1.490 .255	16	24. 45			1.000.00 0.000,00	Dinas Keseh atan	
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	25		0		5		0	5	0			4		4		16	0			Dinas Keseh atan	



1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12.621.433	0	-	2	2.525.702	0	2	2.525.701.500	4.226.358.078	4.073.668.077,00	0	3.270.319	0	3.270.319	0	25.91		1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	2		0		2		0	2	5			0		0		0	0			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			1.117.000	0	-		-			0	0	0		-		-	0	0		1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	25		0		5		0	5	0			0		0		0	0			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0012	Pengembangan Rumah Sakit			20.178.900	0	-		-			0	0	0		-		-	0	0		1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	10		0		1		0	1	0			0		0		0	0			Dinas Kesehatan



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	4		0		25		1	25	1			1		1		25	0				Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	25		0		25		0	25	0			25		25		100	0				Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			7.292.556		-		2.084.837			2.084.836.620,00	600.000.000,00	600.000.000,00		338.568		338.568	100	4.64				Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	25		0		25		0	25	0			25		25		100	0				Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kalibrasi alkes di Puskesmas	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	25		0		25		0	25	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	25		0		25		0	25	0			25		25		100	0				Dinas Kesehatan



			Terpelihara Sesuai Standar (Unit)																				
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			25	1.300.000	-	1.399.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			25	1.270.970	-	65.436	65.436.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	154.514.000,00	Dinas Kesehatan
	Terpeliharaan ya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5135	182.582.796	-	23.643.960	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	1.271.720	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa serta penanganan penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5135	0	0	258	0	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	Dinas Kesehatan



			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	353 029		0		25		6.59 3	25	9.903			35. 303		35. 303		10	0						Dinas Keseh atan
			Jumlah Penyalahgun a NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	100 5		0		25		50	25	50			180		180		17.9 1	0						Dinas Keseh atan
			Jumlah Orang yang menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgun aan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	407 78		0		20 0		1.24 5	200	1.123			6.7 21		6.7 21		16.4 8	0						Dinas Keseh atan
1.02.02. 2.02.001 0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			87.25 3		-		13.50 0			27.600.0 00	12.052.3 27,00	9.092.32 7,00		8.931		8.931	19.1	10. 24				150.000. 000,00		Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	513 5		0		0		258	0	244			981		981		19.1	0						Dinas Keseh atan
1.02.02. 2.02.002 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			86.61 7		-		27.60 0			27.600.0 00	12.052.3 27,00	9.092.32 7,00		9.482		9.482	10	10. 95						Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	353 029		0		25		6.59 3	25	9.903			35. 303		35. 303		10	0						Dinas Keseh atan

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



1.02.02.2.02.002.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			121.855		-		65.440			65.440.000	13.284.000,00	9.564.000,00		10.453		10.453	17.91	8.58				Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1005		0		25		50	25	50			180		180		17.91	0				Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.002.7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			76.378		-		20.000			20.000.300	11.600.000,00	7.820.000,00		6.781		6.781	16.48	8.88				Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	40778		0		200		1.245	200	1.123			6.721		6.721		16.48	0				Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	32454		0		8094		1.311	8094	826			5.727		5.727		17.65	0				Dinas Kesehatan
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	41274		0		7726		1.309	7726	1.959			8.000		8.000		19.38	0				Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.000.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			610.412		-		91.179			91.179.000	40.660.000,00	29.870.000,00		32.210		32.210	17.65	5.28				Dinas Kesehatan
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	32454		0		8094		1.311	8094	826			5.727		5.727		17.65	0			150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.000.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			713.855		-		123.028			123.028.000	63.426.000,00	51.921.000,00		49.144		49.144	19.38	6.88				Dinas Kesehatan



		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	41274	0		7726		1.309	7726	1.959			8.000		8.000		19.38	0			165.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan kesehatan anak sesuai standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	40652	0		7358		1.185	7358	2.030			7.884		7.884		19.39	0				Dinas Kesehatan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	130347	0		35892		6.236	35892	8.152			20.690		20.690		15.87	0				Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			627.204		-		37.500		37.500.000,	20.000.000,00	12.805.000,00		12.713		12.713	19.39	2.03			50.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	40652	0		7358		1.185	7358	2.030			7.884		7.884		19.39	0				Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			586.900		-		21.800		21.800.000	17.880.000,00	9.515.000,00		9.243		9.243	15.87	1.57			27.800.000,00	Dinas Kesehatan
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	130347	0		35892		6.236	35892	8.152			20.690		20.690		15.87	0				Dinas Kesehatan
		Tercapainya SPM bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	26	0		1		0	1	0			0		0		0	0				Dinas Kesehatan

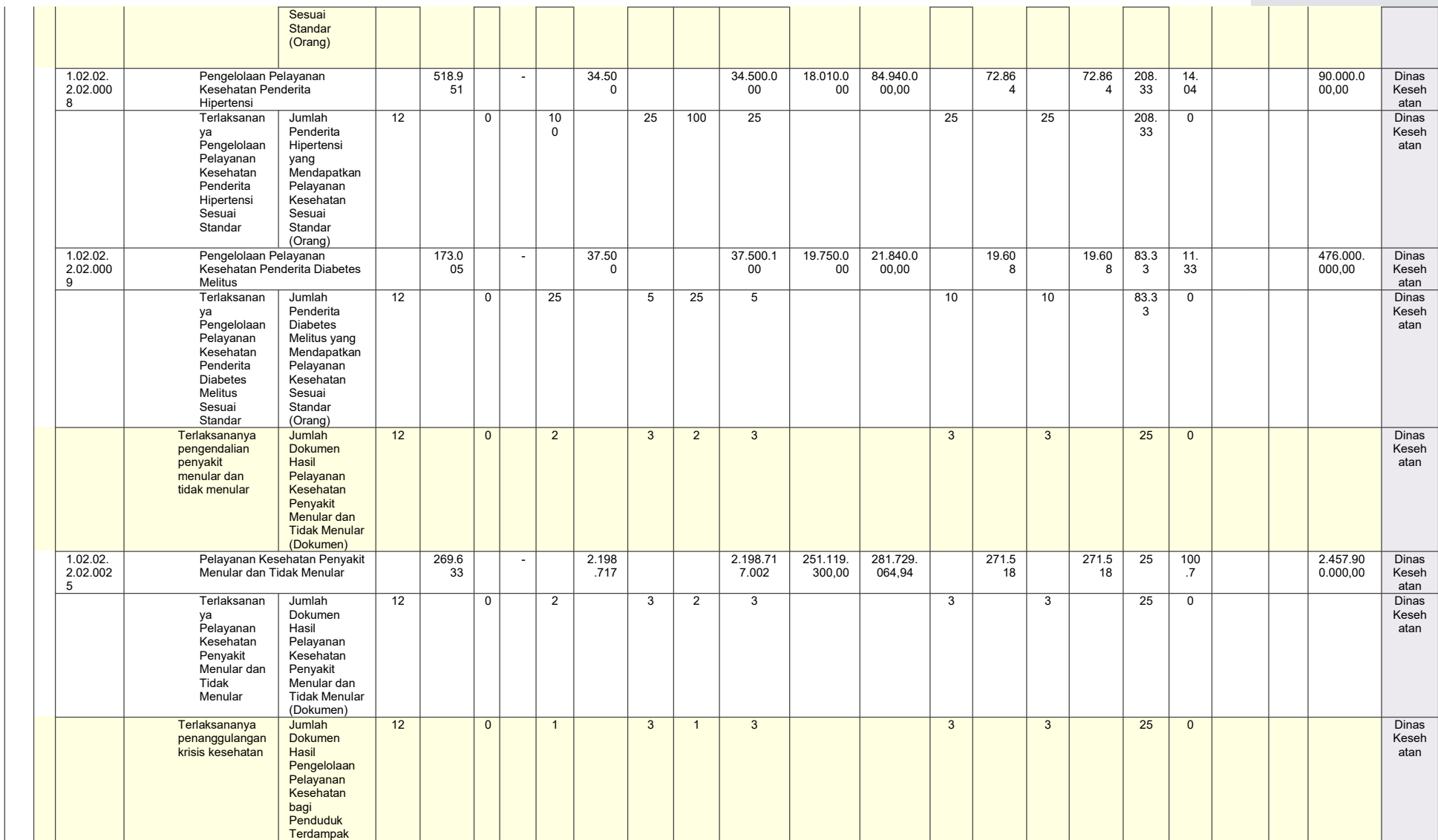


1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			-	-	25.000	0	0	0	0	-	-	0	0		27.800.000,00	Dinas Kesehatan
	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	26	0	1		0	1	0		0	0	0	0			Dinas Kesehatan
	Terlaksananya penyelenggaraan surveilans epidemiologi yang tepat waktu, lengkap, dan responsif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	0	1		3	1	3		3	3	25	0			Dinas Kesehatan
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	40270	0	1		0	1	560		1.122	1.122	2.79	0			Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	52	0	1		5	1	20		12	12	23.08	0			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			522.462	-	54.778			54.778.000	89.570.000,00	89.570.000,00	41.550	41.550	25	7.95	67.600.000,00	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	0	1		3	1	3		3	3	25	0			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			2.388.398	-	37.853			37.853.000	147.529.000,00	143.185.000,00	47.855	47.855	2.79	2	35.600.000,00	Dinas Kesehatan

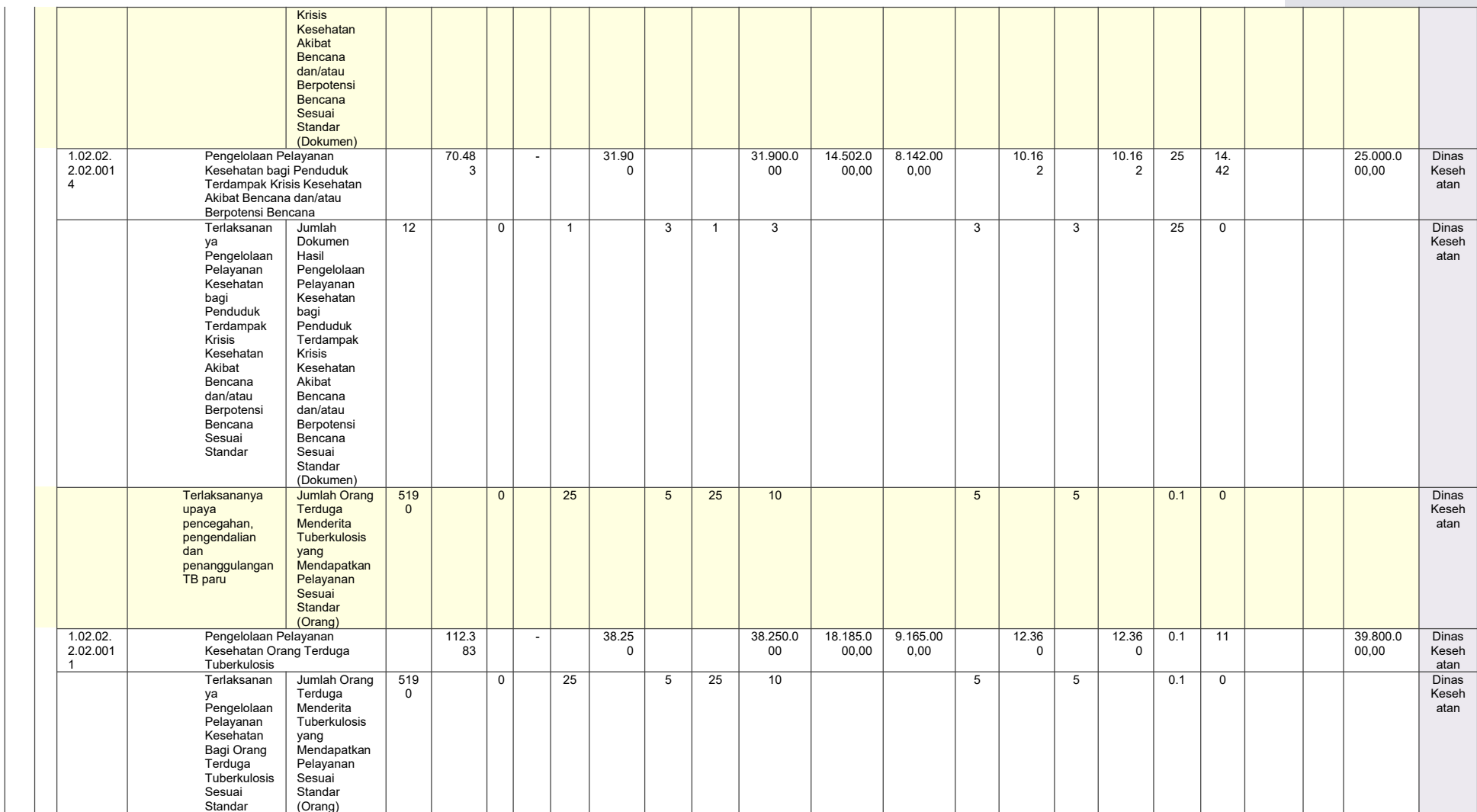


		Terdistribusi nya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratoriu m Rujukan/Nasi onal	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasi onal yang Didistribusika n (Paket)	402 70		0		1		0	1	560			1.1 22		1.1 22		2.79	0					Dinas Keseh atan
1.02.02. 2.02.003 7		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			239.4 05		-		25.00 0			25.000.0 00	10.500.0 00,00	5.970.00 0,00		6.242		6.242	23.0 8	2.6 1			76.800.0 00,00	Dinas Keseh atan	
		Terlaksanan ya Kewaspada an Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	52		0		1		5	1	20			12		12		23.0 8	0				Dinas Keseh atan	
		Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12		0		2		0	2	0			1		1		8.33	0				Dinas Keseh atan	
1.02.02. 2.02.002 6		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			164.6 42.27 1		-		16.00 7.096			16.007.0 96.000	16.549.9 17.717	16.544.2 15.217,0 0		17.07 9.717		17.07 9.717	8.33	10. 37			25.000.0 00,00	Dinas Keseh atan	
		Terlaksanan ya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12		0		2		0	2	0			1		1		8.33	0				Dinas Keseh atan	
		Terlaksananya pengendalian faktor resiko PTM di fasilitas kesehatan dan masyarakat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12		0		10 0		25	100	25			25		25		208. 33	0				Dinas Keseh atan	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12		0		25		5	25	5			10		10		83.3 3	0				Dinas Keseh atan	

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



 Türkiye Cumhuriyeti
 Millî Eğitim Bakanlığı
 Türkiye Cumhuriyeti
 Gençlik ve Spor Bakanlığı



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



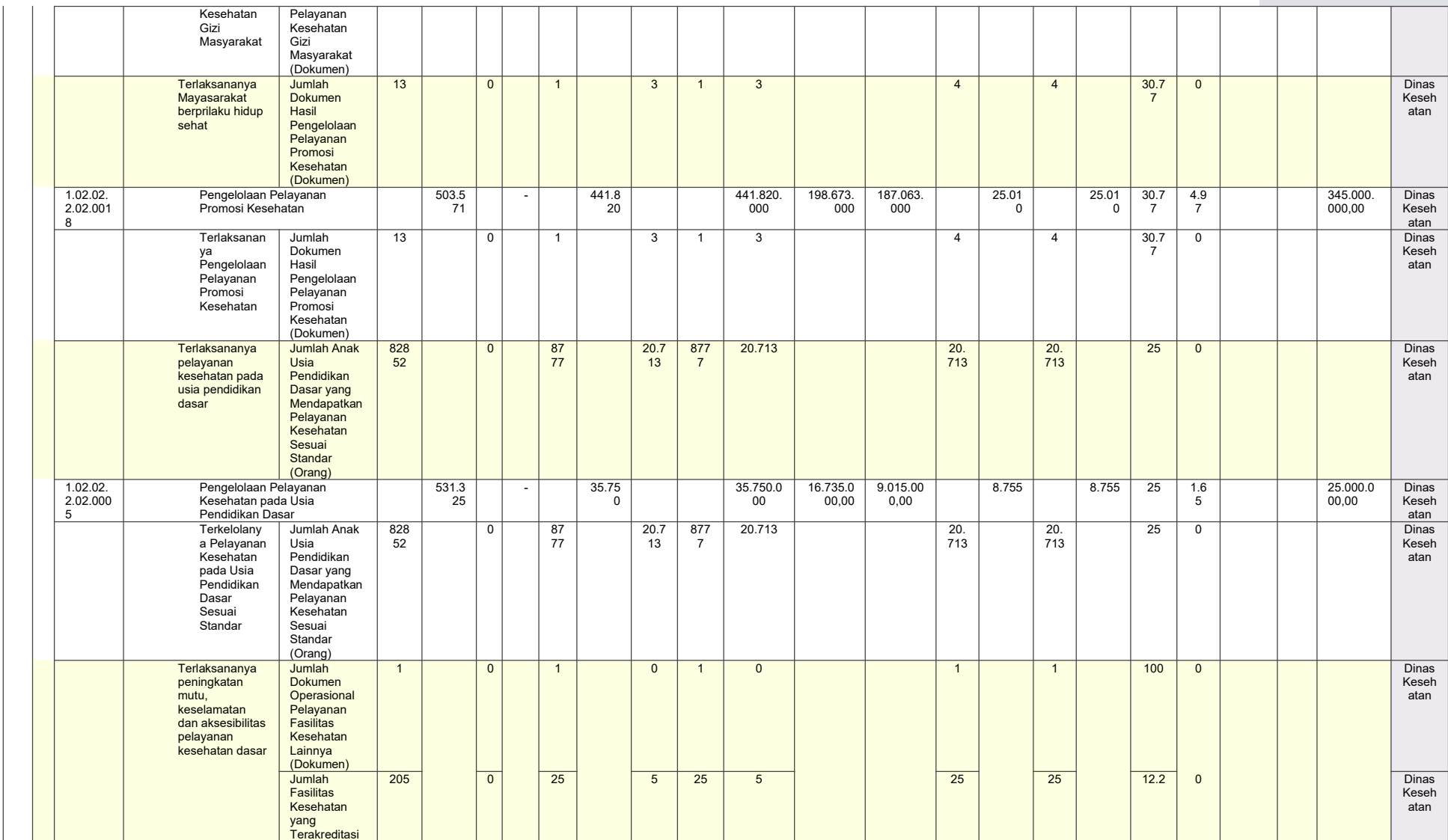
		Terlaksananya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0				Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0				Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			1.389.062		-		30.000			30.000.000	17.400.000,00	13.680.000,00		9.708		9.708	25	0.7			39.800.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0				Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			181.264		-		86.200			86.200.000	40.080.000,00	29.960.000,00		27.039		27.039	25	14.92			39.800.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0				Dinas Kesehatan



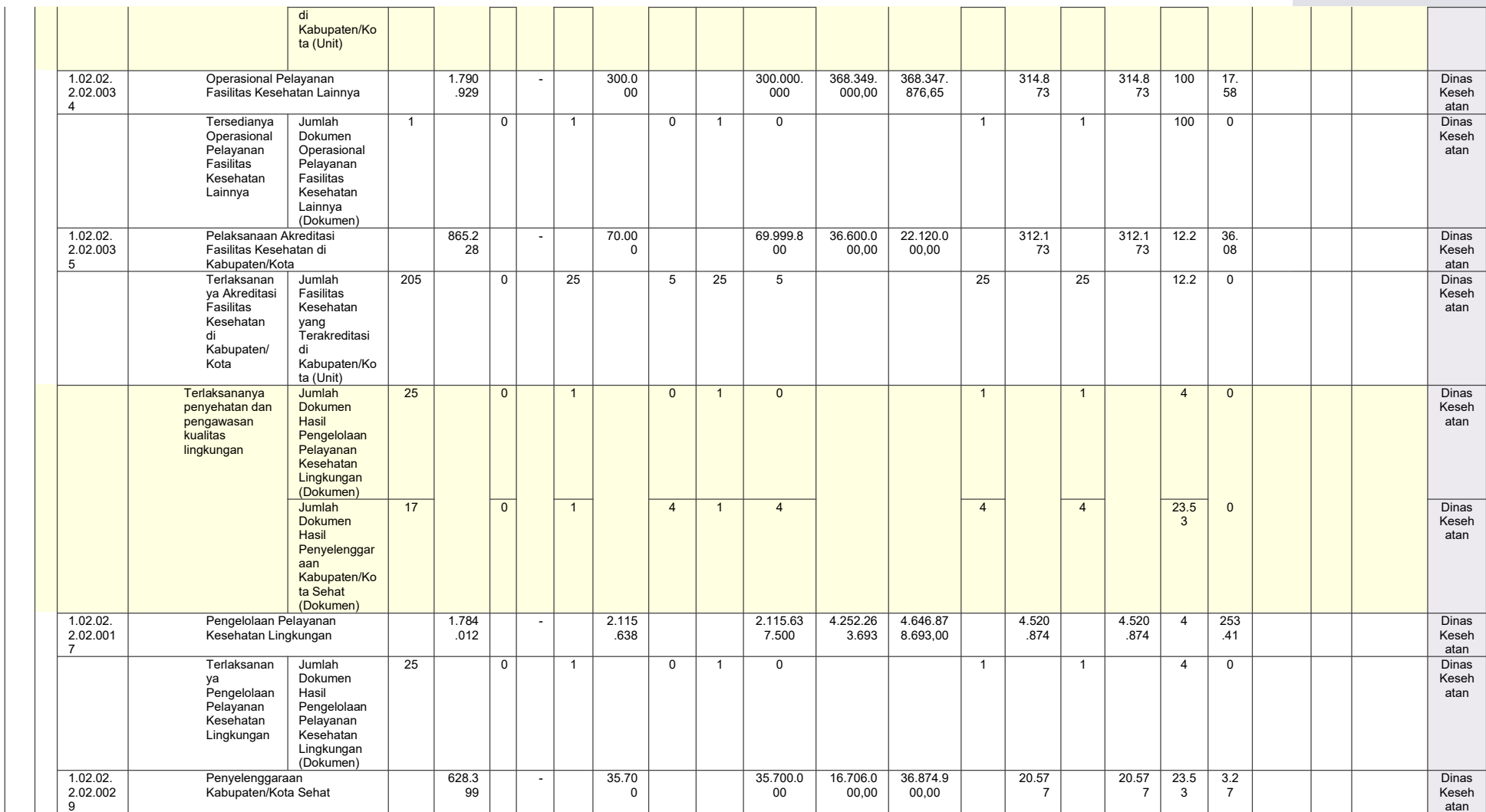
		Obat Massal)																						
		Terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan lansia sesuai standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	146 525 2		0		39 72 1		73.2 50	397 21	73.250			293 .00 0		293 .00 0		20	0			Dinas Keseh atan	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	320		0		59 60 1		14.9 00	596 01	14.900			59. 610		59. 610		186 28.1 3	0			Dinas Keseh atan	
	1.02.02. 2.02.000 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		493.9 33		-		31.40 0			31.400.0 00	15.212.0 00,00	8.477.00 0,00		8.634		8.634	20	1.7 5			39.800.0 00,00	Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	146 525 2		0		39 72 1		73.2 50	397 21	73.250			293 .00 0		293 .00 0		20	0			Dinas Keseh atan	
	1.02.02. 2.02.000 7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		660.9 93		-		40.00 0			40.000.0 00	53.700.0 00,00	45.340.0 00,00		47.96 1		47.96 1	186 28.1 3	7.2 6			39.800.0 00,00	Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	320		0		59 60 1		14.9 00	596 01	14.900			59. 610		59. 610		186 28.1 3	0			Dinas Keseh atan	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur,	25		0		1		0	1	10			5		5		20	0			Dinas Keseh atan	



			Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)																					
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			70.267		-		80.000			80.000.000	42.400.000,00	28.180.000,00		25.010		25.010	20	35.59			39.800.000,00	Dinas Kesehatan
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	25		0		1		0	1	10			5		5		20	0				Dinas Kesehatan
		Terlaksananya upaya pencegahan, pengendalian penanggulangan penyakit infeksi spesifik	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10554		0		25		2.792	25	2.792			2.792		2.792		26.45	0				Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			109.583		-		41.500			41.500.000	20.070.000,00	10.420.000,00		10.070		10.070	26.45	9.19			80.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10554		0		25		2.792	25	2.792			2.792		2.792		26.45	0				Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan kesehatan gizi pada masyarakat sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	25		0		1		5	1	5			5		5		20	0				Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			857.297		-		1.422.811			1.422.810.900	369.500.000,00	361.000.000,00		342.529		342.529	20	39.95			325.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	25		0		1		5	1	5			5		5		20	0				Dinas Kesehatan



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



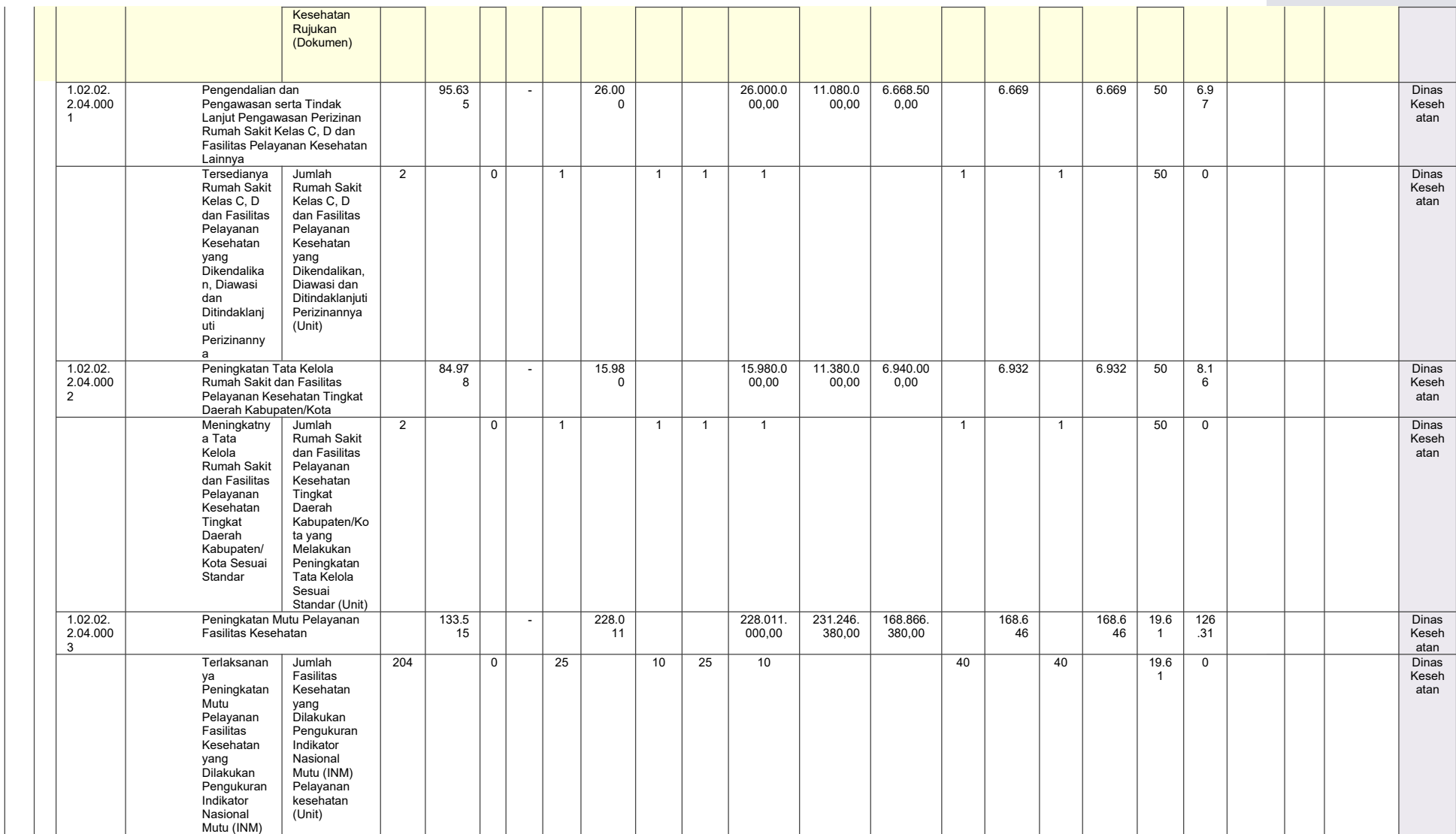
		Terselenggara Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Kabupaten/Ko ta Sehat (Dokumen)	17		0		1		4	1	4			4		4		23.5 3	0				Dinas Keseh atan
		Terlaksananya peningkatan upaya kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	240		0		1		5	1	5			25		25		10.4 2	0				Dinas Keseh atan
1.02.02. 2.02.001 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			775.5 77		-		22.50 0			22.500.0 00	177.276. 000,00	173.696. 000,00		152.4 05		152.4 05	10.4 2	19. 65				Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	240		0		1		5	1	5			25		25		10.4 2	0				Dinas Keseh atan
		Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	200		0		1		0	1	0			0		0		0	0				Dinas Keseh atan
1.02.02. 2.02.005 0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			93.89 2		-		-			0	0	0		-		-	0	0				Dinas Keseh atan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	200		0		1		0	1	0			0		0		0	0				Dinas Keseh atan
1.02.02. 2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.443 .913		-		300.0 00				76.804			246.5 39		246.5 39	0.59	17. 07				Dinas Keseh atan
		Terlaksananya penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan (SIK) secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	169		0		2		1	2	0			1		1		0.59	0				Dinas Keseh atan

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1.443.913	0	-	2	300.000	1	2	0	300.000.000	226.900.000,00	232.150.400,00	246.539	246.539	0.59	17.07		325.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	169	0		2		1	2	0			1	1		0.59	0			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		497.182	0	-		304.991				101.232			192.812	192.812	37.9	38.78			Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	2	0		1		1	1	1			1	1		50	0			Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	2	0		1		1	1	1			1	1		50	0			Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	204	0		25		10	25	10			40	40		19.61	0			Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	25	0		1		5	1	6			8	8		32	0			Dinas Kesehatan

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		183.055		-	35.000			35.000.000,00	16.300.000,00	10.540.000,00		10.565		10.565	32	5.77			Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	25	0	1		5	1	6			8	8		32	0				Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		10.128.558		-	2.953.561			510.209			1.312.184		1.312.184	35.99	12.96	DINAS KESEHATAN			Dinas Kesehatan
	Meningatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar (%)	100	0									0		0	0				Dinas Kesehatan
		Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	100	0			100		100			100	100		100	0				Dinas Kesehatan
		Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis (Persen)		0	70			70					0		0	0				Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		139.512		-	67.000			8.540			10.565		10.565	25	7.57				Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Named di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	900	0	1		225	1	225			225	225		25	0				Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		69.756		-	42.000			42.000.000,00	10.500.000,00	6.660.000,00	5.440		5.440	25	7.8				Dinas Kesehatan

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

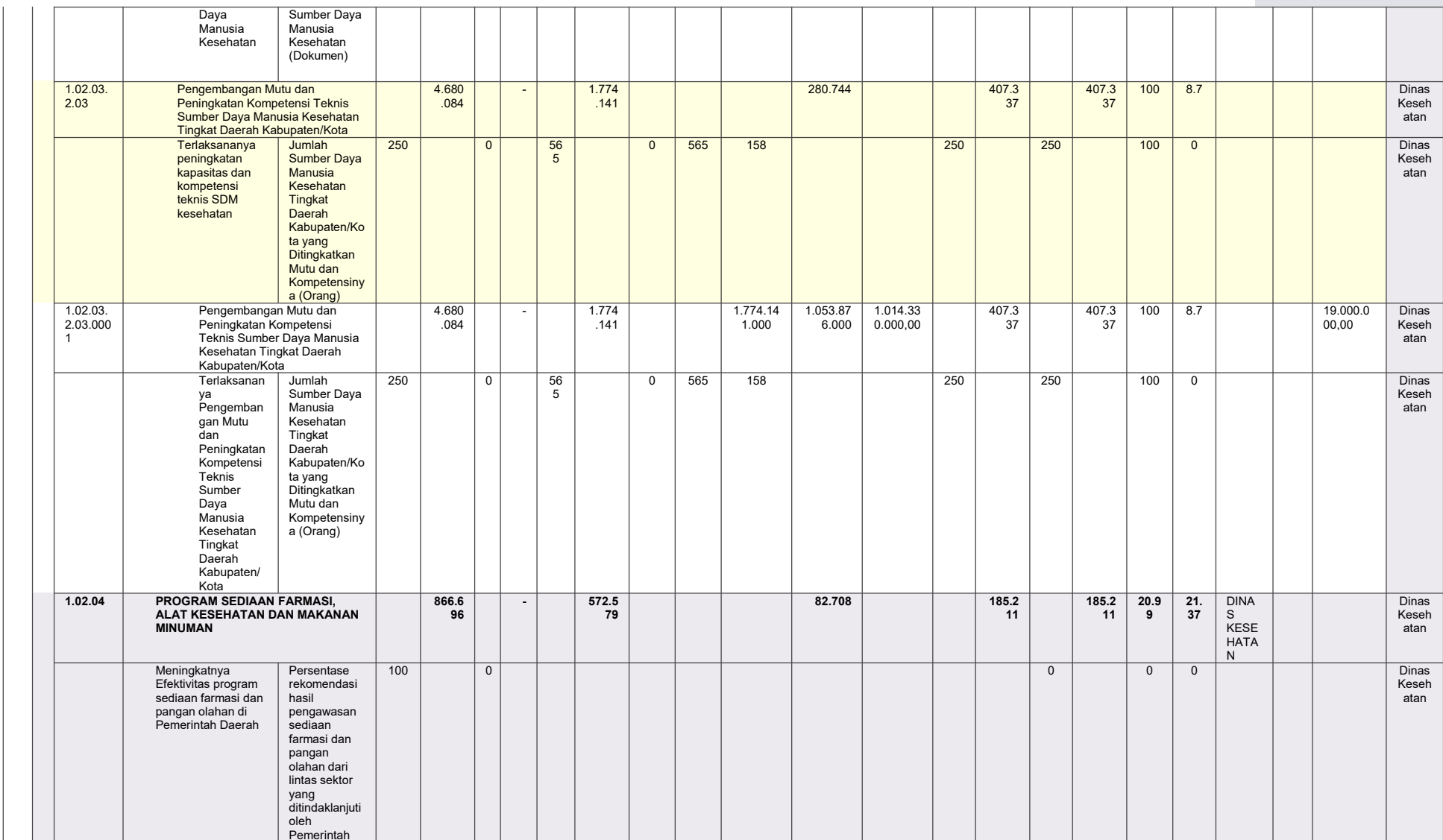


		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	900		0		1		225	1	225			225		225		25	0					Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	900		0		1		225	1	225			225		225		25	0					Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.0002		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			69.756		-		25.000			25.000.000,00	10.500.000,00	7.220.000,00		5.126		5.126	25	7.35					Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	900		0		1		225	1	225			225		225		25	0					Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			5.308.962		-		1.112.420				220.926			894.282		894.282	21.98	16.84					Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pembinaan, pendayagunaan, dan pemenuhan tenaga medis serta tenaga kesehatan yang kompeten dan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	10		0		1		0	1	0			2		2		20	0					Dinas Kesehatan

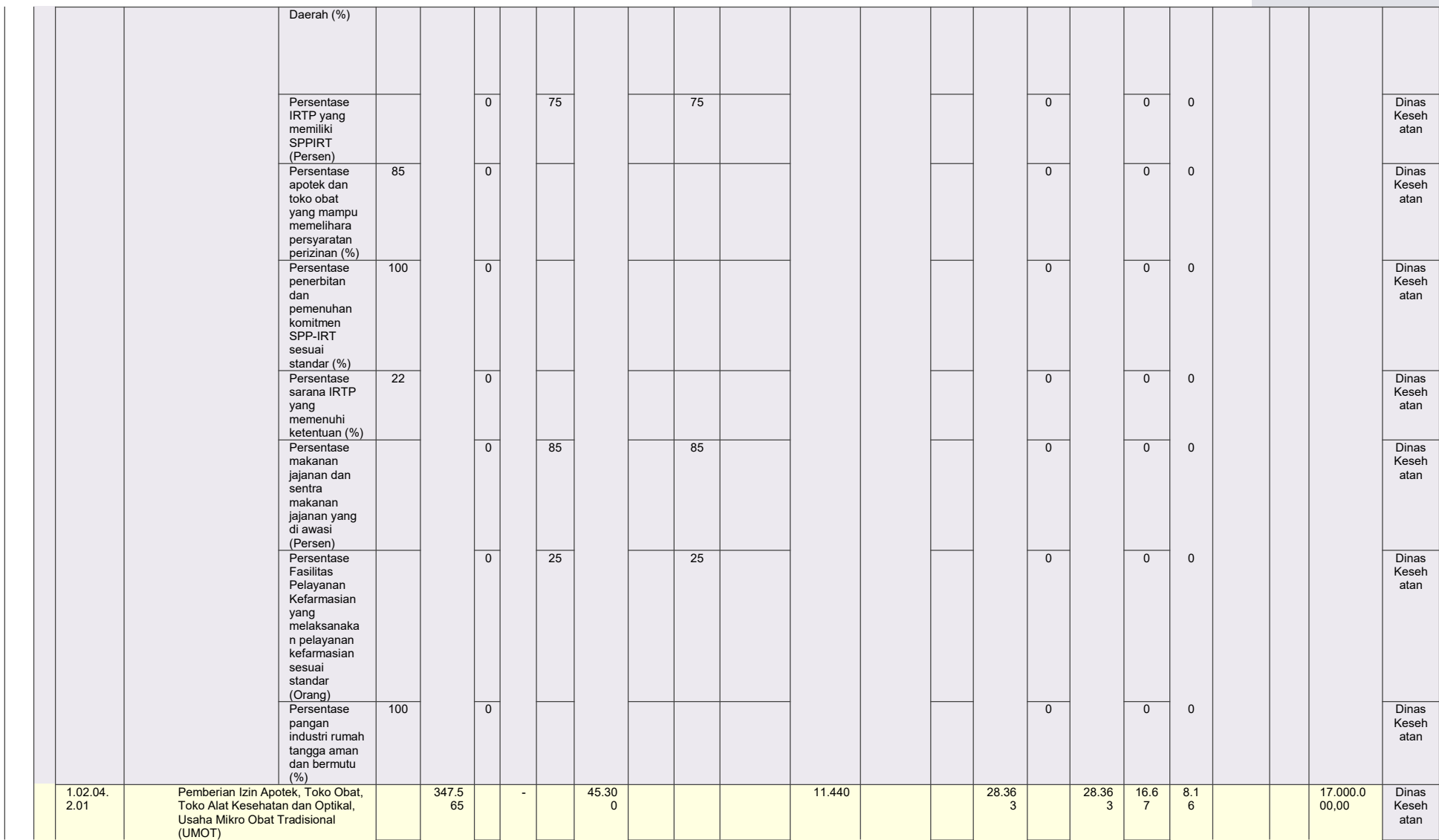


			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	27		0		500		0	500	10			7		7		25.93	0				Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	135		0		1		0	1	10			27		27		20	0				
1.02.03.2.02.0001		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			85.357		-		25.670			25.670.000,00	10.888.600,00	6.248.600,00		4.885		4.885	20	5.72			14.500.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	10		0		1		0	1	0			2		2		20	0				Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			4.175.535		-		1.016.950			1.016.950.000	914.620.000,00	910.000.000,00		743.965		743.965	25.93	17.82			2.945.500.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	27		0		500		0	500	10			7		7		25.93	0				Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			1.048.070		-		69.800			69.800.000,00	161.027.000,00	157.067.000,00		145.432		145.432	20	13.88			36.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan	135		0		1		0	1	10			27		27		20	0				Dinas Kesehatan

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı
 Ministry of National Education



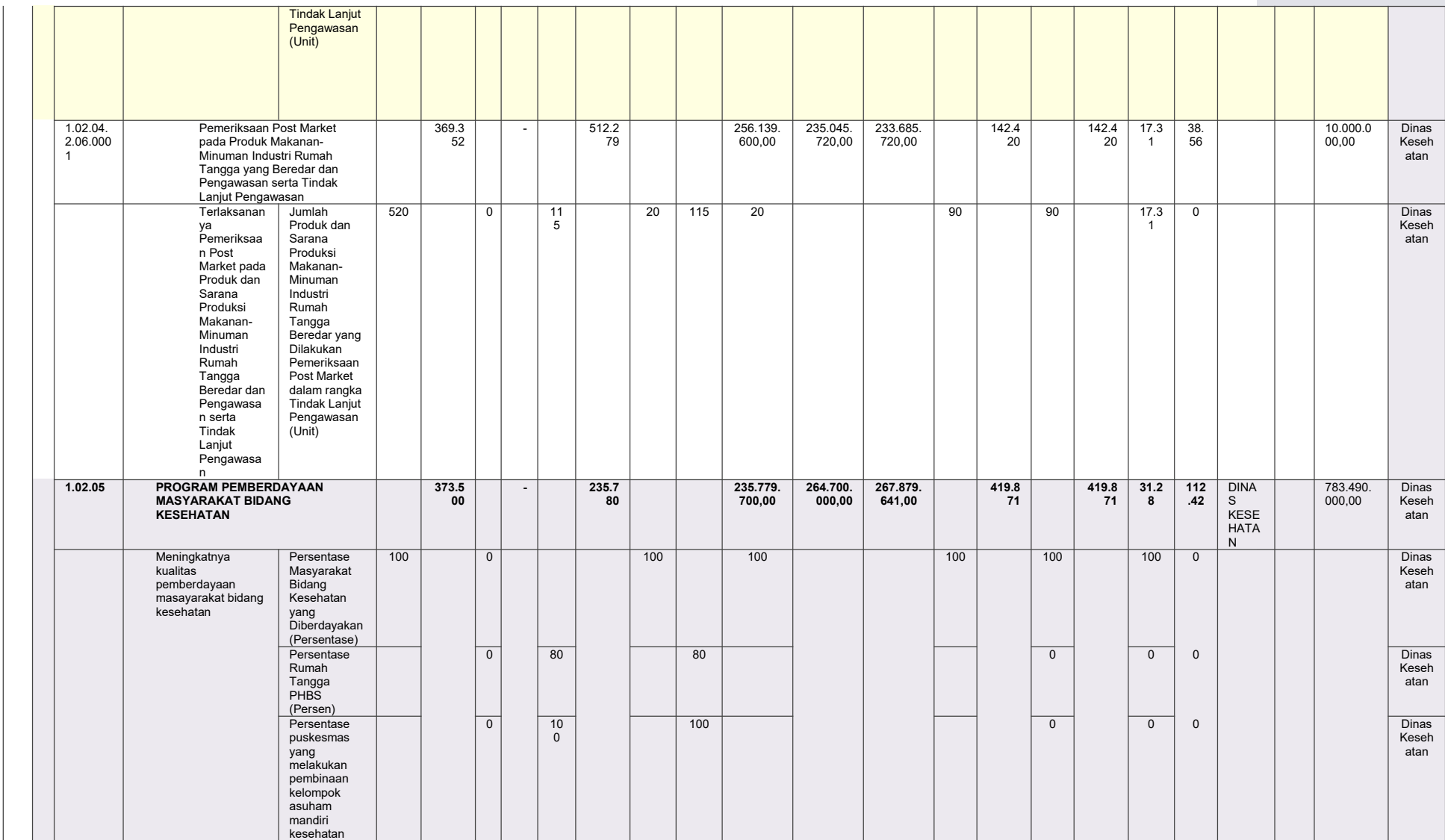
		Terlaksananya pelayanan perizinan sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang cepat, akuntabel, dan sesuai standar.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	12		0		1		2	1	4			2		2		16.67	0				Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			347.565		-		45.300			45.300.000,00	89.819.000,00	81.170.000,00		28.363		28.363	16.67	8.16			19.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	12		0		1		2	1	4			2		2		16.67	0				Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			61.994		-		15.000				9.778			9.778		9.778	25	15.77			10.000.000,00	Dinas Kesehatan



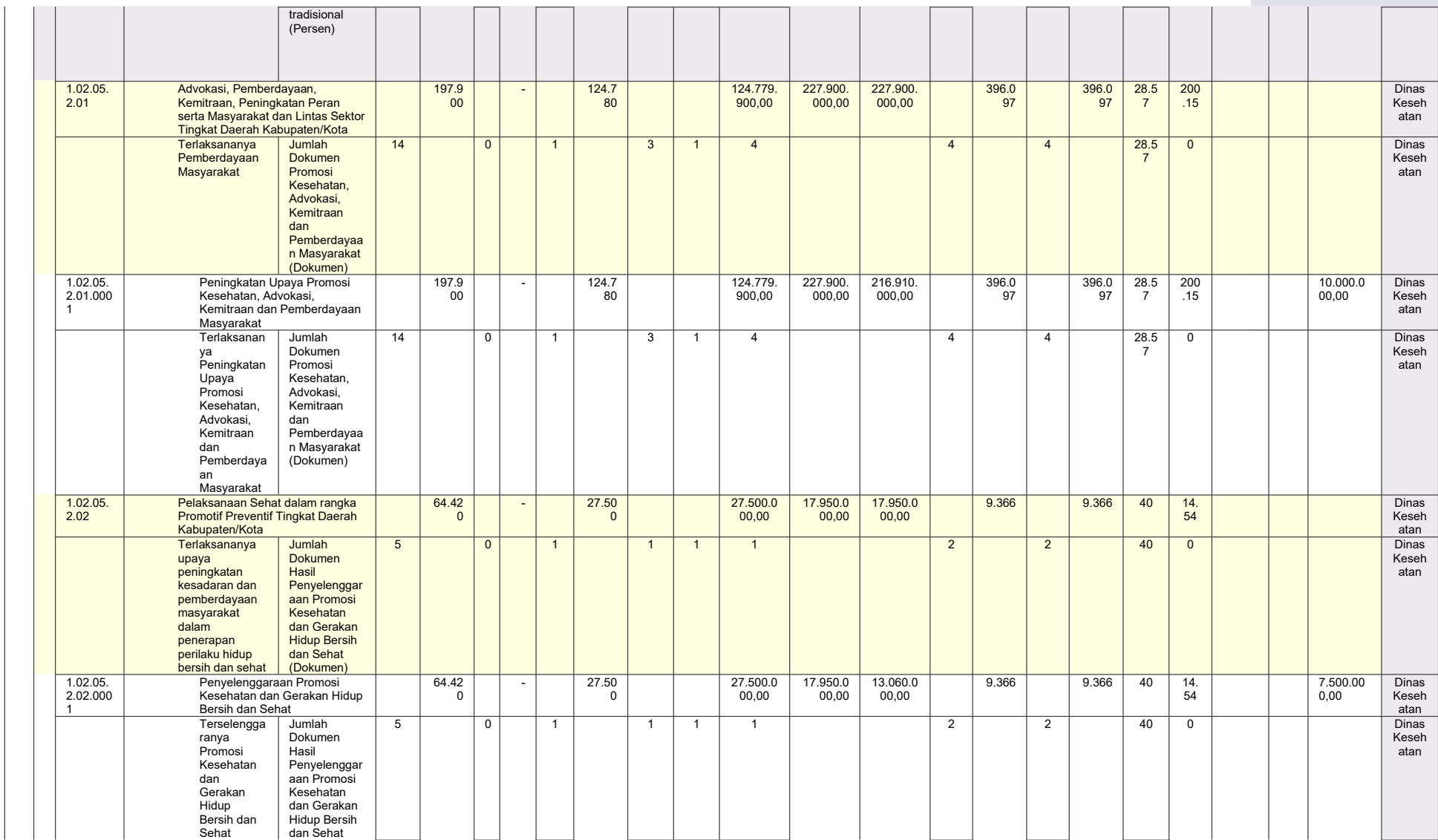
		Terlaksananya penilaian dan sertifikasi hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0					Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			61.994		-		15.000			45.300.000,00	89.819.000,00	81.170.000,00		9.778		9.778	25	15.77				10.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0					Dinas Kesehatan
1.02.04.2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			87.784		-		-				4.650			4.650		4.650	25	5.3				10.000.000,00	Dinas Kesehatan

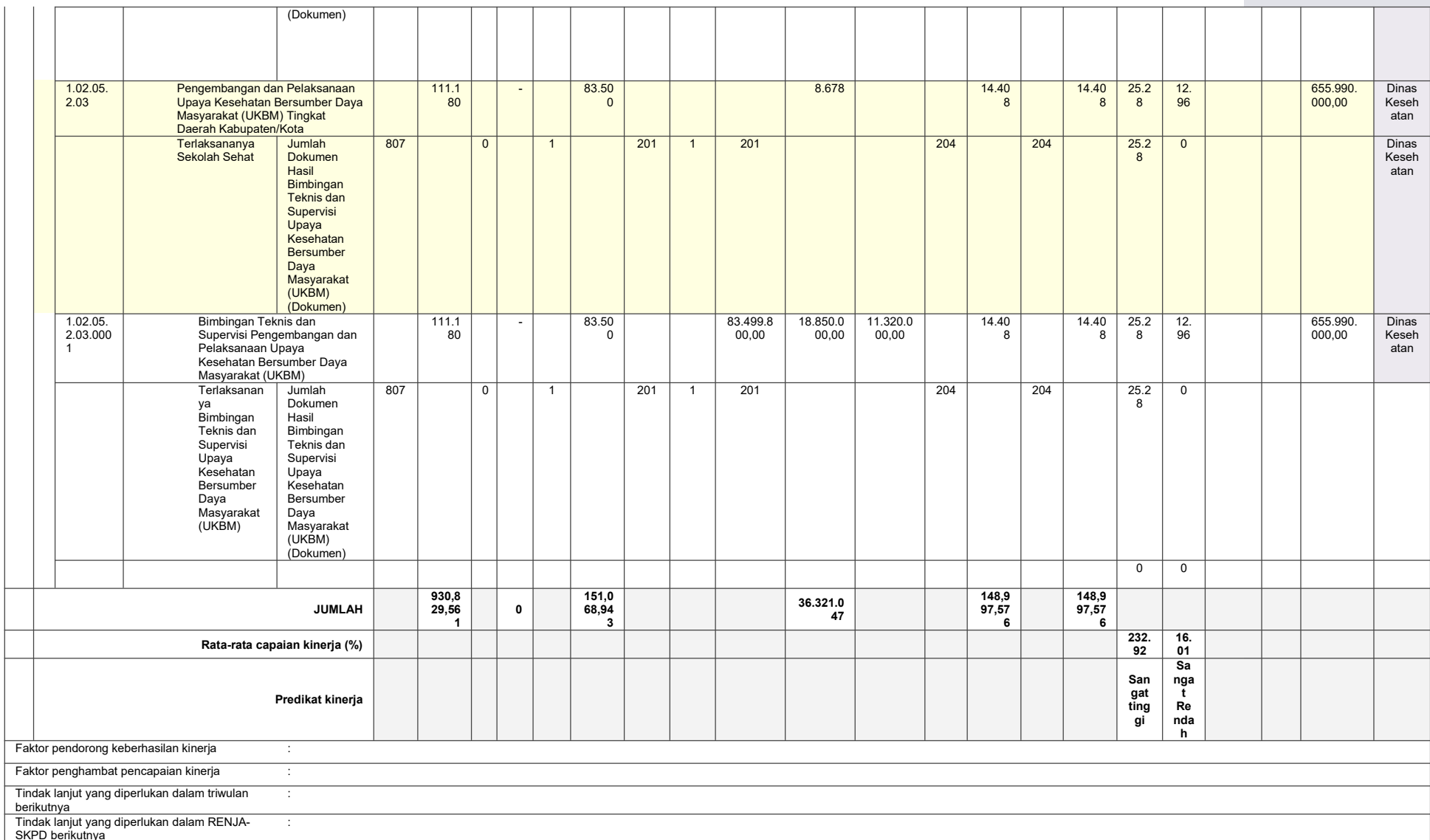


		Terlaksananya pembinaan keamanan pangan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0					Dinas Kesehatan
1.02.04.2.05.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			87.784		-		-			0,00	5.800.000,00	5.800.000,00		4.650		4.650	25	5.3				10.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	12		0		1		3	1	3			3		3		25	0					Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			369.352		-		512.279			256.139.600,00	235.045.720,00	235.045.720,00		142.420		142.420	17.31	38.56				10.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan post market produk pangan industri rumah tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	520		0		115		20	115	20			90		90		17.31	0					Dinas Kesehatan



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

[illegible]



**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**



BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas Kesehatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas Kesehatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat

diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas Kesehatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Kesehatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas Kesehatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas Kesehatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parik Malintang, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman



Dr. Liliyehi, M.Kes

NIP. 197304082002122002

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(NENI EMILDA, SKM, MM)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	